

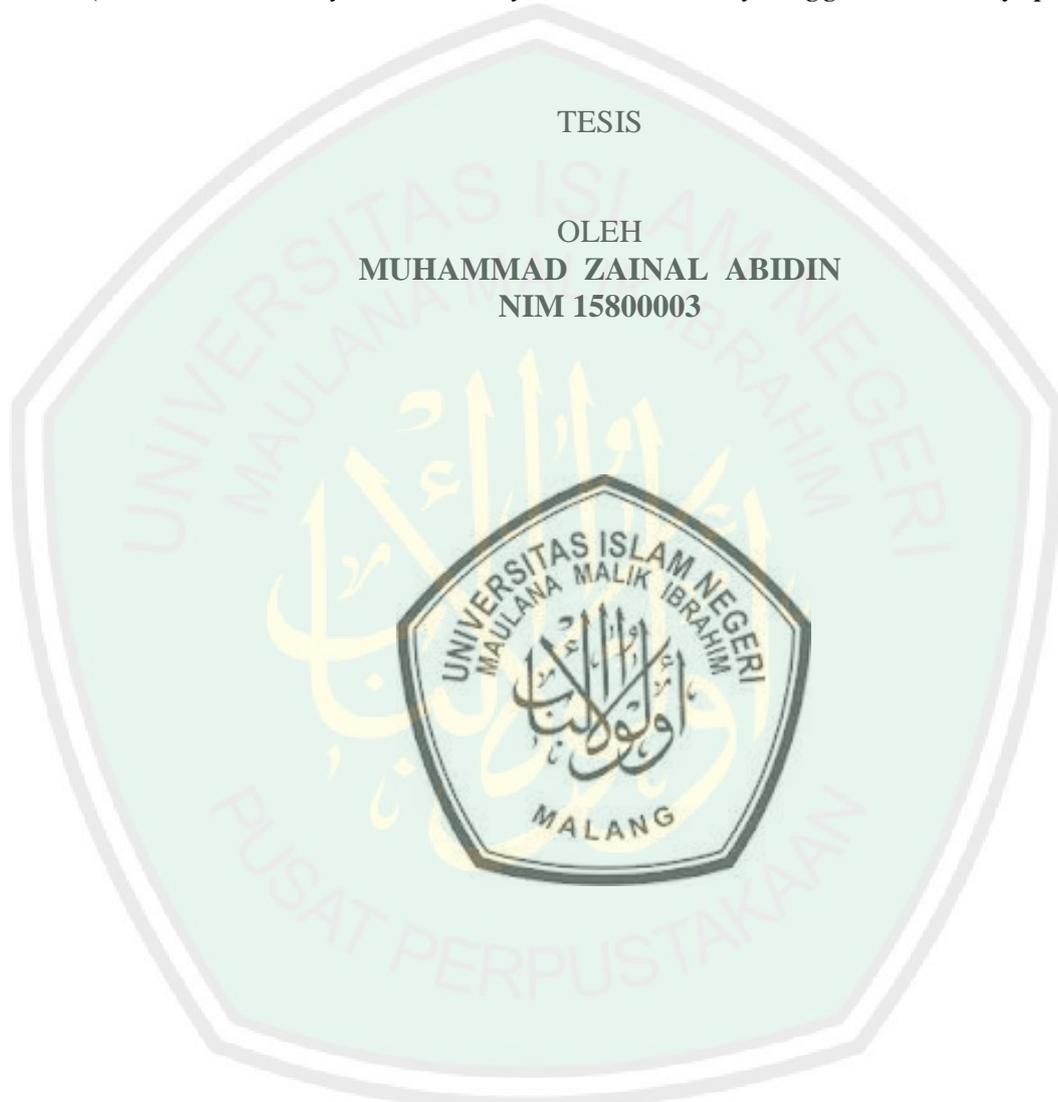
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT ASLI PAPUA DALAM KAJIAN MAQASID
SYARIAH**

(Studi Kasus Masyarakat Nelayan Port Numbay Enggros Kota Jayapura)

TESIS

OLEH

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN
NIM 15800003



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**



**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT ASLI PAPUA DALAM KAJIAN MAQASID
SYARIAH**

(Studi Kasus Masyarakat Nelayan Port Numbay Enggros Kota Jayapura)

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
Menyelesaikan Program magister
Ekonomi Syariah

Oleh
MUHAMAD ZAINAL ABIDIN
NIM. 15800003

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Untuk Memenuhi Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua dalam Kajian Maqasid Syariah (*Studi Kasus Masyarakat Nelayan Enggros Kota Jayapura*) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 1 Agustus 2017.....
Pembimbing I


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA
NIP : 19730719 200501 1 003

Malang, 3 Agustus 2017.....
Pembimbing II


Dr. H. Siswanto, M.Si
NIP: 19750906 200604 1 001

Malang, 8 Agustus 2017.....
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA
NIP : 19730719 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Untuk Memenuhi KebutuhanPerekonomian Masyarakat Asli Papua Dalam Kajian Maqasid Syariah (*Studi Kasus Masyarakat Nelayang Port Numbay Kampung Enggros Kota Jayapura*) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 11 September 2017.

Dewan Penguji,


Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI
NIP : 19750707 200501 1 005

Ketua


Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag.
NIP: 19490929 198103 1 004

Penguji Utama


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP: 19730719 200501 1 003

Anggota


Dr. H. Siswanto, M.Si
NIP: 19750906 200604 1 001

Anggota

Mengetahui,
Pascasarjana


Prof. Dr. H. Baharuddin, M. Pd.I
NIP: 19561231 198303 1 032

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ZAINAL ABIDIN
NIM : 15800003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua dalam Kajian *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Enggros Kota Jayapura)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 2 April 2017
Hormat Saya




M. Zainal Abidin
NIM : 15800003

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moril maupun materiel demi anaknya tersayang.
2. Kakak tersayang yang telah memberikan motivasi disetiap langkah dalam perjuangan menggapai cita-cita.
3. Calon Istri tercinta karena telah memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, Tesis yang berjudul “Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Asli Papua Dalam Kajian Maqasid Syariah” dapat terselesaikan dengan baik dan semoga berguna serta bermanfaat. Sholawat teriring salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, dan para pembantu Rektor. Direktur Pascasarjana Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempus studi.
2. Ketua program studi magister Ekonomi Syariah, Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A, atas motivasi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc, MA, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis
4. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Siswanto, M.Si, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis
5. Semua staff pengajar atau dosen dan staff TU Pascasarjana UIN yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan studi.
6. Pemerintah Kota Jayapura khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan serta Pemerintah Kampung Enggros serta Tokoh masyarakatnya, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi selama dalam penelitian
7. Semua teman-teman satu angkatan prodi ekonomi syariah yang telah menemani selama dalam perkuliahan dan selalu kompak dalam segala hal.

8. Teman-teman seperjuangan perantauan terkhusus dari Jayapura yang sama-sama menempuh studi di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua, ayahanda bapak Zuhri Hamam dan ibunda ibu Romlah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil, dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal dan senantiasa diberikan kesehatan selalu.
10. Calon istri, Hartatik, Amd. Keb, yang selalu memberikan motivasi, pengertian dan perhatian didalam perjalanan studi yang dilakukan ini.
11. Semua keluarga di Blitar dan keluarga di Cirebon yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup khususnya selama studi,

Batu, Agustus 2017
Penulis

Muhamad Zainal Abidin

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Logo	ii
Halaman Judul	iii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iv
Lembar Pengesahan Tesis	v
Lembar Pernyataan Orisinilitas Penelitian	vi
Lembar Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Motto	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Orisinalitas Penelititan	18
F. Definisi Istilah	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoritik	29
1. Teori kepemilikan	29
2. Pengelolaan	34
3. Kebutuhan	49
4. Maqasid Syariah	52
B. Kerangka Berfikir	61

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
B. Kehadiran Peneliti.....	64
C. Latar Penelitian.....	65
D. Data dan Sumber Penelitian.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Teknik Analisa Data.....	73
G. Pengecekan Keabsahan.....	74

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	76
B. Hasil Penelitian.....	83
1. Pengelolaan sumber daya alam laut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat asli Papua.....	83
2. Pengelolaan sumber daya alam laut masyarakat asli Papua dalam kajian maqasid syariah.....	123

BAB V PEMBAHASAN

A. Pengelolaan sumber daya alam laut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat asli Papua.....	131
B. Pengelolaan sumber daya alam laut masyarakat asli Papua dalam kajian maqasid syariah.....	143

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	155

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Kepulauan Wilayah di Indonesia.....	1
Tabel 1.2	Potensi Kekayaan Sumber Daya Alam Provinsi Papua	11
Tabel 1.3	Potensi Sumber Daya Alam Laut tangkap ikan	12
Tabel 1.4	Wilayah Nasional Konservasi taman laut	12
Tabel 1.5	Presentase Penduduk Miskin Papua	15
Tabel 1.6	Orisinalitas Penelitian	22
Tabel 2.1	Tipe kepemilikan.....	30
Tabel 4.1	Luas wilayah menurut Distrik di Kota Jayapura.....	76
Tabel 4.2	Banyaknya alat tangkap lengkap unit di Kota Jayapura.....	89
Tabel 4.3	Produksi perikanan Kota Jayapura 2008-2011.....	109
Tabel 4.4	Produksi jenis tangkap ikan per tahun selama enam tahun terakhir di Kota Jayapura.....	110
Tabel 4.5	Jumlah armada penangkap ikan	110
Tabel 4.6	Perkembangan jumlah unit pengelolaan jenis ikan berdasarkan jenis produk di Kota Jayapura 2006- 2011	111
Tabel 4.7	Perkembangan jumlah produksi hasil unit pengolahan ikan 2006-2011	111
Tabel 4.8	Produksi perikanan Kota Jayapura 2012-2016.....	112
Tabel 4.9	Target dan realisasi produksi perikanan 2012- 2016.....	112
Tabel 4.10	Konsumsi ikan masyarakat Kota Jayapura dalam angka	114
Tabel 4.11	Jenis dan jumlah armada tangkap.....	114
Tabel 4.12	Jenis dan jumlah tangkap 2012-2016.....	115
Tabel 4.13	Jumlah nelayan 2012-2016.....	115
Tabel 4.14	Produksi perikanan tangkap per jenis ikan 2016.....	116
Tabel 4.15	Produksi hasil tangkapan per desa nelayan	117
Tabel 4.16	Perkembangan jumlah unit pengolah ikan tahun 2012-2016.....	119
Tabel 4.17	Data produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2012-2016.....	121
Tabel 4.18	Data jumlah olahan hasil perikanan tahun 2012- 2016.....	122
Tabel 4.19	Distributor dan pengecer ikan	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	62
Gambar 3.1	Kota Jayapura	66
Gambar 3.2	Letak Wilayah Enggros	66
Gambar 4.1	Presentase wilayah berdasarkan Distrik di Kota Jayapura	77
Gambar 4.2	Rata-rata ketinggian Distrik di Kota Jayapura	78



MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۱۳

*“Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan”
(Q.S. Ar-Rahman : 13)*



ABSTRAK

Abidin, Muhamad Zainal, 2017, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Untuk Memenuhi Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua Dalam Kajian Maqasid Syariah* (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Port Numbay Kampung Enggros Kota Jayapura). Tesis, Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing : (I) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA (II) Dr. Siswanto, M.SI.

Kata Kunci : Pengelolaan SDA, Kebutuhan, Maqasid Syariah

Kesejahteraan perekonomian di kawasan Papua mendapatkan posisi pertama dalam kondisi penduduk miskin menurut data statistik tahun 2014, padahal kekayaan di Papua begitu luar biasa baik di darat maupun di lautnya. Kampung Enggros yang berada ditengah-tengah kota dan berada di Teluk Youtefa merupakan salah satu contoh masyarakat nelayan yang berada di tengah perkotaan tetapi belum mendapatkan kesejahteraan dalam bidang perekonomian. Sumber daya alam yang begitu melimpah khususnya di Papua tidak seimbang dengan kesejahteraan perekonomian di Papua, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan sumber daya alam laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan *Port Numbay* di kawasan Kampung Enggros Kota Jayapura. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pengelolaan sumber daya alam laut yang dilakukan oleh masyarakat asli papua (2) untuk mengetahui pengelolaan sumber daya alam laut yang dilakukan sesuai atau tidak dengan kajian maqasid syariah.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan model studi kasus dan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan : reduksi, penyajian, menarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yang dilakukan yaitu : perpanjangan keikutsertaan, pengamatan triangulasi, pengecekan sejawat, dan referensi.

Hasil penelitian menunjukkan keunikan bahwa masyarakat asli Papua khususnya masyarakat Port Numbay Kampung Enggros Kota Jayapura masih menggunakan pengelolaan secara tradisional yang ditandai dengan minimnya pengetahuan dan teknologi serta peran pemerintah sehingga dalam pengambilan manfaat sumber daya alam laut kurang maksimal. Sedangkan berkaitan dengan maqasid syariah dengan penjagaan terhadap lingkungan (*Hifdz Bi'ah*) masyarakat sangat mengamalkan penjagaan terhadap lingkungan tersebut karena masyarakat Kampung Enggros sangat menghargai alam yang dianggap bahwa alam adalah sebagai ibu yang membesarkan, dan memberikan kehidupan bagi masyarakat sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam. Dalam pengelolaan tradisional terdapat kelebihan yaitu dalam status sosial yang memiliki keakraban baik terhadap sesama serta lingkungan sekitar.

ABSTRACT

Abidin, Muhamad Zainal, 2017, Sea Natural Resource Management to Fulfill the Economic Necessity of the Local People of Papua Based on *Maqasid Al-Sharia* Review (A Case Study on Fisherman Society of Port Numbay, Kampung Enggros, Jayapura). Thesis, Master Program of Islamic Economics, Postgraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA (II) Dr. Siswanto, M.SI.

Keywords : Natural Resource Management, Necessity, Maqasid Al-Sharia

The economic prosperity in Papua is placed the first based on the poor condition of the people, as shown by the statistical data in 2014. In fact, Papua is very rich both in land and sea. Kampung Enggros, which is found in the center of the city and is located in Teluk Youtefa, is one of the examples of fishermen society in the center of the cities but it is not economically prosperous. The huge amount of natural resources in Papua and the economic prosperity are not balanced. Thus, the researcher is interested to do a research concerning the sea natural resources management conducted by the fishermen society of Port Numbay in Kampung Enggros, Jayapura. This research aims to: (1) know the sea natural resources management conducted by the local people of Papua (2) know whether the sea natural resources management is in accordance or not with the *maqasid al-sharia* review.

The research method is descriptive-qualitative using case study model and the data collection techniques are interview, observation, and documentation. The data analysis techniques are reduction, data display, and conclusion drawing. The data validation checking is done through the extension of participation, triangulation observation, peer review, and reference.

The research result shows a uniqueness indicating that the local people of Papua, particularly the society of Port Numbay in Kampung Enggros in Jayapura still apply the traditional management. It is marked by the minimum knowledge and technology as well as the role of the government causing the utilization of sea natural resource not optimum. Meanwhile, as related to *maqasid al-sharia* and the environmental conservation (Hifdz Bi'ah), the local people of Kampung Enggros do conserve the environment since they really respect nature because they consider nature as the mother who raise them up and give them life. Therefore, they have the responsibility to conserve and preserve the nature. The traditional management has a strength, namely social status that marks closeness toward fellow people and the environment surrounding them.

مستخلص البحث

محمد زين العابدين، ٢٠١٧، إدارة الموارد الطبيعية البحرية لتلبية احتياجات الشعوب المحلية بفافوا في منظور المقاصد الشرعية (دراسة حالة في مجتمع الصيادين في ميناء نمباي قرية إنغروس مدينة جايافورا). رسالة الماجستير، قسم الإقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف الأول: د. الحاج أحمد جلال الدين الماجستير. المشرف الثاني: د. سيسوانطو الماجستير.

الكلمات الرئيسية: إدارة الموارد الطبيعية، الاحتياجات، المقاصد الشرعية

كان الرفاه الاقتصادي في منطقة فافوا تنصّدر إلى المرتبة الأولى في حال فقر سكانها وفقا للبيانات الإحصائية في عام ٢٠١٤، في حين أن الثروة في فافوا كثيرة برّها أو بحرّها. تقع قرية إنغروس في وسط المدينة وفي خليج يوتيفا. هو مثال واحد من مجتمع الصيادين الذين عاشوا وسط المدينة، ولكن لم يكتسبوا الرفاهية في مجال الاقتصاد. توفر الموارد الطبيعية فيها لم يكن متماشيا مع رفاهية اقتصادها. وبالتالي، أجرى الباحث البحث عن إدارة الموارد الطبيعية البحرية التي قام بها مجتمع الصيادين في ميناء نمباي قرية إنغروس مدينة جايافورا. يهدف هذا البحث إلى: (١) معرفة إدارة الموارد الطبيعية البحرية التي قام بها الشعوب المحلية في فافوا؟، (٢) معرفة إدارة الموارد الطبيعية البحرية التي تمّ عملها توافق مع المقاصد الشرعية أم لا؟

منهج البحث المستخدم هو منهج البحث النوعي الوصفي باستخدام نموذج دراسة حالة، تمّ جمع البيانات باستخدام المقابلة والملاحظة والوثائق. وأما تقنيات تحليل البيانات فهي: التحديد، العرض، الاستنتاج منها. ثم يشمل التحقق من صحتها تمديد المشاركة، الملاحظة على التثليث، اختبار الأقران، والمراجع.

وأظهرت النتائج أن ميزة الشعوب المحلية بفافوا؛ خاصة المجتمع في ميناء نمباي قرية إنغروس مدينة جايافورا يستخدم الطريقة التقليدية في إدارة الموارد الطبيعية البحرية، وأكّدت على ذلك قلة معرفتهم وتقنياتهم ودور الحكومة عليهم بحيث عند أخذ المنافع من الموارد الطبيعية البحرية لم يكن فعالا. وأما ما يتعلق بالمقاصد الشرعية - حفظ البيئة - فكان المجتمع يمارسون الحفاظ على تلك البيئة لأن مجتمع قرية إنغروس يقدرون بيئتهم ويعتبرونها أمّا تربيتهم، وتوفير الحياة للمجتمع حتى يكون لديهم مسؤولية عن الحفاظ ورعاية البيئة الطبيعية. في الإدارة التقليدية هناك بعض المزايا؛ منها الوضع الاجتماعي الذي يمتلك علاقة وطيدة مع بعضها البعض والبيئة المحيطة عليها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan telah diakui dunia secara Internasional (UNCLOS 1982) yang selanjutnya diratifikasi oleh Indonesia dengan undang-undang No. 17 tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif.¹

Indonesia menjadi negara maritim dan merupakan Negara kepulauan dengan pulau sebanyak 17.504 pulau dan terdapat 35 Provinsi dengan penambahan 1 Provinsi yaitu Provinsi Teluk Cenderawasih dengan ibukota Provinsi yaitu Kota Serui.

Tabel 1.1

Luas Kepulauan Wilayah di Indonesia

No	Nama Pulau	Luas Wilayah
1	Sumatra	480.793,28 km ²
2	Jawa	129.438,28 km ²
3	Kalimantan	544.150,07 km ²
4	Sulawesi	188.522,36 km ²
5	Papua	416.060,32 km ²

Sumber : Data Statistik 2016

¹ Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax vol. 1-2, ISSN : 23-02-3589, 2013, hal. 1

Provinsi Papua memiliki luas wilayah yang paling luas dengan berbagai keanekaragaman sumber daya alam dengan luas wilayah 319.036,05.² Selain itu Indonesia juga terkenal dengan keberagaman suku dan budaya sehingga dari Sabang sampai Merauke terdapat bermacam-macam suku dan budayanya. Tidak cukup dengan hal tersebut Indonesia juga memiliki kekayaan alam dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia.

Dikatakan juga oleh Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam, baik di darat, di laut maupun di udara. Indonesia Juga dikatakan menganut prinsip kepulauan (archipelagic state), sehingga perairan antar pulau merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan merupakan kawasan yang bebas, sehingga total luas NKRI adalah 5.455.675,220 km² dengan perhitungan Luas Daratan 1.910.931,320 km², Luas lautan NKRI 3.544.743,900 km², luas laut teritorial 284,210,900 km², luas zona ekonomi eksklusif 2.981.211,000 km², luas laut 12 mil 279.322,000 km², jadi total luas wilayah Republik Indonesia adalah 5.455.675,220 km².³

Seharusnya dengan adanya sumber daya alam (SDA) menjadikan makmur masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut jika mampu mengelola atau mengolah sumber daya alam (SDA) tersebut. Hal itu dapat kita lihat di dalam penelitian *Badriyyah Djula*, bahwa ada hubungan antara sumber daya alam dengan pertumbuhan pada kelompok usaha nelayan Laskar Laut yang ada di Desa

² Buku Informasi Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2013, hal. 16

³ Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin, *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Jakarta, 2013, hal. 142.

Bilato Kecamatan Boliohuto Kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian ini diperoleh bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sumber daya alam dan pertumbuhan perekonomian nelayan. Pertumbuhan ekonomi pada kelompok usaha nelayan Laskar Laut sangat tinggi yaitu 98%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sumber daya alam usaha nelayan ini berjalan baik, dimana pertumbuhan ekonomi nelayan akan memberikan dampak yang lebih baik pula. Sumber daya alam yang layak merupakan aspek pendorong bagi nelayan untuk bekerja lebih giat serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, maka sumber daya alam memiliki hubungan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.⁴

Dari penelitian tersebut kita bisa melihat bahwa adanya pengelolaan yang baik dalam segi pengelolaan sumber daya alam (SDA) Pesisir yang dikelola oleh para nelayan sehingga mampu mendorong perekonomian masyarakat sekitar, hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dengan judul “*Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*” mendapatkan hasil bahwa pengelolaan sumber daya alam yang didasarkan pada paradigma mekanistik-reduksionis atau dapat dikatakan memanfaatkan sarana dan menambahkan segala sesuatu yang ada (serakah), dan bermuara pada terjadinya tragedi umum (kebisaan masyarakat). Secara fisiofis terjadinya kebiasaan tersebut disebabkan oleh pola dan cara berfikir mekanistik, sehingga manusia tercarut barut dari alam dan dari sesama manusia. Dengan menggunakan logika dominasi, manusia lebih diutamakan dan dianggap bernilai pada dirinya sendiri, sementara

⁴ Badriyyah Djula, *Penelitian Sumber Dya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo, 2009. Hal. 8

alam hanya dilihat sebagai objek dan alat bagi kepentingan manusia untuk dieksploitasi dan penguasaan alam. Sedangkan yang terjadi pada lokasi penelitian yaitu pada komunitas adat-lokal Pakpak di Dairi Sumatera Utara didasarkan atas kearifan tradisional, dengan karakteristik : pengetahuannya merupakan milik bersama komunitas, dikelola secara holistik, moralis, praksis dan ekologis. Pengelolaan sumber daya berdasarkan kearifan tradisional mampu menjamin keberlanjutan ekologi dan pembangunan berkelanjutan.⁵

Ternyata tidak hanya di Indonesia yang menggunakan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Dalam kasus ini peneliti mendapatkan penelitian yang dilakukan di wilayah Pulau Pasifik, penelitian ini dilakukan oleh *Shankar asnawi* yang mengatakan bahwa “*The study of human-environmental interactions from a socio-ecological perspective allows us to discern people’s understanding of their immediate environment, differential forms of local resource governance and use (e.g., sea tenure and foraging strategies), and existing conflicts between various stakeholders, among other social and ecological factors*”⁶

Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa studi tentang interaksi manusia dengan alam memungkinkan kita untuk mengetahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai potensi alam tersebut, selanjutnya dikatakan persoalan ataupun konflik sebenarnya berawal dari kepentingan, baik kepentingan dari

⁵ Hidayat, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, Vol. XV, No. 1, 2011. Hal. 28

⁶ Shankar Aswani, *Socioecological Approaches for Combining Ecosystem-Based and Customary Management in Oceania*, Journal of Marine Biology, Doi : 10.115/2011/845385, Department of Anthropology and IGP Marine Science, University of California, Santa Barbara, CA 93106-3210, USA, 2011, hal. 1

posisi pemerintah maupun dari pihak lainnya yang memiliki kepentingan faktor sosial dan ekologi.

Tidak hanya itu, penelitian diatas mengemukakan bahwa pendekatan pengelolaan zona pantai dan perikanan di seluruh dunia menggunakan manajemen berbasis ekosistem atau disingkat dengan EBM (*Ecosystem – Based Management*) yang bertujuan untuk melindungi ekosistem melalui kearifan lokal yang mempunyai struktur tertentu, fungsi dan proses untuk mempertahankan dan mengembangkan sumber daya yang ada, tetapi juga dikatakan hal ini tidak pernah berhasil diterapkan jika ada persaingan dengan pemegang kekuasaan (pemilik kepentingan), hal lainnya yang terjadi adalah banyak permasalahan yang kompleks dengan pengelolaan berbasis kearifan lokal dikarenakan tidak adanya hukum tertulis, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti.⁷

Dari kasus penelitian di atas inti dari persoalan adalah mengenai pengelolaan, jika pengelolaan tersebut baik maka akan mendapatkan hasil yang baik, tetapi jika pengelolaan itu tidak baik maka dampak yang terjadi akan tidak baik pula, hal tersebut dikatakan juga oleh peneliti *Rahmad Budi Suharto, dkk* yang meneliti tentang dampak penambangan batu bara tanpa adanya pemeliharaan lingkungan menurutnya dalam pengelolaan sumber daya alam memiliki persoalan yang sama yaitu jika sumber daya alam yang dikelola dengan baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula, tetapi jika pengelolaan sumber daya alam tersebut tanpa terkendali bukan kebaikan yang didapatkan melainkan hal negatif atau dampak dari pengelolaan sumber daya alam berakibat negatif kepada alam

⁷ Shankar Aswani, *Socioecological Approaches for Combining Ecosystem-Based and Customary Management in Oceania*, *Journal of Marine Biology*, hal. 2

maupun kepada masyarakat sekitar. Dari penelitian yang dilakukan, *Budi Suharto, dkk* mendapatkan hasil bahwa dengan adanya temuan sumber daya alam tidak serta merta mendapatkan perubahan yang positif, kembali lagi pada pengelola sumber daya alam tersebut. Dalam penelitiannya Budi menyatakan bahwa penduduk lokal merasakan lebih banyak perubahan negatif dari pada perubahan positif setelah kegiatan tambang batu bara beroperasi. Perubahan negatif ini akibat menurunnya kondisi saat ini dibandingkan sebelum adanya tambang baru bara. Selanjutnya yaitu ada sebagian masyarakat yang mengakui ada dampak positif dari kegiatan pertambangan batu di wilayah tersebut, seperti mata pencaharian dan penghasilan, namun sifatnya adalah efek tidak langsung dibandingkan efek langsung. Efek ini juga bersifat temporer dimana ketika pertambangan batu bara selesai masa operasinya, maka efek pada penghasilan dan mata pencaharian juga akan terhenti. Kesimpulan pada penelitian tersebut yaitu eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang baik maka akan berdampak buruk dan luas bagi masyarakat meskipun bukan jangka pendek yang dirasakan tetapi di masa yang akan datang baru dapat dirasakan.⁸

Dengan adanya persoalan tersebut sehingga pemerintah menggunakan haknya dengan cara membuat peraturan berupa perundang-undangan yang harus dijalankan atau dipatuhi oleh semua pihak baik dari individu, masyarakat, badan usaha, kelompok dan lain sebagainya.

Hal tersebut tercermin didalam undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan

⁸ Rahmad Budi Suharto, *Sumber Daya Aam Untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal : Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara Di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur Indonesia*, Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 11, Universitas Mulawarman, 2015, hal. 136

daerah khusus provinsi Papua Nomor 22 tahun 2008 tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam masyarakat hukum adat Papua.

Di Papua sendiri ada pandangan masyarakat asli papua yang menyatakan bahwa alam adalah “ibu” yang melahirkan, memberi makan, memelihara, mendidik dan mebesarkan mereka sampai sekarang. Orang *Amungme* berkata “Te Aro Neweak Lako” yang berarti “alam adalah aku”. Mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam sekitarnya.⁹

Selanjutnya yaitu mengenai pandangan Islam dari fatwa MUI dikatakan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi beserta isinya.¹⁰

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikan : “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?” Tuhan berfirman “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.*¹¹

Khalifah bukan hanya bermakna pemimpin melainkan juga dapat diartikan sebagai pengelola, pemegang amanah untuk mengelola sumber daya yang ada dimuka bumi ini dengan arif dan bijaksana. Inilah makna pemakmuran atau pembangunan lingkungan hidup sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran Surat Hud : 61, yang artinya :

“... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya” (Q.S. Hud : 61)

⁹ Enos H. Rumansara, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal*, hal. 9

¹⁰ Fatwa MUI, Nomor 22 Tahun 2011 *Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan*, Hal. 2

¹¹ Qur'an Surat Al-Baqarah : 30

Jika dikaji lebih dalam Islam sudah memiliki konsep-konsep dasar yang intinya yaitu untuk kemaslahatan atau kesejahteraan manusia itu sendiri, tergantung pada manusianya sendiri mahu berbuat baik atau buruk, jika berbuat baik konsekuensinya akan berdampak kebaikan bagi dirinya sendiri dan lingkungan begitu sebaliknya jika berbuat kerusakan maka akan berdampak keburukan bagi dirinya sendiri dan lingkungan.

Dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam tujuan utama adalah menuju masyarakat yang sejahtera yang membedakan antara keduanya adalah mengenai bagaimana cara mendapatkan dan mengeluarkannya, jika syariat islam menekankan kepada kebaikan dan agar harta tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu saja sehingga dengan adanya pemerataan tersebut mengakibatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan yang ada. Dalam kaitannya dengan sumber daya alam Islam menempatkan pada kesadaran manusia dititik beratkan posisinya sebagai khalifah, akan menyebabkan manusia merasa paling berhak untuk menguasai dan mengeksploitasi alam dalam rangka memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Tetapi manusia bertindak melebihi batas kebutuhan dikarenakan keserakahan manusia itu sendiri.

Melalui pendekatan agama yang diharapkan mampu untuk mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan lingkungan (alam). Dalam konteks tersebut Islam memberikan panduan yang luas pada keseimbangan hidup sebagai manifestasi rahmatan lil'alam (rahmat bagi seluruh alam) sebagai mana firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

“Kami tidak mengutusmu, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam”

Dengan demikian Islam membawa ajaran yang mengandung sistem nilai yang mampu menjawab tantangan zaman, sehingga dalam konteks inilah menurut Maulana Ismail bahwa Islam sebagai pengembang kesadaran lingkungan mempunyai pijakan yang amat kuat dalam pelestarian lingkungan.¹²

Di dalam ajaran agama Islam tujuan hidup ini berujung pada Ibadah, apapun yang dilakukan dengan niat karena Allah semata dapat dikategorikan beribadah. Sehingga tidak heran jika dalam penciptaan alam ini Allah memperkenalkan eksistensi-Nya kepada makhluknya, agar mereka percaya, beriman dan mengikuti sunnah-sunnah yang telah ditetapkan-Nya, dengan cara yang sangat logis dan dapat diterima oleh semua manusia yang berakal dengan memperhatikan proses dan fenomena semua apa yang terjadi di alam semesta ini.

Dalam berinteraksi dengan alam serta lingkungan hidup, manusia mengemban amanah yaitu : pertama, *Al-intifa'* yaitu Allah SWT mempersilahkan manusia untuk mengambil manfaat apa yang ada di bumi ini termasuk sumber daya alam yang melimpah ruah dan mendayagunakan hasil alam tersebut dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahan bersama. Kedua, *Al-I'tibar* yaitu manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah SWT serta dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam yang terjadi. Ketiga *Al-Islah* yaitu manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara

¹² Fachruddin M Mangunjaya, *Islam and Natural Resource Management*, Durrell Institute of Conservation and Ecology (DICE), University of Kent, Canterbury, Kent CT27NZ, United Kingdom, 2013.

kelestarian alam/lingkungan itu sendiri, bukan malah sebagai pengrusak atau penghancur.¹³

Dalam hukum positif yang kita kenal dengan Undang-undang, Indonesia juga memiliki aturan tentang pengelolaan wilayah pesisir. Hal tersebut termuat didalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.¹⁴

Selanjutnya dikatakan di dalam Bab V di dalam pasal tersebut di atas yaitu tentang pemanfaatan, dikatakan bahwa pemanfaatan perairan pesisir dapat dimanfaatkan dari permukaan dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut kepada perseorangan warga Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau masyarakat adat.¹⁵

Ada lima pulau besar di Indonesia salah satunya adalah Papua, yang merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang ada di darat maupun yang ada di laut. Hal tersebut tercermin dari data yang

¹³ Sugeng Riyadi, *Jurnal Reivnting Bank Sampah : Optimalisasi Nilai Ekonomis Limbah Berbasis Pengelolaan Komunal Terintegrasi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2016, hal. 211

¹⁴ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hal. 1

¹⁵ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bab V tentang Pemanfaatan, hal. 8

dikeluarkan oleh menteri kehutanan yang mengatakan bahwa Papua sangat kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam.

Tabel 1.2
Potensi Kekayaan Sumber Daya Alam Provinsi Papua

No	Potensi	Jumlah (\pm)
1	Emas/Tembaga	2,5 Milyar ton
2	Batu bara	6,3 Juta ton
3	Pasir Kuarsa	21, 5 Juta ton
4	Marmer	350 Juta ton
5	Tambang Lainnya	125 Juta ton

Sumber : Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Pertambangan dan Energi, 2013

Dari tabel diatas dapat diperinci pada sektor pertambangan mampu memberikan kontribusi 50% perekonomian Papua, dengan tembaga, emas, minyak dan gas menempati posisi dapat memberikan kontribusi perekonomian tersebut. Provinsi ini memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport. Disamping itu, masih terhadap beberapa potensi tambang lain seperti batu bara berjumlah 6,3 juta ton, batu gamping di atas areal seluas 190.000 ha, pasir kuarsa seluas 75 ha dengan potensi hasil 21,5 juta ton, lempung sebanyak 1,2 juta ton, marmer sebanyak 350 juta ton, granit sebanyak 125 juta ton dan hasil tambang lainnya seperti pasir, besi, nikel dan krom.¹⁶ Belum lagi dari sektor flora dan fauna yang ada di wilayah Papua. Menurut kementerian kehutanan Republik Indoneisa wilayah hutan Provinsi Papua memilik luas kurang lebih 42.224.840 hektar.¹⁷

¹⁶ Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Pertambangan dan Energi, 2013

¹⁷ Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.782/Menhut-II/2012, *Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I.*

Begitu juga potensi sumber daya laut mengenai tangkap ikan, wilayah Papua tercatat menjadi 5 besar tangkap ikan di Indonesia menurut data statistik dalam angka.

Tabel 1.3
Potensi Sumber Daya Laut Tangkap Ikan

No	Provinsi	Jumlah Ikan Tangkap dalam Ton		
		2012	2013	2014
1	Sumatera Utara	563134	555311	572149
2	Maluku	537271	551845	538121
3	Jawa Timur	381805	386895	399371
4	Sulawesi Selatan	259883	292241	302193
5	Papua	289271	286339	300267

Sumber : Badan Pusat Statistik 2014

Ditambah lagi dengan sumber daya laut Papua mempunyai wilayah konservasi taman nasional laut terbesar di seluruh Indonesia dengan luas wilayah konservasi seluas 1.453.500 ha.

Tabel 1.4
Wilayah Konservasi Taman Nasional Laut

No	Provinsi	Luas (Ha)
1	DKI Jakarta	107.489
2	Jawa Tengah	110.117
3	Sulawesi Utara	89.065
4	Sulawesi Selatan	530.765
5	Sulawesi Tenggara	1.390.000
6	Papua	1.453.500
Total		4.043.541

Sumber : Ditjen PRL 2015

Disamping itu terdapat potensi kekayaan alam laut lainnya yang dapat menopang dalam perekonomian masyarakat yang ada disekitar kawasan pesisir kota Jayapura diantaranya :¹⁸

¹⁸ Menase Robert Kambu, *Jayapura Kota di Ujung Timur*, Pemerintah Kota Jayapura/Indomedia, 2008, hal. 110

1. Aktivitas Turisme Laut (Wisata Bahari)

Tidak dapat dipungkiri, wisata bahari berperan besar terhadap PDRB suatu daerah. Cakupan wisata bahari sangatlah luas, mulai dari objek turisme pantai, memancing, menyelam, berselancar, hingga pembangunan fasilitas restoran dan hotel berbintang. Padahal Kota Jayapura banyak dikelilingi oleh pantai yang sangat indah diantaranya : Pantai Hamadi, Pantai Holtekam, Pantai Dok II dan Pantai Base-G. tetapi pada kenyataannya Pemerintah Kota Jayapura belum memanfaatkan potensi laut yang bersifat wisata bahari ini.

2. Aquakultur

Pemanfaatan berbagai jenis ikan dan sea food seharusnya dapat dioptimalkan sebagai bahan makanan yang bernilai gizi sangat tinggi dan daya jual yang tinggi, tetapi hal ini kurang dimanfaatkan oleh para nelayan karena kurangnya sosialisasi dan respon dari pemerintah kota Jayapura.

3. Pengangguran

Kota Jayapura merupakan sentral perputaran roda perekonomian di wilayah Papua, karena Kota Jayapura merupakan Ibu Kota Provinsi Papua yang memegang peranan penting dalam sector industri dan perdagangan. Transportasi lautpun dianggap lebih efisien dan murah dibandingkan dengan transportasi udara, sehingga dalam hal ini transportasi laut diharapkan mampu menopang dalam hal retribusi kepada wilayah Provinsi Papua.

4. Pertahanan dan keamanan

Dalam kasus ini wilayah perairan lautpun dapat digunakan sebagai pertahanan dan keamanan dikarenakan wilayah kedaulatan NKRI sebagian besar meliputi wilayah perairan, dengan adanya pertahanan dan keamanan wilayah laut ini sehingga Republik Indonesia juga membangun pangkalan Utama TNI AL-V meliputi Papua dan Maluku yang berpusat di Kota Jayapura.

Selain itu masih terdapat potensi laut di wilayah Papua yang belum tersentuh diantaranya yaitu : Industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, , energy kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan dan industry maritim. Hal itu senada dengan adanya pengembangan Tol Laut di wilayah Jayapura.¹⁹

Dari segi Perekonomian Papua triwulan III-2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 48,20 triliun, Perekonomian papua juga melonjak naik karena mampu tumbuh mencapai 20,65 %, bergerak jauh lebih cepat dibanding triwulan III-2015 (2,54%). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan yang naik 42,25 persen dan terendah oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh minus 0,18%. Dari triwulan II-2016 mengalami lonjakan dengan tumbuh sebesar 21,42%. Pertumbuhan yang cukup tinggi dikarenakan adanya pertumbuhan pertambangan dan penggalan sebesar 53,22%. PDRB per kapita papua triwulan III-2016

¹⁹ Seri Analisis Pengembangan Wilayah Provinsi Papua, 2015, hal 21

mencapai Rp. 14,96 Juta, meningkat dari triwulan II-2016 yang sebesar Rp. 12,87 juta naik 16,25%.²⁰

Tetapi dalam kenyataan yang terjadi dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada garis kemiskinan yang ada di Papua. Hal tersebut tecermin pada data berikut :

Tabel 1.5
Persentase Penduduk Miskin 2014 Data Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua

No	Provinsi	Tingkat Kemiskinan Dalam Persent (%)
1	Papua	27,80
2	Papua Barat	26,26
3	Nusa Tenggara Timur	19,60
4	Maluku	18,4
5	Gorontalo	17,41
6	Bengkulu	17,09
7	Nusa Tenggara Barat	17,05
8	Aceh	16,98
9	DI Yogyakarta	14,55

Sumber : BPS Provinsi Papua 2014

Pengelolaan sumber daya alam yang baik melalui perencanaan pengelolaan merupakan upaya untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan memanfaatkannya secara maksimal dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar yang mengandalkan perekonomiannya dari sumber daya alam.

Mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya alam terdapat juga didalam penelitian yang dilakukan oleh *Etty Riani* yang mengatakan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan teripang adalah dengan cara memperhatikan aspek pengelolaan dengan cara melihat aspek reproduksinya,

²⁰ BPS Provinsi Papua 2016, Tentang Pertumbuhan Ekonomi Papua Triwulan III-2016

seperti pengelolaan berdasarkan pengaturan waktu penangkapan teripang dan ukuran teripang yang boleh ditangkap.²¹

Hal tersebut memperkuat bahwasanya pengelolaan sumber daya alam butuh perencanaan yang matang agar sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dikelola dapat dilestarikan tanpa membuat kerusakan sumber daya alam tersebut.

Persoalan yang ada adalah Papua memiliki potensi yang begitu melimpah, baik sumber daya di darat maupun di wilayah laut, pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh mengalami peningkatan, tetapi disisi lain Papua masih terpuruk dari angka kemiskinan berada di nomor satu dari pada wilayah-wilayah lainnya.

Dari penelitian-penelitian diatas telah dikemukakan bahwa dengan adanya pengelolaan yang baik berupa perencanaan, pengorganisasian, memiliki kontrol, serta pemimpin atau orang yang dapat dijadikan panutan akan mendapatkan hasil yang baik pula.

Dari latar belakang diatas peneliti akan melakukan penelitian di wilayah Kota Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi Papua, selanjutnya peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT ASLI PAPUA DALAM KAJIAN MAQASID SYARIAH”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat asli Papua Kota Jayapura ?

²¹ Etty, Riani, *Pengelolaan Sumberdaya Teripang Pasir berdasarkan biologi reproduksinya dalam rangka mendukung perikanan berkelanjutan*, JPSL. Vol. 1 tahun 2011, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor, 2011, hal. 2

2. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut yang dilakukan masyarakat asli Papua Kota Jayapura dalam perspektif kajian *maqasid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan sumber daya alam laut masyarakat asli Papua dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut yang dilakukan masyarakat asli Papua dalam kajian Maqasid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat sejalan dengan tujuan penelitian diatas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis, praktis, dan masyarakat pada umumnya.

1. Manfaat Akademis

- Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara Ilmiah, tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Asli Papua untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dalam kajian Ekonomi Islam.
- Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan referensi bagi penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah dan berguna bagi Masyarakat maupun Pemerintah terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Asli Papua.

- Melalui ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap Pemegang Kekuasaan baik dari pemerintah maupun Tokoh masyarakat untuk membangun Papua dari ketimpangan perekonomian yang dasarnya memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam tinjauan pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun Tesis ini sehingga lebih memadai. Selain itu, telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Shankar Aswani dalam penelitiannya yang berjudul *Socioecological Approaches for Combining Ecosystem-Based and Customary Management in Oceania*, *Journal of Marine Biology*, , *Department of Anthropology and IGP Marine Science* menerangkan bahwa Untuk melindungi ekosistem yang ada yaitu berupa sumber daya alam, maka hal yang baik yaitu dengan cara menerapkan EBM (*Ecosystem – Based Management*) yang bertujuan untuk melindungi ekosistem melalui kearifan lokal yang mempunyai struktur tertentu, fungsi dan proses untuk mempertahankan dan mengembangkan sumber daya yang ada. Hal

tersebut mampu dikembangkan dan berhasil diwilayah Solomon barat dengan bertambahnya wilayah konservasi dengan luas 6000 ha.²²

Selanjutnya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh *Irmadi Nahib* yang berjudul *Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (studi kasus : Tambang Minyak Blok Cepu)* mendapatkan hasil bahwa Akibat adanya Pengelolaan SDA yang tidak diimbangi dengan perbaikan atas dampak lingkungan maka akan terjadi kerusakan dan penurunan kesejahteraan masyarakat akibat adanya eksternalitas yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya oleh perusahaan, maka masyarakat sekitar harus diberi ganti rugi (kompensasi) agar kesejahteraan meningkat.²³

Welem Waileruni dengan karyanya yang berjudul *Kemerosotan Sumberdaya Perikanan dan Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak sebagai tantangan pengembangan Pulau-pulau Kecil (Studi Kasus di Provinsi Maluku)* dalam penelitian tersebut mendapatkan sebuah hasil yaitu kekayaan sumberdaya perikanan yang dimiliki Provinsi Maluku tidak diandalkan sebagai sumber pendapatan utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah jika tidak dilakukan pengelolaan yang benar. Hal ini diakibatkan oleh merosotnya kandungan sumber daya perikanan, ditunjang dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak.²⁴

²² Shankar Aswani, *Socioecological Approaches for Combining Ecosystem-Based and Customary Management in Oceania*, *Journal of Marine Biology*, Department of Anthropology and IGP Marine Science Doi : 10.115/2011/845385 University of California, Santa Barbara, CA 93106-3210, USA, 2011

²³ Irmadi Nahib, *Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (studi kasus : Tambang Minyak Blok Cepu)* Vol. 12 Tahun 2006

²⁴ Welem Waileruni, *Kemerosotan Sumberdaya Perikanan dan Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak sebagai tantangan pengembangan Pulau-pulau Kecil (Studi Kasus di Provinsi Maluku)* ISBN : 978-602-98439-2-7, 2011

Hidayat dalam Jurnal yang berjudul *Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Kelembagaan Lokal* dalam pandangannya berpendapat bahwa Pengelolaan sumberdaya alam yang didasarkan pada paradigma ekanistisreduksionis bermuara pada terjadinya *tragedi of common*. Secara filofis terjadinya *tragedy of common* disebabkan oleh pola dan cara berfikir mekanistis, sehingga manusia tercerabut dari alam dan dari sesama manusianya. Berbeda dengan paradigma mekanistik reduksionis, maka paradigma ekologis memandang manusia tidak terpisah dari dan berada di atas alam, tetapi sebagai bagian integral dan menyatu dengan alam. Dalam hubungannya dengan sumberdaya alam, pendekatan ekologi lebih multidimensi, tidak hanya memperhitungkan aspek dan manfaat ekonomi, tetapi juga berbagai aspek dan dimensi selain manfaat ekonomi.²⁵

Selanjutnya penelitian lain yang diangkat oleh Bernadus Wibowo Sullantoro yang berjudul *Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari* mendapatkan hasil bahwa Ekofeminisme mengembangkan konsep etika kepedulian secara holistik, integratif, nonreduksionis dan partisipatif. Perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan ekologis dapat terwujud apabila masyarakat meninggalkan pola piker dan perilaku patriarkhi dan menghidupkan nilai – nilai feminimitas. Hutan akan lestari apabila semua manusia berhati ibu. Hutan akan lestari apabila manusia mengembangkan prinsip etis : bertanggung jawab terhadap keutuhan biosfer,

²⁵ Hidayat, *Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Kelembagaan Lokal*, Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol. XV, No.1 tahun 2011

solidaritas kosmis, menjaga keselarasan dengan alam, menjalin relasi setara, kepedulian dan kesederhanaan.²⁶

Rahmad Budi Suharto, dkk dalam Jurnal yang berjudul *Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal (Studi Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara Di Empat KEcamatan Area Kalimantan Timur)* mendapatkan hasil bahwa pada kasus temuan penelitian ini, bahwa perdebatan terhadap efek negatif dari imbasan sumber daya alam terhadap kesejahteraan penduduk lokal, terbukti adanya.

Bagi penduduk lokal yang permukimannya terdampak langsung operasi tambang, sangat sedikit perubahan positif yang mereka rasakan kurang perhatian dari perusahaan pertambangan dalam meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, serta sangat banyak implikasi penurunan kualitas kesejahteraan (dilihat dari dimensi ekonomi, Kesehatan, sosial dan infrastruktur) yang mereka alami.

Orisinalitas ini juga dapat digunakan sebagai acuan serta membuktikan bahwa dalam penyusunan penelitian ini tidak melakukan plagiat karena terdapat sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang pengelolaan sumber daya alam. Berikut ini adalah penelitian mengenai pengelolaan sumber daya alam :

²⁶ Rahmad Budi Suharto, dkk, *Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal (Studi Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara Di Empat KEcamatan Area Kalimantan Timur)* Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 11, No. 2 Tahun 2015

Tabel 1.6
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Shankar Aswani Doi : 10.115/2011/845385 University of California, Santa Barbara, CA 93106- 3210, USA, 2011	Socioecological Approaches for Combining Ecosystem-Based and Customary Management in Oceania, Journal of Marine Biology, , Department of Anthropology and IGP Marine Science	Untuk melindungi ekosistem yang ada yaitu berupa sumber daya alam, maka hal yang baik yaitu dengan cara menerapkan EBM (<i>Ecosystem – Based Management</i>) yang bertujuan untuk melindungi ekosistem melalui kearifan lokal yang mempunyai struktur tertentu, fungsi dan proses untuk mempertahankan dan mengembangkan sumber daya yang ada. Hal tersebut mampu dikembangkan dan berhasil di wilayah Solomon barat dengan bertambahnya wilayah
2	Irmadi Nahib Vol. 12 Tahun 2006	Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (studi kasus : Tambang Minyak Blok Cepu)	Akibat adanya Pengelolaan SDA yang tidak diimbangi dengan perbaikan atas dampak lingkungan maka akan terjadi kerusakan dan penurunan kesejahteraan masyarakat akibat adanya eksternalitas yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya oleh perusahaan, maka masyarakat sekitar harus diberi ganti rugi (kompensasi) agar kesejahteraan meningkat.
3	Welem Waileruni ISBN : 978-602- 98439-2-7 Tahun 2011	Kemerosotan Sumberdaya Perikanan dan Kebijakan Pemerintah yang	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kekayaan sumberdaya perikanan yang dimiliki Provinsi Maluku tidak

		tidak berpihak sebagai tantangan pengembangan Pulau-pulau Kecil (Studi Kasus di Provinsi Maluku)	diandalkan sebagai sumber pendapatan utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah jika tidak dilakukan pengelolaan yang benar. Hal ini diakibatkan oleh merosotnya kandungan sumber daya perikanan, ditunjang dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak.
4	Hidayat Jurnal Sejarah Citra Lekha VOL. XV, No.1 tahun 2011	Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Kelembagaan Lokal	Pengelolaan sumberdaya alam yang didasarkan pada paradigma ekanistisreduksionis bermuara pada terjadinya <i>tragedi of common</i> . Secara filofis terjadinya <i>tragedy of common</i> disebabkan oleh pola dan cara berfikir mekanistis, sehingga manusia tercerabut dari alam dan dari sesama manusianya. Berbeda dengan paradigma mekanistik reduksionis, maka paradigma ekologis memandang manusia tidak terpisah dari dan berada di atas alam, tetapi sebagai bagian integral dan menyatu dengan alam. Dalam hubungannya dengan sumberdaya alam, pendekatan ekologi lebih multidimensi, tidak hanya memperhitungkan aspek dan manfaat ekonomi, tetapi juga berbagai aspek dan dimensi selain manfaat ekonomi.
5	Bernadus Wibowo Sullantoro Jurnal Bumi Lestari, Vol. 11, No, 1 tahun	Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme	Hasil Penelitian Ekofeminisme mengembangkan konsep etika kepedulian secara

	2011	Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari	holistik, integratif, nonreduksionis dan partisipatif. Perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan ekologis dapat terwujud apabila masyarakat meninggalkan pola pikir dan perilaku patriarkhi dan menghidupkan nilai – nilai femininitas. Hutan akan lestari apabila semua manusia berhati ibu. Hutan akan lestari apabila manusia mengembangkan prinsip etis : bertanggung jawab terhadap keutuhan biosfer, solidaritas kosmis, menjaga keselarasan dengan alam, menjalin relasi setara, kepedulian dan kesederhanaan.
6	Yusviati Tesis Tahun 2010	Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir (Studi Kaus Kabupaten Pesisir Selatan)	Hasil penelitian indicator keberhasilan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir 12 indikator yaitu volume dan nilai produksi ; kontribusi perikanan terhadap PDRB ; volume dan nilai ekspor ; nilai investasi ; penyerapan tenaga kerja perikanan ; rasio murid tamat SD ; angka kematian bayi ; angka harapan hidup ; proporsi air bersih perpipaan ; proporsi kawasan lindung, perubahan areal kualitas habitat penting. Pada Kabupaten Pesisir Selatan denga status 3 berstatus baik, 8 berstatus kurang/tidak baik dan 1 berstatus stagnan.

7	Rahmad Budi Suharto, dkk Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 11, No. 2 Tahun 2015	Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal (Studi Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara Di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur)	Hasil kajian menyimpulkan, pada kasus temuan penelitian ini, bahwa perdebatan terhadap efek negatif dari imbasan sumber daya alam terhadap kesejahteraan penduduk lokal, terbukti adanya. Bagi penduduk lokal yang permukimannya terdampak langsung operasi tambang, sangat sedikit perubahan positif yang mereka rasakan kurang perhatian dari perusahaan pertambangan dalam meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, serta sangat banyak implikasi penurunan kualitas kesejahteraan (dilihat dari dimensi ekonomi. Kesehatan, sosial dan infrastruktur) yang mereka alami.
---	--	---	--

Sumber: data diolah

F. Definisi Istilah

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kata Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadministrasian dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Hal tersebut sesuai dengan kamus ilmiah populer yang mengartikan pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”. Karena terbawa oleh derasnya arus penambahan kata kedalam bahasa Indonesia, maka istilah inggris tersebut kemudian di indonesiakan menjadi “*manajemen*”. Arti dari manajemen adalah pengelolaan, penyelenggaraan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.²⁷

Sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁸

Jadi pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam upaya untuk mengambil manfaat dari alam untuk kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Kebutuhan

Menurut *Murray* kebutuhan adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisasi berbagai proses seperti persepsi, berfikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Kebutuhan bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Bisaanya kebutuhan dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus,

²⁷ Pius A. Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hal. 434

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Lingkungan Hidup*, 2009, hal. 1

dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai pemecahannya.²⁹

Jadi kebutuhan adalah perspektif yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal untuk merubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan, bisaanya dibarengi dengan perasaan dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikan dalam memecahkan permasalahan yang ada.

3. Maqasid Syariah

Secara etimologi Maqasid Al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syari'ah artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan jalan menuju kearah sumber kehidupan.

Berikut ini adalah pendapat maqasid menurut para ulama diantaranya :³⁰

- Imam Alghazali mengatakan bahwa Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, memahami faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.
- As-syatibi mengatakan bahwa maqasid terbagi menjadi dua yaitu berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah dan berkaitan dengan maksud mukallaf.
- Alal al-fasi mengungkapkan bahwa maqasid syari'ah merupakan tujuan pokok syari'ah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan.

²⁹ Alwisol, *Pikologi Kepribadian*, UMM Pres, Malang, 2007, Hal. 218

³⁰ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 41

- Abdul Wahab Khallaf juga mengatakan tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah maksud Allah selaku pembuat Syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritik

1. Teori Kepemilikan

Berkaitan dengan kondisi sumber daya pesisir dan laut yang bersifat *Common property* (milik bersama) dengan akses yang bersifat *quasi open acces*. Istilah *common property* ini lebih mengarah pada kepemilikan yang berada di bawah kontrol pemerintahan atau lebih mengarah pada sifat sumberdaya yang merupakan *Public domain*.

Dalam konteks kerangka kerja neoklasik, Tienenberg menyarankan bahwa struktur yang efisien dari hak kepemilikan dapat memproduksi alokasi sumber daya yang efisien pula. Kemudian Tienberg juga mengidentifikasi empat karakteristik dari hak kepemilikan yang penting :³¹

- Universalitas (*universality*) : seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah (entitlement) dispesifikasi secara lengkap.
- Eksklusivitas (*exclusivity*) : seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik dan hanya kepada pemilik baik secara langsung (*directly*) maupun tidak langsung (*indirectly*) melalui penjualan atau lainnya.

³¹ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan (paradigm, teori dan kebijakan)*, Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 121

- Transferabilitas (*transferability*) : seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan (ditransfer) dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela.
- Enforsibilitas (*enforceability*) : hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik keterpaksaan (*involuntary seizure*) atau pelanggaran dari pihak lain.

Dari pengertian di atas sehingga dapat diperjelas dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tipe Kepemilikan

Tipe	Pemilik	Hak Pemilik	Kewajiban Pemilik
Kepemilikan privat	Individu	Pemanfaatan yang bisa diterima secara sosial ; kontrol akses	Mencegah penggunaan yang tidak bisa diterima secara social
Kepemilikan bersama	Kolektif	Pengecualian terhadap non-pemilik	Merawat ; mengatur tingkat pemanfaatan
Kepemilikan Negara	Warga Negara	Menentukan aturan	Menjaga tujuan-tujuan sosial
Akses terbuka (tanpa kepemilikan)	Tidak ada	Memanfaatkan	Tidak ada

Sumber : Ahmad Erani Yustika (2013)

Selanjutnya menurut Coase dalam pandangannya mengatakan bahwa jika hak kepemilikan kepemilikan telah diatur dengan baik, maka sejatinya intervensi pemerintah (dalam wujud apapun) tidak dibutuhkan lagi, sebab jika setiap hak kepemilikan telah jelas siapa yang mempunyainya, maka hasil kegiatan ekonomi akan efisien dengan sendirinya. Seterusnya, aspek distribusi dari hasil kegiatan

ekonomi tersebut akan ditentukan oleh alokasi awal dari hak kepemilikan tersebut.³²

Tetapi jika tidak ada intervensi pemerintah maka tindakan salah satu pihak yang merugikan pihak lain tidak dapat terkoreksi oleh pasar. Hal ini menimbulkan ketidak efisienan ekonomi karena semua pihak akan berusaha mengeksploitasi sumber daya sebesar-besarnya. Pihak-pihak yang lebih kuat dan mampu mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan sehingga akan terjadi hukum rimba siapa yang kuat, dia yang akan menang.

Dari kacamata realisasi antara hak kepemilikan dan kerusakan lingkungan, tanpa hak milik atas sumber daya alam yang ditegakkan, kepentingan yang berasal dari luar akan mengambil keuntungan dari akses yang terbuka dan tanpa rasa tanggung jawab. Tetapi, bila kelompok komunal tertentu diberi hak milik terhadap sumber daya alam, maka kelompok tersebut akan mengembangkan mekanisme untuk membatasi akses dari luar, mendistribusikan tanggung jawab pengelolaan, mengalokasikan hak-hak penggunaan diantara kelompok, dan mematuhi pelaksanaan/pemenuhan.³³

Dalam hal ini hal yang paling penting adalah adanya kejelasan/kepastian atas hak kepemilikan sehingga setiap pengelola/pemiliknya mempunyai insentif untuk emmakai dan melindungi hak kepemilikannya.. Model-model hak kepemilikan tersebut bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga sesungguhnya tidak dapat disimpulkan mana yang lebih baik diantara bentuk-

³² Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan (Paradigm, Teori Dan Kebijakan)*, Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 126

³³ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan (paradigm, teori dan kebijakan)*, hal.

bentuk hak kepemilikan tersebut. lebih relevan dari itu, jika pemiliknya diketahui dengan jelas, apapun tipe dari hak kepemilikan tersebut, maka tidak hanya menawarkan para pemiliknya untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi hak milik, tetapi juga melestarikan dan melindunginya sehingga tetap terjaga bagi kepentingan jangka panjang. Inilah yang menjadi kunci efisiensi ekonomi (khususnya untuk kasus sumber daya alam), yakni adanya kepastian hak kepemilikan yang dijamin melalui produk dan penegakan hukum.³⁴

Islam juga memandang dengan adanya kepemilikan umum tersebut tanpa diperbolehkan untuk dimiliki oleh kepentingan pribadi karena kepemilikan umum berkaitan dengan pemanfaatan bagi seluruh warga. Hal tersebut dikatakan oleh Muhmud bin Ibrahim Al-Khatib dalam *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy* mengatakan bahwa kepemilikan umum adalah kepemilikan yang berada di bawah kekuasaan Negara dimana manfaatnya digunakan bagi kepentingan warga Negara.³⁵

Dalam kaitannya dengan sumber daya alam, didalam Al-qur'an telah disebutkan yaitu dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 29 :

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu di jadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha Mengetahu segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah : 29)

Dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan bahwa makna (Dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi) menciptakan bumi beserta isinya, (kesemuanya) agar kamu memperoleh manfaat dan mengambil

³⁴ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan (paradigm, teori dan kebijakan)*, Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 134

³⁵ Mahmud bin Ibrahim Al-Khatib, *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy*, Dar Al-Muidz, 2003, hal. 43

perbandingan darinya, (kemudian Dia hendak menyegaja hendak menciptakan) artinya setelah menciptakan bumi tadi Dia bermaksud untuk menciptakan pula (langit, maka dijadikan-Nya langit itu) ‘hunna’ sebagai kata gandi benda yang dimaksud adalah langit itu. Maksudnya ialah dijadikan-Nya, sebagaimana didapati pada ayat yang lain, “faqadhaahunna”, yang berarti maka ditetapkan-Nya mereka (tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui atas segala sesuatu) dikemukakan secara “mujmal” ringkas atau secara Mufasshal terinci, maksudnya “Tidakkan Allah yang mampu menciptakan semua itu dari mula pertama, padahal Dia lebih besar dan lebih hebat dari pada kamu, akan mampu pula menghidupkan kamu kembali ?”³⁶

Allah-lah yang menciptkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan Dia-lah yang menjadikan bumi beserta isinya untuk kebutuhan manusia itu sendiri, Allah juga telah memberikan kecukupan kepada manusia, dan sikap rakus dan tamak lah yang menjadikan manusia ini menjadi kekurangan.

Manusia diciptakan kemuka bumi untuk mengatur isi alam ini, dan tentunya dengan memahami apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan sehingga mampu membuat kesejahteraan baik di dunia dan akhirat, syariat adalah aturan yang dijalankan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia itu sendiri juga. Tanpa adanya aturan maka manusia akan lalai dan timbul sikap kerakusan ingin menguasai segala hal, sehingga syariat atau aturan sangat penting sebagai pedoman hidup.

³⁶ Tafsir ibn Katsir penerjemah M. Abdul Ghoffar Em Vol 1, Pustaka Imam As-Syafi’I, Bogor, 2004, Hal 98

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut

Kesadaran manusia yang lebih menitik beratkan posisinya sebagai penguasa dan pengeksploitasi alam dalam memenuhi segala kebutuhan hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan krisis global.³⁷ Menurut Fachruddin M Mangunjaya bahwa terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi oleh umat manusia dalam mengatasi krisis lingkungan di abad 21 yaitu (1) terjadinya peningkatan populasi, (2) degradasi dan hilangnya sumber daya dan (3) perubahan iklim.³⁸ Isu lingkungan merupakan bagian dari krisis global yang sangat serius yang dialami oleh umat manusia sekarang ini. Perubahan-perubahan yang terjadi dikarenakan pengrusakan alam diantaranya perubahan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Disamping itu, akibat lain dari pemanasan global adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser dan punahnya berbagai jenis hewan. Dari berbagai fenomena yang terjadi baik skala global tidak hanya terjadi karena faktor alam semata, melainkan juga akibat pendekatan tata hubungan yang tidak harmonis atau keserakahan dan tindakan eksploitatif antara manusia dan alam. Oleh karena itu perlu dikembangkan sikap menghargai, menghormati dan menyayangi lingkungan sehingga keberlanjutannya tetap terjaga dan berkesinambungan, konsep ini dikenal dengan istilah kearifan lokal. Menurut

³⁷ Amat Zuhri, *Tasawuf Ekologi (Tasawuf Swbagai Solusi dalam Mananggulangi Krisis Lingkungan)*, Jurusan Ushuluddin STAIN Pekalongan, 2010

³⁸ Fachruddin M Mangunjaya, *Isman and Natural Resource Management*, Durrell Institute of Conservation and Ecology (DICE), University Of Kent, Canterbury, United Kingdom, 2013

Hamzah Tauleka bahwa kearifan ekologi merupakan bentuk hubungan dimana manusia harus belajar melihat alam sebagai kawan kita.³⁹

Sehingga dari hal tersebut maka perlu dikaji tentang pengelolaan sumber daya alam khususnya laut agar alam tetap bersahabat dengan manusia dan dari keduanya dapat menghasilkan kesinambungan antara manusia dengan alam. Sehingga pengelolaan sumber daya alam ini dapat dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat (tradisi dan budaya) serta pendekatan melalui agama yang menjadi kepercayaan serta pedoman dalam hidup dan kehidupan ini.

Pengelolaan sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Pasal I ayat I dikatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Juga dikatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan

³⁹ Hamzah Tauleka, *Teologi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2014

⁴⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed 3, Hal. 534

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁴¹

Dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dikatakan bahwa pengelolaan Kelautan adalah pembangunan yang memberikan arahan dalam pendayagunaan daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut itu sendiri diantaranya yaitu tentang penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut yang meliputi : Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian ruang laut.⁴² Dari faktor-faktor pengelolaan sumber daya alam yang tertuang didalam Undang-undang Republik Indonesia, sehingga dapat diperincikan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Dalam Undang-undang pengelolaan sumber daya alam dikatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴³

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Bab I, Ayat 9, hal. 2, tahun 2014

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab I ayat 1

Untuk melaksanakan pengelolaan secara sistematis maka dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa perlu adanya pembangunan berkelanjutan yang berarti untuk memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.⁴⁴

Sedangkan bagi instansi pemerintahan mendapatkan arahan dalam Undang-undang tersebut juga agar membuat perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan yang diinginkan.⁴⁵

Dalam Islam perencanaan dikatakan sebagai konsep Ikhtiar, karena perencanaan itu merupakan konsep aktivitas yang hendak dilakukan dimasa datang, maka tentu harus didukung informasi peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan yang akurat dan jitu agar konsep perencanaan ini benar-benar sesuai dengan informasi yang akurat.⁴⁶

Perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebuah kebutuhan, dalam suatu Riwayat dikatakan :⁴⁷

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab I ayat 3

⁴⁵ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005 hal. 8

⁴⁶ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Muammalah dan Manajemen*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2007, hal. 115

⁴⁷ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Muammalah dan Manajemen*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2007, hal. 116

“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek maka tinggalkanlah”(Hr. Ibnu Mubarak).

Sehingga dalam ajaran agama Islam tidak hanya merencanakan hal yang bersifat materi saja melainkan perencanaan yang menghasilkan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

b. Pemanfaatan

Pemanfaatan dalam undang-undang dapat diartikan sebagai memanfaatkan segala bentuk sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bagi masyarakat dalam generasi sekarang maupun generasi selanjutnya tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.⁴⁸

Mengambil manfaat bukan berarti mengeksplor segala sesuatu yang ada tanda didasari sikap pelestarian dan menjaga sumber daya alam, hal tersebut dilakukan agar dalam pemanfaatannya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam hingga punah dan tak tersisa, tetapi pemanfaatan yang dibarengi dengan pelestarian sumber daya alam tersebut. Dalam sumber daya alam laut terdapat beberapa hal yang dapat dimanfaatkan diantaranya : Hutan Mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, perikanan laut, bahan bioaktif dan lain sebagainya.

Dalam undang-undang pemanfaatan sumber daya kelautan dapat dilihat dalam Bab VI tentang Pengelolaan Kelautan, Pasal 14 ayat 2 Undang-undang tentang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014 yang berbunyi : *“Pemanfaatan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dapat meliputi : Perikanan, Energi dan*

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautanm Pasal 3, Ayat 1

*Sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan Sumber daya non konvensional”.*⁴⁹

Sedangkan dalam pemanfaatan sumber daya alam laut ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pihak swasta serta pemerintah melalui izin dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan memiliki tujuan yaitu untuk kemakmuran masyarakat.

Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui perizinan, pemberian intensif dan pengenaan sanksi. Dan jika ada yang melanggar dalam pemanfaatan ruang laut tersebut maka akan diberikan beberapa sanksi administrative berupa : peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin atau denda administrative.⁵⁰

c. Pemeliharaan

Laut mempunyai ragam manfaat bagi kehidupan kita. Kekayaan laut Indonesia yang melimpah berupa biota laut atau kekayaan mineral adalah anugerah yang tak terhingga dari Yang Maha Kuasa. Termasuk di dalamnya adalah keragaman jenis ikan yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi para nelayan. Laut dan wilayah sekitarnya yang terawat baik juga dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi yang murah. Keragaman sumber daya hayati kelautan juga harus tetap terjaga dalam jangka waktu yang lama, agar beragam jenis biota didalamnya dapat terpelihara sampai generasi yang akan datang.

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Bab VI, Pasal 14, Ayat 2, hal. 7, Tahun 2014

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Bab VIII, Pasal 46 dan 47, hal. 18, Tahun 2014

Menurut Primack et al, dikatakan bahwa sejumlah besar spesies hewan saat ini menghilang dengan cepat karena perburuan, perusakan habitat dan dampak negatif dari pemangsa dan pesaing. Sehingga untuk mencegah punahnya beberapa spesies organisme di laut, diperlukan upaya konservasi keanekaragaman hayati dalam rangka interaksi antargen, spesies, dan ekosistem sehingga diperoleh keuntungan maksimum dan berkelanjutan.⁵¹

Kegiatan konservasi seharusnya dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, mencakup masyarakat umum, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi. Strategi konservasi sumber daya laut yang diterapkan di Indonesia mengacu kepada strategi konservasi sumber daya hayati. Masyarakat pesisir yang banyak berhubungan langsung dengan laut adalah ujung tombak penerapan strategi konservasi tersebut.⁵²

Sedangkan dalam Islam ada etika dan akhlaq terhadap lingkungan yang berfungsi sebagai panduan bagi umat manusia dalam mengembangkan hubungannya dengan alam. Seseorang yang memiliki akhlaq lingkungan akan terdorong untuk menjadikan alam sebagai mitra sekaligus sarana dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sebagai seorang manusia, baik sebagai hamba kepada Tuhan maupun sebagai anggota masyarakat sebagai *khalifatullah fil ardl*. Seseorang yang memiliki akhlaq lingkungan tidak akan menjadikan alam dan lingkungan sebagai bagian subsistem kehidupan sehingga dengan seandainya

⁵¹ Primack, R.B. Supriatna., J. Indrawan & Kramadibrata P, *Biologi Konservasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000, hal.11

⁵² Nikjululuw, V.P.H, *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, Jakarta : Kerja Sama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT Pustaka Cidesindo, 2002, hal 28

dieksplorasi, tetapi dipandang sebagai makhluk yang memiliki kedudukan sama dihadapan Tuhan sehingga keberadaannya tetap dikelola dan dilestarikan.⁵³

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Melaksanakan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan agar tugas keseluruhan berlangsung secara terkendali, dalam arti terarah, termonitoring dan terevaluasi secara seksama.⁵⁴

Sedangkan dalam Undang-undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pasal 45 dikatakan bahwa yang termasuk didalam pengawasan adalah dengan tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.⁵⁵

Controlling yaitu berkaitan dengan pengkoreksian segala sesuatu yang telah dilakukan dan membuat perbaikan atas kesalahan agar menjadi lebih baik dari hari kemaren.

Controlling dapat terjadi untuk seorang individu, kelompok maupun organisasi, control sendiri dapat diartikan pengawasan, jika kita merasa diawasi maka kinerja yang kita lakukan akan menjadi lebih baik apa lagi pengawasan

⁵³ *Akhlak Lingkungan : Panduan Perilaku Ramah Lingkungan*, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Berdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup, PP. Muhammadiyah, tahun 2005, hal 25

⁵⁴ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2007, hal. 124

⁵⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Bab VIII, Pasal 45, Ayat 2, hal. 17, Tahun 2014

tersebut kita sadari bukan hanya dilakukan oleh makhluk tetapi merasa juga diawasi oleh Sang Khalik Allah SWT maka manusia akan merasa enggan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Dalam upaya pengawasan diri sendiri Allah SWT memberikan isyarat kepada kita dan memberikan hukuman jika kita luput didalam kontrol tersebut, terdapat didalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidka mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S. At-Tahrim : 6).

Sehingga dalam hal ini dalam pengelolaan sumber daya alam Islam memandang bahwa sumber daya alam yang ada adalah untuk kebutuhan manusia dan Allah memberikan kecukupan bagi semua yang ada di dalamnya, sedangkan kerusakan dimuka bumi ini semata-mata terjadi dan dilakukan oleh manusia itu sendiri padahal Allah Maha melihat segala sesuatu yang dikerjakan dan kepada Allah-lah tempat kita kembali.

e. Pengendalian

Sedangkan dalam pengusahaannya Sumber Daya Alam Laut dapat diambil manfaatnya berupa : Industri kelautan, Wisata Bahari, Perhubungan Laut, dan Bangunan Laut.⁵⁶

⁵⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Bab VI, Pasal 14, Ayat 1, hal. 16, Tahun 2014

Tujuan dari pengelolaan sumber daya alam laut yaitu untuk : melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung dan kearifan lokal, memanfaatkan potensi sumber daya dan kegiatan di wilayah laut, mengembangkan potensi menjadi pusat produksi, distribusi dan jasa.⁵⁷

Alam diciptakan beragam dan memiliki manfaat untuk manusia itu sendiri, tetapi semuanya perlu keseimbangan. Keseimbangan ini bisa mengalami gangguan jika salah satu atau banyak anggota kelompok atau suatu kelompok mengalami gangguan baik secara alamiah maupun akibat campur tangan manusia. jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan alam, maka alam akan bereaksi atau merespon dengan membentuk keseimbangan baru. Keseimbangna batu ini pula dapat bersifat merugikan.

Dalam Al-Qur'am Surat Ar-Rum : 41 dikatakan bahwa :

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”(Q.S. Ar-Rum : 41).

Ayat di atas menjelaskan bahwa keerusakan yang kita rasakan saat ini baik di darat maupun di laut merupakan akibat dari kegiatan, aktifitas atau kebijakan manusia yang tidka mengindahkan pada keberlangsungan hidup dan kehidupan. Sehingga perlunya pengendalian dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam khususnya laut.

⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Bab VIII, Pasal 42, Ayat 3, hal. 8, thaun 2014

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut sendiri terbagi dari beberapa bentuk model pengelolaan diantaranya :⁵⁸

1. Pengelolaan Tradisional

Pada pengelolaan ini, tingkat pengetahuan dan teknologi masyarakat sendiri masih rendah, disini campur tangan pemerintah dalam pengelolaan juga masih rendah, sehingga kondisi teknologi, ekonomi dan ekologi bisa dikatakan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sumber daya perikanan. Namun kondisi untuk analisis sosial dan etikanya cukup bagus. Hal ini dikarenakan kepercayaan dan adat masyarakat dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat masih sangat kuat.

2. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat (CBFM)

Pengelolaan berbasis masyarakat atau *Community Based Fisheries Management* (CBFM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam, misalnya perikanan yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. CBFM adalah sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan kebijakan mengenai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/ berada di tangan masyarakat di daerah tersebut. Dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan

⁵⁸ Nikjululuw, V.P.H, *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, Jakarta : Kerja Sama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT Pustaka Cidesindo, 2002, hal 43

dan aspirasi nya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya hal ini dapat dikembangkan melalui tiga cara:⁵⁹

- a) Pemerintah beserta masyarakat mengakui praktik-praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan merupakan adat atau budaya yang dianut selama ini; nilai budaya tetap dijaga, kebijakan pengelolaan berdasarkan nilai budaya setempat.
- b) Pemerintah dan masyarakat menghidupkan kembali atau merevitalisasi adat dan budaya masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan. Adat dan budaya tersebut barangkali telah hilang atau tidak digunakan lagi karena berubahnya zaman dan waktu. Meski demikian, masyarakat dan pemerintah menyadari bahwa adat dan budaya itu perlu dihidupkan lagi karena ternyata hilangnya adat dan budaya tersebut tidak membuat masyarakat semakin sejahtera;
- c) Pemerintah memberikan tanggung jawab sepenuhnya dari wewenang pengelolaan sumberdaya kepada masyarakat.

3. Co-Management

Konsep *co-management* adalah konsep pengelolaan yang mampu menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya. Dengan kata lain, *co-management* didefinisikan sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumberdaya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti perikanan, terumbu

⁵⁹ Nikjululuw, V.P.H, *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, hal. 44

karang, mangrove dan lain sebagainya. Dalam konsep *co-management*, masyarakat lokal merupakan partner penting bersama-sama dengan pemerintah dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu kawasan. Jadi, dalam *co-management* bentuk pengelolaan sumberdaya alam berupa gabungan dari dua pendekatan utama yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (*Government Centralized Management*) dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (*Community Based Management*). Pada *Government Centralized Management*, hirarki yang tertinggi hanya memberikan informasi kepada masyarakat, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pada *Community Based Management*, hirarki yang tertinggi adalah control yang ketat dari masyarakat dan koordinasi antar area yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.⁶⁰

Keberhasilan pengelolaan dengan model *co-management* ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk mendesentralisasikan tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan kepada nelayan dan *stakeholders* lainnya. Penerapan pendekatan *co management* membawa dampak positif bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diterima adalah:

- a) Pendirian dan penerapan *co-management* menyediakan kesempatan kepada nelayan untuk bekerja dalam bidang kepariwisataan dengan membawa wisatawan *snorkling* dan *diving* di terumbu karang buatan.
- b) Menyediakan kesempatan bagi nelayan untuk menangkap jenis ikan demersal di terumbu karang buatan.

⁶⁰ Nikjululuw, V.P.H, *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, hal. 48

- c) Produksi ikan meningkat.
- d) Masyarakat memiliki mata pencaharian baru dalam bidang wisata.
- e) Pendapatan meningkat.
- f) Produksi ikan meningkat, sehingga distribusi pendapatan cenderung meningkat.

Walaupun banyak manfaat yang diterima, penerapan *co-management* juga memiliki kelemahan, yaitu untuk menerapkan sistem ini membutuhkan dukungan secara legal maupun finansial yang mahal seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke arah *comanagement* dan pengeluaran untuk minyak dan gas alam akibat penggunaan mesin.

4. Pengelolaan Perikanan Berbasis Pada Ekosistem (EBFM)

Definisi Ecosystem Based Fisheries Management menurut FAO (2004), EBFM diidentifikasi sebagai pengelolaan perikanan yang mampu manampung dan menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan memperkirakan kebutuhan untuk generasi mendatang, dalam memanfaatkan barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem kelautan. Oleh karena itu, tentunya pendekatan ini memperhitungkan pengetahuan dan ketidakpastian tentang keberlanjutan sumber daya kelautan, habitat, aspek *stakeholders* dalam ekosistem dan usaha menyeimbangkan seluruh tujuan yang ada pada masyarakat. Atau secara spesifik, tujuan dari pengelolaan perikanan berbasis ekosistem adalah untuk menilai dan mengelola dampak ekologi, sosial, dan dampak atau *outcome* yang terkait dengan kegiatan perikanan dalam kesatuan ekosistem (Fletcher, 2006) Pendekatan *ecosystem based fisheries management* (EBFM)

untuk pengelolaan sumberdaya perikanan mungkin merupakan salah satu metode alternatif untuk pengelolaan ekosistem sumberdaya ikan yang kompleks. *The Ecosystem Principles Advisory Panel* (EPAP), menyatakan bahwa EBFM mengemban sedikitnya 4 aspek utama :⁶¹

- a) Interaksi antara target spesies dengan predator, kompetitor dan spesies mangsa.
- b) Pengaruh musim dan cuaca terhadap biologi dan ekologi ikan.
- c) Interaksi antara ikan dan habitatnya.
- d) Pengaruh penangkapan ikan terhadap stok ikan dan habitatnya, khususnya bagaimana menangkap satu spesies yang mempunyai dampak terhadap spesies lain di dalam ekosistem.

Tujuan akhir dari EBFM adalah menjaga keutuhan dan kelestarian ekosistem. Sebagai alat monitoring ekosistem, EBFM kemudian dilengkapi dengan indikator ekologi untuk mengukur perubahan ekosistem yang dimaksud. Indikator-indikator ini diupayakan lebih berarti secara ekologi, mudah dipahami dan diterapkan di lapangan. Berdasarkan hasil monitoring ini diharapkan perubahan ekosistem termasuk manusia yang ada di dalamnya mudah dijelaskan, sehingga keadaan ekosistem secara keseluruhan akan diketahui dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secepatnya untuk mengatasi kerusakan yang ada. Sehingga perencanaan dan pengelolaan laut berbasis ekosistem sangat relevan untuk strategi pembangunan berkelanjutan karena akan dapat menjamin proses

⁶¹ Nikjululuw, V.P.H, *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, hal. 49

ekologi di laut, keanekaragaman biologi laut, dan kelangsungan hidup untuk seluruh populasi spesies laut asli.

3. Kebutuhan Perekonomian

Telah kita pahami bersama bahwa didalam pengertian ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan. Dalam teori *Abraham H. Maslow* membagi-bagi kebutuhan tersebut menjadi beberapa bagian, diantaranya :⁶²

a) Kebutuhan fisiologis

Dalam kebutuhan ini Maslow berpendapat bahwa terlalu banyak kebutuhan fisiologis sehingga tidak mungkin diberi daftar mengenai kebutuhan fisiologis ini karena, kebutuhan ini tergantung siapa dan bagaimana cara menguraikan kebutuhan tersebut. Tetapi maslow mendefinisikan bahwa kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling kuat dalam individu manusia, dan maslow juga membenarkan tentang kebutuhan fisiologis dalam pengertian klasik yaitu tentang rasa lapar, seks, dan haus. Tetapi maslow tidak membatasi kebutuhan fisiologis hanya sebatas lapar, seks, dan haus.⁶³

b) Kebutuhan akan keselamatan

Apabila kebutuhan fisiologis relative telah terpenuhi, maka akan muncul seperangkat kebutuhan baru, yang dikategorikan berupa kebutuhan

⁶² Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian*, Penerjemah Nurul Imam, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1993, hal. 43.

⁶³ Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian*, hal. 45

akan keselamatan (keamanan, kemandapan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut, dll). Dalam lingkungan social kebutuhan akan keselamatan ini dapat menjadi sangat penting setiap kali terdapat ancaman kepada hukum, ketertiban, atau wewenang.⁶⁴

c) Kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta

Apabila kebutuhan fisiologis dan keselamatan cukup terpenuhi maka akan muncul kebutuhan akan cinta, rasa kasih dan rasa memiliki. Dalam kebutuhan ini manusia akan merasa senang jika berada didalam lingkungan yang membuat dirinya nyaman karena penuh dengan kasih sayang.⁶⁵

d) Kebutuhan akan harga diri

Kebutuhan akan hal ini diklarifikasi menjadi dua yaitu : (1) keinginan akan prestasi, kecukupan, keunggulan dan kemampuan, serta kepercayaan pada diri sendiri. (2) hasrat akan nama baik, *prestise* (yann dirumuskan sebagai penghormatan dan penghargaan dari orang lain), status, ketenaran dan kemuliyajaan, dominasi, pengakuan, perhatian, dan lain sebagainya.⁶⁶

e) Kebutuhan akan perwujudan diri

Meskipun kebutuhan telah terpenuhi tetapi terkadang masih ada perasaan tidak puas dan kegelisahan. Untuk kebutuhan ini setiap individu akan berbeda-beda karena setiap individu mempunyai obsesi atau keinginan yang berbeda, maslow memberikan contoh seorang atlit untuk memenuhi kebutuhan akan perwujudan diri maka yang dilakukan seorang atlit adalah mendapatkan prestasi di ajang atlit tersebut, seorang pelukis perwujudan dirinya berupa

⁶⁴ Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian*, hal. 53

⁶⁵ Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian*, hal. 54

⁶⁶ Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian*, hal. 56

hasil lukisan, dan lain sebagainya. Inti dari perwujudan diri adalah menuangkan segala bentuk keinginan didalam diri untuk mendapatkan perhatian dari orang lain secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁷

Selanjutnya kebutuhan menurut pandangan Islam, dikatakan bahwa ilmu ekonomi konvensional tidak membatasi atau membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, padahal Imam Ghazali telah membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Menurut Imam Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungn hidupnya dan menjalankan fungsinya.⁶⁸

Tidak hanya itu Islam mengatur etika dalam memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu konsumsi. Penyusunan tingkat konsumsi ini menjadi menarik karena Islam memberikan norma-norma dan batasan-batasan pada individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Norma dan batasan ini pada gilirannya akan membentuk gaya hidup dan pola perilaku konsumsi. Al-ghazali membagi tiga tingkatan konsumsi yaitu, *sad ar-ramq* dan ini disebut kata *had ad-dhorurah* (batasan darurat), *had al-hajah* (batasan tingkat hajat), dan yang paling tinggi adalah *had at-tama'um* (batasan kemewahan).⁶⁹

⁶⁷ Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian*, hal. 57

⁶⁸ Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.70

⁶⁹ Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, hal. 70

Yang dimaksud dengan had ad-dhorurah, had al-hajah da had at-tana'um adalah sebagai berikut : ⁷⁰

- a) Had ar-ramq atau batasan darurat adalah tingkatan konsumsi yang paling rendah bila manusia berada dalam kondisi ini, ia hanya mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan.
- b) Tingkat tana'um digambarkan bahwa individu pada tahapan ini melakukan konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhannya, tetapi juga ditujukan untuk bersenang-senang dan menikmatinya.
- c) Antara had ad-dhorurah dengan tana'um terdapat area yang sangat luas disebut had al-hajah dimana keseluruhannya halal dan mubah. Menurut Al-ghazali area ini memiliki dua ujung batasan yang berbeda yaitu ujung yang berdekatan dengan perbatasan dharurah dan ini dinilainya tidak mungkin dipertahankan karena akan menimbulkan kelemahan dan ujung yang lain berbatasan dengan tana'um dimana individu yang berada disini dianjurkan untuk waspada agar tidak terlena dengan tugasnya yaitu selalu beribadah kepada Allah SWT.

4. Maqasid Syariah

Tujuan dari maqasid syari'at adalah kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, seperti yang di ungkapkan Imam As-syatibi yaitu syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan juga di akhirat.⁷¹

⁷⁰ Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, hal. 71

⁷¹ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 45

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran islam, yaitu aspek kaidah (tauhid), hukum (syari'ah), dan akhlak.⁷² Menurut khaf, Islamic man (orang islam) tidak harus orang muslim. Tetapi, selama orang tersebut berkeinginan untuk menerima paradigma islam maka ia dapat disebut Islamic man. Jika seseorang sudah bisa menerima tiga pilah sistem ekonomi islam, maka segala keputusan yang ia buat pastinya akan berbeda dengan orang yang menjalankan ekonomi konvensional. Menurut khaf bahwa Islamic man harus disandarkan kepada tatanan kenegaraan sebagai pengawasan dalam jalannya pilar-pilar Islamic man. Islamic man juga dapat diartikan orang yang menerima kerangka neoklasik yang dimodifikasi akan menerima pula kepemilikan oleh swasta dan sistem pasar sebagai bagian dari suatu bidang dalam sistem ekonomi yang menjadi agen individual sebagai faktor dinamis di dalam sistem, sekalipun tetap amat sangat berhati-hati mempertahankan Negara sebagai regulator pasar.⁷³

Tiga syarat untuk dapat dikatakan menjadi Islamic Man menurut Siddiqi yaitu :⁷⁴

- Menghindarkan diri dari sikap israf (berlebih-lebihan melampaui batas)
- Mengutamakan akhirat dari pada dunia (tidak hanya memikirkan konsumsi secara dhoir saja namun konsumsi untuk masa depan yang berkaitan tentang spiritual (zakat, infaq, sedeqah dan lain sebagainya)

⁷² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, hal. 8

⁷³ Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2010, hal. 4

⁷⁴ Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, hal. 45

- Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah).
- Memperhatikan etika dan norma.

Jika dilihat dari aspek kaidah-kaidah fiqh ada beberapa kaidah yang sesuai jika digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam ini, yaitu:

- Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berate juga meraih kemaslahatan. Sedangkan hukum islam, tujuannya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁷⁵

Kemaslahatan ini memiliki kriteria, kriteria maslahat jika disimpulkan adalah sebagai berikut :⁷⁶

- a) Kemaslahatan harus diukur kesesuaiannya dengan maqasid al-syariah, dalil-dalil kulli (general dari al-qur'an dan as-sunnah), semangat ajaran, dan *kaidah kulliyah* (kaidah global) hukum islam.
- b) Kemaslahatan harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi
- c) Kemaslahatan harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
- d) Kemaslahatan harus memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

⁷⁵ Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, Mesir : Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Juz II, hal. 6

⁷⁶ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 165

e) Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus.

Kaidah di atas menegaskan apabila berbenturan antara maslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum harus lebih didahulukan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus.

Dalam buku Fiqh Lingkungan (fiqh bi'ah) terdapat beberapa pendapat berdasarkan al-qur'an bahwa manusia itu di jadikan khalifah dimuka bumi untuk bertugas dan bertanggung jawab merawat, memelihara, melestarikan berbagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Memang Allah telah membolehkan manusia untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini sebagai sumber rizki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya.⁷⁷ Hal tersebut tercermin didalam Al-qur'an Surat Hud : 6, yaitu :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٦)

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis didalam kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)

Oleh karena itu, pemanfaatan itu tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, di daratan dan dalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam Al-qur'an Surat Al-A'raf ayat 56 :

⁷⁷ KH. Drs. Ashari Abta, *Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan*, Fiqh Bi'ah, 2008, hal.77

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)
“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A'raf : 56).

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan, sumber daya alam Indonesia harus digunakan dengan rasional. Pemanfaatan sumber daya harus diusahakan dengan semaksimal mungkin dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan berkesinambungan. Kita harus dapat mengambil I'tibar dari ayat Allah yaitu :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢)

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (Q.S. An-Nahl : 112)

Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah ulah manusia itu sendiri jika terjadi bencana tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanaman diserang hama dan lainnya adalah karena perbuatan manusia itu sendiri, hal tersebut telah diperingatkan didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

“ Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. (Q.S. Ar-Rum : 41)

Pada hakikatnya, alam semesta beserta isinya adalah fasilitas untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Alam diciptakan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk keberlangsungan hidup manusia. Darinya manusia memperoleh makanan, minuman, perlindungan, keselamatan dan mata pencaharian kehidupan,⁷⁸ hal tersebut tersirat didalam Al-Qur'an Surat Al-Nahl : 10.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠)

“Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minum dan sebagian (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu” (Q.S. An-Nahl : 10)

Dari ayat Al-Qur'an diatas maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah telah menciptakan bumi dan segala isinya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan tidak merusak alam tersebut. Secara sadar atau tidak sadar yang membuat kerusakan dimuka bumi ini adalah manusia itu sendiri sebagai pelaksana atau pengelola alam semesta, dan Allah menjamin rizki makhluk-Nya yang ada di muka bumi meskipun binatang melata sekalipun. Sesungguhnya konsep ciptaan yaitu untuk diambil manfaatnya, bukan untuk menguasai karena segala sesuatu yaitu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, jika hal tersebut telah dipahami maka tidak ada kesenjangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, yang dibutuhkan adalah kerjasama, kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pekerjanya sehingga mengakibatkan rakyat yang adil, makmur dan sejahtera, dan hanya kepada-Nya lah kita kembali sehingga tidak ada keserakahan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat merusak alam itu sendiri.

⁷⁸ HM. Misbahul Salam, Konsep Pengelolaan Dalam Fiqh Islam, , Fiqh Bi'ah, 2008, hal.79

Sehingga dalam upaya pelestarian dan pengawasan sumber daya alam ini sendiri perlu dikaji lebih lanjut mengenai Hifdz Bi'ah (pengawasan/penjagaan terhadap lingkungan), karena kita ketahui bersama bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk mencukupi kebutuhan manusia itu sendiri jika alam di eksplor tanpa batasan maka yang terjadi bukan hanya ketidak cukupan bagi suatu golongan tetapi ketidak cukupan bagi seluruh manusia di dunia ini karena keserakahan manusia itu sendiri.

Dalam al-qur'an terdapat banyak sekali mengenai penjagaan terhadap lingkungan hal tersebut terangkum di dalam kajian *Fiqh Bi'ah* yang terdiri dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *Bi'ah*. *Fiqh* berasal dari kata *Faqiha* – *Yafqohu* – *Fiqhah* yang berarti *Al-Ilmu bis-syai* (Pengetahuan terhadap sesuatu) atau *Al-Fahmu* (Pemahaman). Sedangkan secara istilah *Fiqh* adalah ilmu pengetahuan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun kata "*Bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷⁹

Menurut Alie Yafie *Fiqh* merupakan ilmu yang mengatur hidup manusia dimuka bumi, secara garis besar pembahasan dalam ilmu *fiqh* yang terkait dalam penataan kehidupan manusia yaitu : 1) *Rub'u Al-Ibadat*, yaitu

⁷⁹ Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Al-Asnawi, *Nibayatu As-Sul Fi Syarhu Minhaj Al-Wushul Ila 'Ilmi As-Ushul*, Beirut : Dar Ibn Hazm, 1999, Cet. I, Hal. 16

bagian yang menata antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sang Khaliknya, 2) *Rub'u Al Mu'ammalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya, 3) *Rub'u Al Munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, 4) *Rub'u Jinayat*, yaitu bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Empat garis besar ini dalam kebutuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia lahir batin di dunia dan akhirat.⁸⁰

Fiqh Bi'ah (fiqh lingkungan) membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempengaruhi latar berfikir manusia. Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan yaitu :⁸¹

- Lingkungan Fisik, yaitu segala sesuatu disekitar kita berupa benda mati
- Lingkungan Biologis, yaitu segala sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup
- Lingkungan Sosial, adalah manusia yang berada disekitarnya.

Pengkajian *Fiqh Bi'ah* berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sebagai perwujudna manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh fiqh lingkungan dimana manusia sebagai khalifah dibumi perlu

⁸⁰ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta, Tama Printing, 2006, hal 40

⁸¹ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan "Masalah dan Penanggungannya"* Jakarta, Rineka Cipta, 2002 hal 19.

menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu :⁸²

- a) Perlindungan jiwa raga
- b) Dalam pandangan Fiqh Bi'ah setiap jiwa dan raga makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasa dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status drajatnya.
- c) Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia dan akhirat
- d) Dalam Fiqh dijelaskan pengaturan kehidupan manusia yang mana Fiqh telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT, dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Sehingga untuk menjalani hidup dan kehidupan ini mempunyai aturan dan norma-norma untuk mencapai tujuan akhir yaitu mendapatkan Ridha Allah SWT.
- e) Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang
- f) Fiqh mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih-lebihan dalam segala hal.
- g) Keseimbangan ekosisten harus dijaga

⁸² Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta, hal. 163

- h) Tugas manusia untuk mengolah dna melestariakan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.
- i) Semua makhluk adalah mulia
- j) Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak dieksploitasi secara berlebihan.
- k) Manusia menjalankan kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semesta.

B. Kerangka Berfikir

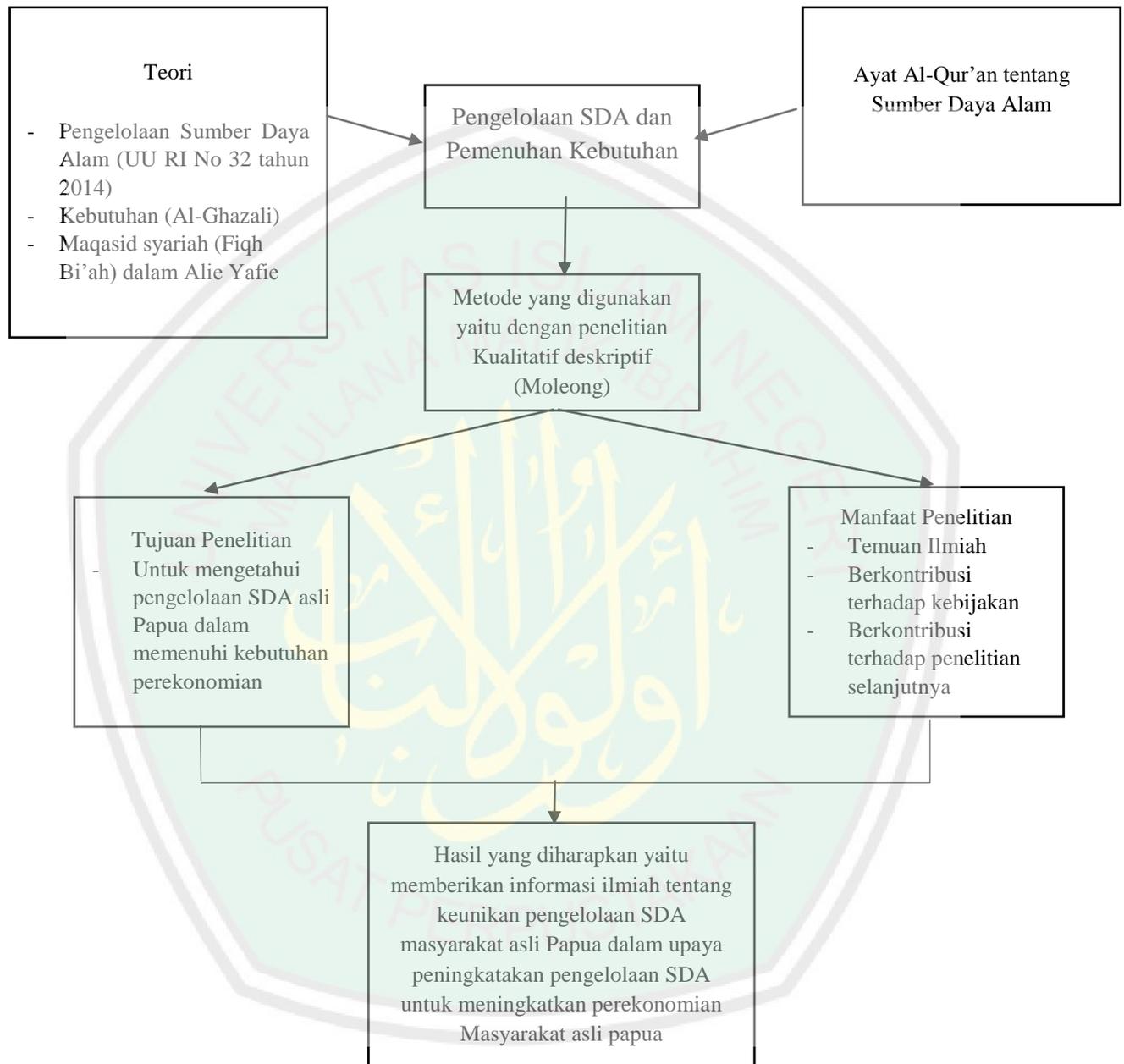
Kerangka berpikir menggambarkan alur pikir peneliti yang dimaksudkan untuk menyusun reka pemecahan masalah (jawaban pertanyaan-pertanyaan penelitian) berdasarkan teori yang dikaji.⁸³ Sedangkan menurut Munirul Abidin (11/11/2016) dalam perkuliahan Seminar Proposal Penelitian di Pascasarjana UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang mengatakan bahwa:⁸⁴

“Unsur-unsur dalam kerangka berpikir adalah: (1) Problem, (2) Masalah apa yang ingin diselesaikan, (3) Teori yang digunakan dalam pemecahan masalah, (4) Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian, (5) Alasan pemilihan tempat penelitian, (6) Hasil yang diharapkan peneliti”.

⁸³ Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah Pascasarjana UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2015, *Op. Cit.*, hal. 34

⁸⁴ Munirul Abidin, *Unsur-Unsur Kerangka Berpikir (Dalam Perkuliahan Seminar Proposal)*, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang), Pada 11/11/2016

KERANGKA BERFIKIR



Gambar : 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau melalui lisan dari orang-orang yang diamati dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengungkapkan, menggambarkan berbagai kondisi fenomena yang terjadi dalam masyarakat asli Papua di Kota Jayapura dalam pengelolaan sumber daya alam berupa sumber daya laut dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Dengan ini peneliti mampu memberikan makna tentang pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan.

Metode studi kasuslah yang dipilih dalam memahami karakter individu maupun kelompok tertentu secara mendalam di dalam sebuah penelitian lapangan. Model pendekatan studi kasus, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail serta mendalam dengan melibatkan beragam sumber informasi, baik berupa wawancara, observasi, ataupun dokumentasi.⁸⁵

Tipe metode studi kasus kualitatif dibedakan berdasarkan ukuran batasan dari kasus yang melibatkan satu individu, beberapa individu, suatu kelompok, suatu program besar, atau suatu aktifitas.⁸⁶

⁸⁵ Creswell, John W, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Edisi III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015), hal. 135

⁸⁶ Creswell, John W, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Hal. 139

Fokus dalam metode studi kasus kualitatif yaitu mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus atau beragam kasus (kasus majemuk), menyediakan pemahaman mendalam tentang kasus, serta mempelajari peristiwa, program, aktivitas, atau lebih dari satu individu.⁸⁷

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan, jadi dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara seksama sehingga mendapatkan data semaksimal mungkin.⁸⁸

Kehadiran peneliti yang pertama kali yaitu untuk melakukan observasi secara langsung kepada masyarakat asli papua yang mencari ikan dilaut, untuk melihat sejauh mana pengelolaan sumber daya alam laut. Masyarakat disini menjadi eksekutor langsung yang mengambil manfaat atas sumber daya alam laut tersebut.

Selanjutnya yaitu kehadiran peneliti dengan melihat, memilih dan memilah, menganalisis serta menyimpulkan sebuah data yang telah diambil dari sebuah penelitian. Kehadiran peneliti sendiri sangat dibutuhkan untuk melihat

⁸⁷ Creswell, John W, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, hal. 145

⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2002, hal. 7

secara langsung apa yang terjadi dengan pengelolaan sumber daya alam laut di wilayah papua dan disandingkan dengan teori-teori yang telah ada.

Alasan pengamatan adalah sebagai berikut :

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung
2. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
3. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti sehingga pengamatan secara langsung ini sangat diperlukan
5. Teknik pengamatan secara langsung memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.
6. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kawasan pesisir Kota Jayapura Provinsi Papua sebagai Ibu Kota Provinsi Papua. Kota Jayapura mempunyai luas 940 Km² (0,23 % dari luas dataran Provinsi Papua), terletak di tepian Teluk Humbolt atau Yos Sudarso pada ketinggian 0 < 700 m di atas permukaan laut.

Kota jayapura secara administrasi berbatasan dengan :

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Sebelah Utara | : Laut Pasifik |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Keerom |
| Sebelah Timur | : Negara Papua New Guinea |
| Sebelah Barat | : Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. |

Kota Jayapura juga memiliki potensi obyek wisata yang memadai, terutama jenis pantai. Hingga saat ini obyek wisata pantai yang telah dikembangkan terdapat di Base-G, pantai Dok II, pantai Holtekam dan Pantai Hamadi. Selain itu, dikembangkan pula jenis wisata agro di kawasan Koya Barat dan Koya Timur (kolat pemancingan), dalam upaya pengembangan kepariwisataan tersebut, telah dijalin kerjasama kemitraan dengan pihak masyarakat adat, swasta lokal dan nasional, antara lain ditandai dengan penyediaan lahan dan investasi bagi pembangunan dan rehabilitasi obyek wisata di pantai Hamadi dan Pantai Base-G.⁸⁹

Kota Jayapura secara Geografis berada pada posisi 10 28' 17,26" – 30 58' 0,28" lintang Selatan dan 137 34' 10,6" – 141 0' 8,22" Bujur Timur. Disamping itu Kota Jayapura juga merupakan Ibukota Provinsi Papua. Topografi daerah cukup bervariasi, mulai dari dataran hingga landau dan berbukit/gunung 700 meter di atas permukaan air laut. Kota Jayapura dengan luas wilayah 94.000 Ha terdapat ±30% tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa dan hutan di lindung dengan kemiringan 40% bersifat konservasi dan hutan lindung.

Ditinjau dari faktor geologi Provinsi Papua terdapat pertemuan dua mikro lempeng yang cukup aktif yaitu di sebelah barat dengan Sesar naik Sangir dan di sebelah timur dengan sesar naik Halmahera. Karakteristik pantai sepanjang pesisir Kota Jayapura secara garis besar berlekuk-lekuk membentuk teluk dan tanjung yang berjuluk Teluk Yos Sudarso. Teluk Youtefa merupakan teluk dalam dari

⁸⁹ Pemerintah Kota Jayapura, Gambaran Umum Kondisi Daerah, hal. 24, tahun 2012

Teluk Yos Sudarso yang terletak di sebelah utara dan barat daya Kota Jayapura serta dikelilingi dua wilayah distrik.⁹⁰

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yaitu dapat berupa suatu fakta, informasi, atau keterangan.⁹¹ Analisis data dapat berjalan dengan cara : (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah, mengklarifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, (3) berfikir agar data tersebut mempunyai makna.⁹²

Yang dimaksud data dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi dalam bentuk sifat yang tidak dapat diukur besar kecilnya. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁹³

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dapat berupa data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.⁹⁴ Ditinjau dari cara pemerolehannya, data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh, dikelola, dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh, dikelola, dan disajikan oleh pihak lain dan biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.⁹⁵ Dalam hal ini peneliti akan mendapatkan dan memperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari masyarakat asli papua, tokoh

⁹⁰ Renstra, *Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Jayapura*, 2012, hal 17

⁹¹ Prastoworo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hal. 12

⁹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2014, hal.248

⁹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT.Renika Cipta, Jakarta, hlm 107

⁹⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2009), hal. 188.

⁹⁵ Nawawi, Hadari dan Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan*,(Jakarta: Reneka Cipta, 2002), hal. 107.

adat/masyarakat/agama, pemerintahan yang terkait. Sedangkan sumber kedua yaitu data sekunder yang diperoleh, dikelola dan disajikan oleh pihak lain untuk menjadi rujukan atau bahan dalam penelitian ini diantaranya dokumen, jurnal, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian pengelolaan sumber daya alam laut.

Adapun data yang akan diambil dalam penelitian yaitu bersumber dari:

- Informan (pejabat Pemerintah yaitu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, warga masyarakat asli Papua khususnya Nelayan kampung Enggros, kepala suku/adat/tokoh masyarakat Kampung Enggros)
- Dokumentasi yakni berupa bahan tertulis diantaranya arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian sumber daya alam laut
- Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan di tempat atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan sumber daya alam berupa sumber daya laut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga cara yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data –data tersebut berupa data Renstra (Rencana Strategi) Pemerintah Kota Jayapura pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Data Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, Data kependudukan yang diambil dari Bappeda Kota Jayapura. Dalam hal tersebut di atas, maka peneliti akan menjelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara mendalam (terstruktur dan tidak terstruktur) disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Teknik wawancara mendalam dapat diartikan untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁹⁶

Teknik wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut :

- Menetapkan informan yaitu yang diwakili dari Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, masyarakat nelayan Kampung Enggros, tokoh masyarakat yang ada di Kampung Enggros
- Menyiapkan pokok-pokok masalah sebagai bahan wawancara
- Melakukan wawancara
- Mengkonfirmasi dengan informan lainnya untuk mendapat kesesuaian dan keselarasan jawaban. Hal tersebut dibutuhkan untuk keakuratan data.
- Mendokumentasikan hasil wawancara berupa audio recording, dikarenakan ada informan yang diwawancarai tanpa diketahui oleh informan tersebut.
- Mengidentifikasi wawancara yang sudah diperoleh

Dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur (wawancara mendalam), panduan wawancara kurang lebih sebagai berikut :

a. Pemerintahan

- Peran pemerintah terhadap sumber daya alam laut

⁹⁶ Prastoworo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, hal. 14

- Kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam laut dan sangsinya.
- Meminta pendapat tentang pemaksimalan sumber daya alam laut dan solusi tentang dampak dari pengelolaannya.
- b. Warga masyarakat
 - Memanfaatkan sumber daya alam laut
 - Mengelola sumber daya alam laut
 - Peran pemerintah
 - Makna alam adalah bagian dari hidup
- c. Tokoh masyarakat/adat/agama
 - peran tokoh dalam melestarikan, menjaga, dan mengelola sumber daya alam laut
 - Sangsi tentang pelanggaran dan larangan
 - Visi dan misi dalam menjaga sumber daya alam khususnya laut

2. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti, memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Menurut Cartwright yang dikutip dalam Haris Herdiansyah mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁹⁷

⁹⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, hal. 131

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi menyeluruh dengan melakukan pengamatan dan pencatatan saat melakukan penelitian terhadap pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya laut di Kota Jayapura.

Observasi yang dilakukan bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan sumber daya alam laut
- b. Untuk mengetahui peran berbagai pihak dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam laut diantaranya yaitu peran masyarakat, pemerintah, tokoh adat/masyarakat.
- c. Untuk mengetahui tentang kebijakan yang dihasilkan dalam upaya pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam laut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat sendiri atau oleh orang lain hal ini dapat diperoleh melalui partisipan maupun dikelola oleh peneliti sendiri. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapat gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁹⁸

Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian yang mampu menggambarkan tentang pengelolaan sumber daya alam laut yang terjadi di Kota Jayapura. Untuk mendapatkannya peneliti memotret langsung tentang pengelolaan yang terjadi agar mendapatkan data dan informasi

⁹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 143

secara obyektik, dokumentasi juga peneliti bisa mendapatkan dari keterangan masyarakat asli papua sebagai pengelola sumber daya alam laut, pemerintah, serta tokoh adat/masyarakat sebagai pembuat kebijakan langsung dan tidak langsung.

F. Teknik Analisis Data

Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Adapun aktifitas analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁹⁹

Dalam hal ini proses yang dilakukan peneliti yaitu :

1. Reduksi data, dengan cara memilih dan memilah data dan sumber data yang akan diperoleh/didapatkan yaitu data-data yang dapat mendukung penelitian tentang pengelolaan sumber daya alam laut.
2. Penyajian data, setelah melakukan pemilahan data dan sumber daya peneliti menyajikan data dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh sehingga mampu dipahami oleh para pembaca.
3. Setelah penyajian data, maka proses yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah di pilih dan dipilah serta disajikan dalam bentuk penyajian data sehingga dalam penelitian ini mendapatkan hasil tentang pengelolaan sumber daya alam laut dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat asli papua.

Sedangkan tahapan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut.¹⁰⁰

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data sehingga data-data yang diambil dari Pemerintahan Dinas

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 246.

¹⁰⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, hal. 248

Kelautan dan Perikanan peneliti pelajari serta mengambil beberapa data untuk disajikan dalam penelitian ini.

2. Mempelajari kata-kata kunci, berupa menemukan tema-tema yang berasal dari data. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga dapat memilih dan memilah data-data apa saja yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Menuliskan model yang ditemukan

Untuk menganalisis data peneliti disini mempelajari atas data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder serta peneliti berhak mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :¹⁰¹

- Mendemonstrasikan nilai yang benar
- Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan
- Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Sedangkan dalam pemeriksaan pemeriksaan keabsahan data hal-hal yang perlu dilakukan adalah :¹⁰²

¹⁰¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, hal. 320

¹⁰² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, hal. 370

- Perpanjangan keikutsertaan, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan keikutsertaan dan berbaur bersama masyarakat untuk mendapatkan data yang diinginkan berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat.
- Ketekunan pengamatan triangulasi, untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan pengamatan triangulasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan menanyakan pada beberapa narasumber mengenai kebenaran data dari sumber-sumber sebelumnya.
- Pengecekan sejawat, dalam hal ini peneliti ingin memastikan bahwa pernyataan yang disampaikan narasumber tidak mengada-ada, untuk memastikan hal tersebut sehingga peneliti melakukan pengecekan sejawat untuk mendapatkan data yang akurat.
- Kecukupan referensial, referensi diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan, referensi ini dapat berupa jurnal.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah pesisir merupakan interface zone, pertemuan dua ekosistem laut dan darat, dimana secara ekologis wilayah ini tidak dapat berdiri sendiri karena bergantung pada keseimbangan antara berbagai elemen alam yang berinteraksi dan membentuk ekosistem pesisir yang unit. Wilayah pesisir memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dan prospektif untuk dijadikan modal pembangunan ekonomi suatu daerah.¹⁰³

Kota Jayapura terletak antara 137⁰ 27' - 141⁰ 41" Bujur Timur dan 1⁰ 27' - 3⁰ 49' Lintang Selatan. Kota Jayapura memiliki luas 940 km² atau 0,30% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kota Jayapura memiliki 5 distrik. Distrik Muara Tami merupakan distrik terluas, Yaitu mencapai 626,7 km². Sementara Distrik Jayapura Selatan Merupakan Distrik dengan wilayah terkecil hanya mencapai 43,4 km² atau hanya 4,62% dari total luas wilayah Kota Jayapura.

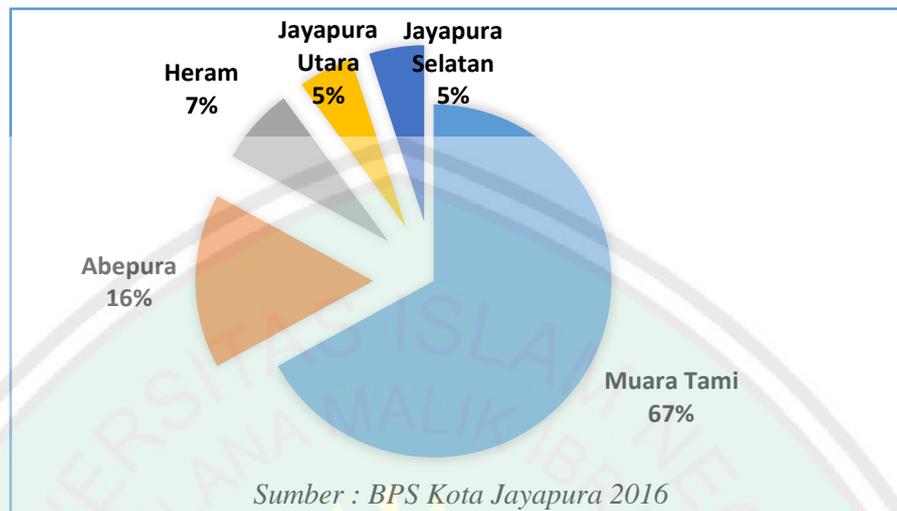
Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Distrik Di Kota Jayapura

NO	Distrik	Luas (KM ²)	Persentase (%)
1	Abepura	155,7	16,56
2	Jayapura Selatan	43,4	4,62
3	Jayapura Utara	51	5,43
4	Muara Tami	626,7	66,67
5	Heram	63,2	6,72
Jumlah		940	100

Sumber : BPS Kota Jayapura 2016

¹⁰³BPS Kota Jayapura, Jayapura Dalam Angka 2016, Bab I Keadaan Geografis dan Iklim, Hal.

Gambar 4.1
Persentase Luas wilayah berdasarkan Distrik di Kota Jayapura



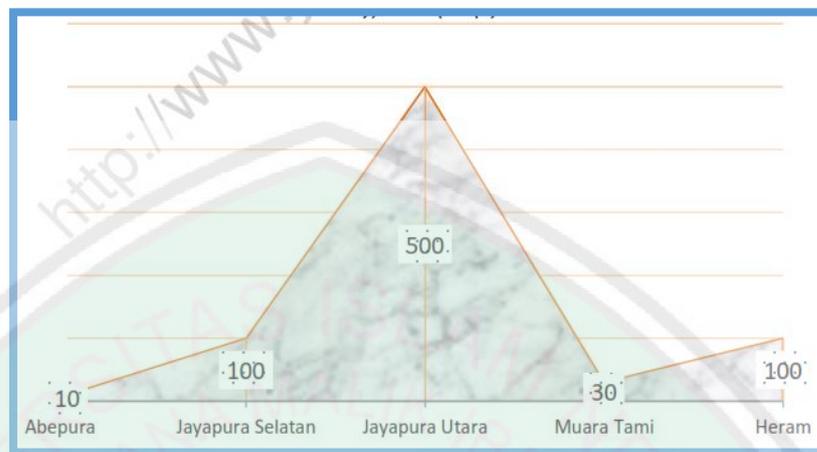
Karakteristik pantai sepanjang pesisir kota Jayapura secara garis besar berlekuk-lekuk membentuk teluk dan tanjung yang berujung Teluk Yos Sudarso. Teluk Youtefa merupakan teluk dalam dari Teluk Yos Sudarso yang terletak disebelah utara dan barat daya Kota Jayapura serta dikelilingi dua wilayah distrik (Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura).

Kota Jayapura dibatasi oleh daratan dan lautan. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan lautan Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinew, sementara itu disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.¹⁰⁴

¹⁰⁴ BPS Kota Jayapura, JayapuraDalamAngka 2016, Bab I Keadaan Geografi dan Iklim, Hal. 3

Gambar 4.2

Rata-rata ketinggian Distrik di Kota Jayapura



Sumber: BPS Kota Jayapura 2016

1. Keadaan Pesisir dan Laut Kota Jayapura

Karakteristik pantai sepanjang pesisir kota Jayapura secara garis besar berlekuk-lekuk membentuk teluk dan tanjung yang berjuluk Teluk Yos Sudarso. Teluk Youtefa merupakan teluk dalam dari Teluk Yos Sudarso yang terletak di sebelah utara dan barat daya Kota Jayapura serta dikelilingi dua wilayah distrik (Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura).

Teluk Youtefa juga diapit oleh dua buah tanjung, di bagian barat adalah Tanjung Pie yang banyak ditumbuhi di bagian belakang teluk membentuk pantai timur Teluk Youtefa, sementara pantai-pantai di sebelah barat dan selatan terdiri dari bukit-bukit curam. Wawasan perbukitan di sebelah utara Teluk Youtefa topografinya lebih rendah sehingga memungkinkan vegetasi mangrove tumbuh baik. Vegetasi mangrove juga dijumpai di sebelah belakang pantai yang

berhadapan dengan Teluk Yos Sudarso dan pantai ini dibatasi oleh Tanjung Pie yang sangat cadas.¹⁰⁵

Perairan di sisi barat teluk Youtefa memiliki kedalaman sekitar 39 meter, namun umumnya perairan Teluk Youtefa merupakan perairan yang dangkal dan dijumpai ekosistem terumbu karang. Beberapa gusung pasir (sand bar) terdapat di tengah teluk dan gusung pasir tersebut membentuk hamparan yang luas pada saat terdampar yang luas pada saat terdapat pada saat air laut surut.¹⁰⁶

2. Sumber Daya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Jayapura secara garis besar terdiri dari dua kelompok yaitu sumberdaya dapat pulih dan sumber daya tak dapat pulih. Sumberdaya dapat pulih diantaranya adalah hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut dan sumberdaya perikanan. Sedangkan sumberdaya tidak dapat pulih meliputi seluruh mineral dan geologi. Selain itu, di wilayah perairan kota Jayapura terdapat pula jasa-jasa lingkungan yang potensial bagi kepentingan pembangunan dan bahkan kelangsungan hidup manusia. Jasa-jasa lingkungan tersebut meliputi fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai tempat reaksi dan tempat wisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energy, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, pengatur iklim dan kawasan perlindungan (konservasi dan preservasi).¹⁰⁷

¹⁰⁵ Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Rencana Strategi dan Pulau-pulau Kecil Kota Jayapura 2012, hal. 16

¹⁰⁶ Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Rencana Strategi dan Pulau-pulau Kecil Kota Jayapura 2012, hal. 17

¹⁰⁷ Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Rencana Strategi dan Pulau-pulau Kecil Kota Jayapura 2012, hal. 17

Terumbu karang di wilayah perairan kota Jayapura didominasi oleh karang tepi, terdiri dari 26 jenis karang, dan total luas sekitar 12 ha dalam kondisi baik, sekitar 4 ha dalam kondisi rusak ringan dan diperkirakan sekitar 6 ha dalam kondisi rusak berat.¹⁰⁸

Mangrove yang berkembang baik akan memberikan fungsi dan keuntungan yang besar, baik untuk mendukung sumber daya perikanan laut dan budidaya, memberi pasokan bahan bangunan dan produk-produk lain, maupun untuk melindungi pantai dari ancaman erosi. Potensi mangrove dikota Jayapura terdiri dari 13 jenis mangrove yang tersebar merata disepanjang pesisir hamadi, kampung tohati, sekitar kampung enggros sampai holtekam dan sekitar tanjung Resyuk menuju mata air Muri dengan total luasan sekitar 90,58 ha.¹⁰⁹

Luas lahan mangrove yang telah berubah fungsi diperkirakan sekitar 2 ha khususnya di Nafri. Telah dilakukan penanaman mangrove seluas 1,5 ha selama 3 tahun. Jenis mangrove yang ditemukan di Teluk Youtefa adalah *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora apiculata*, *Bruguiera cylindrical*, *Ceriops tagal*, *Avicennia maria*, *Avicennia alba*, *Sonneratia*, *Aegiceras cumiculatum*, *Scyphyphora*, *Hydrophylacea*, *Xylocarpus granatum*, dan *Xylocarpus mollucensis*.

Habitat padang lamun dan rumput laut alami menyediakan fungsi ekologis sebagai pelindung pantai dari gelombang dan fungsi sebagai filter alami yang menjaga kualitas perairan supaya tetap jernih, dengan mengendapkan material

¹⁰⁸ DKP Kota Jayapura tahun, Pedoman Penyusunan Renstra Pesisir, Laut dan Pulau-pulau kecil, Jayapura, 2012. Hal. 37

¹⁰⁹ Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Jayapura, Jayapura, 2012, Hal. 18

tersuspensi dari pelumpuran (Siltasi) di daratan. Selain itu, padang lamun merupakan daerah asuhan bagi ikan-ikan kecil dan anak-anak penyu yang baru menetas.

Padang lamun di Kota Jayapura tersebar di tiga lokasi yaitu : Kampung Pulau Kayupulo, Pulau Kosong, dan Teluk Youtefa dengan total luasan diperkirakan sekitar 10 ha. Dari total luasan yang ada, diperkirakan 4 ha masih dalam kondisi baik, 4 ha dalam kondisi rusak ringan dan sekitar 2 ha sudah rusak berat. Delapan jenis lamun yang ditemukan adalah *Enhalus accorodes*, *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii*, *Thalassodendron*, *Halophylla ovalis*, *Halophylla minor*, *Syringodium isoetifolium* dan *Halodule pinifolia*.

Penangkapan ikan di laut merupakan kegiatan ekonomi yang penting untuk Kota Jayapura, karena kontribusinya dalam menyediakan protein hewani. Produksi perikanan laut yang didaratkan di Kota Jayapura sekitar 12,043.00 ton pada tahun 2011, 11.764.42 ton di tahun 2010, dan 11,557.07 ton ditahun 2009. Dari data produksi perikanan tangkap tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap sekitar 10% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Tiga jenis ikan laut yang menyumbang produksi perikanan tangkap adalah ikan cakalang, ikan tongkol, dan ikan tuna. Jenis ikan yang juga memiliki produksi yang tinggi adalah ikan gembung, tenggiri, teri, dan ikan kuwe.¹¹⁰

Objek-objek wisata di Kota Jayapura seperti pantai base-G, pantai hamadi teluk Youtefa, dan pantai Skouw belum tergarap dengan baik walaupun untuk sementara ini telah didatangi wisata baik domestik maupun mancanegara. Objek-

¹¹⁰ Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Kelautan dan Perikanan, *Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Jayapura*, Jayapura, 2012, Hal. 19

objek pariwisata marine atau perairan yang mempunyai potensi diantaranya adalah pantai Base-G, pantai hamadi, perairan Teluk Youtefa dengan keindahan alamnya, pantai Holtekam, pantai Skouw Yambe, tanjung Kaswari Enggros.

Sebelum terjadi pemisahan antara kampung-kampung masyarakat sekitar Kota Jayapura hidup bersama disekitar Pantai Vim yang biasa dikenal dengan julukan Kampung Tua, dikarenakan dikampung tersebutlah masyarakat pesisir berkumpul.

Kampung Enggros sendiri merupakan kampung yang terletak di Bibir Samudra Pasifik hal tersebut dapat dilihat di sepanjang Jalan Raya Abepura di Puncak Skyland dengan keindahan alam yang begitu menakjubkan.

Kampung Enggros dan Pulau Debi merupakan satu wilayah yang sama dan memiliki adat dan istiadat yang juga sama. Kampung Enggros merupakan asal muasal nenek moyang di Kota Jayapura dan sistem pemerintahan di Kota Jayapura hal tersebut berdasarkan dialog dan cerita legenda dari masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.

”Kalo ade mau tau, sejarah asal muasal pemerintahan Kota Jayapura ini di sini sudah tempatnya (Kampung Enggros) lalu mulai muncul itu Kantor Walikota, Keluarahan abe, dan lain-lain supaya mudah di akses makanya pemerintahan dipindahkan di darat”¹¹¹

Di Kampung Enggros ini pula pertama kali Injil masuk di Kota Jayapura yang dibawa oleh misionaris yang sebelumnya telah mengajarkan ajaran Kristen di Manokwari, Mansinam dan di Pulau Debi ini mereka pertama kali

¹¹¹ Wawancara dengan Sekertaris kampung Bapak Djonny Meraudje dan Kepala Kampung Enggros pada tanggal 17 Mei 2017

menginjakkan kaki untuk wilayah Kota Jayapura sehingga terdapat Tugu yang merupakan simbol untuk pertama kalinya Injil diperkenalkan di Kota Jayapura.

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Asli Papua

Jika dilihat dari sejarah yang ada sebenarnya kepemilikan merupakan hak bagi manusia sejak pertama berada di muka bumi, penggunaannya pun hanya sekedar atau sebatas untuk memenuhi kehidupan saja dan belum ada bentuk pemikiran untuk menyimpan untuk dikemudian hari dikarenakan sumber daya yang begitu meluas atau banyak tetapi pengguna sumber daya tersebut masih sedikit dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa pengguna sumber daya alam lebih sedikit dari pada sumber daya itu sendiri.

Selain itu dapat juga diartikan sebagai bentuk ketidak serakahan manusia untuk menguasai alam raya ini, keserakahan inilah yang menyebabkan ketidakadilan dalam kepemilikan.

Ada beberapa konsep yang dijelaskan tentang kepemilikan menurut Erani Yustika dikatakan bahwa terdapat beberapa tipe kepemilikan yaitu : ¹¹²

- Kepemilikan privat (kepemilikan individu) yaitu kepemilikan yang haknya untuk kepentingan pribadi saja,

¹¹² Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan (Paradigma, Teori dan Kebijakan)* Erlangga, Jakarta, 2013, hal 121

- Kepemilikan bersama (kepemilikan kolektif) yaitu kepemilikan yang haknya dapat digunakan secara umum dan kewajibannya yaitu untuk merawat kepemilikan tersebut untuk kepentingan bersama
- Kepemilikan Negara yaitu kepemilikan warga Negara yang diatur oleh pemerintahan suatu Negara untuk kepentingan warga Negara itu sendiri tujuannya yaitu untuk menjaga tujuan-tujuan sosial
- Kepemilikan terbuka yaitu kepemilikan yang dapat digunakan oleh siapa saja dan haknya yaitu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

Sedangkan masyarakat port numbay dalam memandang kepemilikan sumber daya alam laut yaitu sama seperti yang lainnya yaitu kepemilikan bersifat umum yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja tetapi harus izin kepada kepala adat setempat.

Dan mereka memiliki kepercayaan orang yang mengambil tanpa izin atau tanpa restu maka akan sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan terkhusus bagi orang luar dikawasan wilayah port numbay yang mengambil ikan di kawasan teluk Youtefa terkhusus dikawasan Enggros dan sekitarnya.

Hal tersebut di ungkapkan oleh masyarakat sekitar yaitu :

“dulu itu mas, ada orang dari kota datang cari ikan sampek tiga bulan dilaut tidak dapat ikan cuma sedikit karna dia tra mau izin jadi. Bapa ondo dia tau meskipun tidak ada yang kasih tau, terus ditanya oleh masyarakat yang bertemu dilaut suruh orang itu coba izin dulu kah kalo mau cari, trus orang itu datang ke bapak ondo minta izin sama bawa persembahan meskipun bapa ondo tidak minta, tapi setelah izin langsung dia dapat ikan. Persembahan itu biasanya yang dibawa itu pinang, rokok, bama, sama uang seserahan sedikit dan tidak di patok”¹¹³

¹¹³ Wawancara dengan beberapa masyarakat saat di dermaga dan tidak mau disebut namanya.

Untuk permasalahan izin jika mencari hal itu diperkuat oleh kaur di kelurahan Kampung Enggros dengan mengatakan :

“Setidaknya minta izinlah, kalo mencari dengan jumlah banyak atau untuk dijual kembali tetapi kalo cuma mincing-mancing saja tidak ada yang larang, banyak juga orang kota yang datang untuk mincing mengisi waktu luang atau cuma sekedar hiburan, biasa mereka mancing didekat-dekat dermaga situ saja”¹¹⁴

Sebelum berbicara jauh tentang pengelolaan sumber daya alam alaut yang dilakukan oleh masyarakat asli papua khususnya port numbay di Kota Jayapura maka peneliti akan memberikan batasan tentang pengelolaan.

Dalam kamus ilmiah populer yang dikatakan bahwa penyelenggaraan ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.¹¹⁵

Sedangkan menurut G.R.Terry dalam Hasibuan dikatakan bahwa pengelolaan merupakan proses yang memiliki ciri khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.¹¹⁶

Dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dikatakan bahwa pengelolaan Kelautan adalah pembangunan yang memberikan arahan dalam pendayagunaan daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Sedangkan dalam

¹¹⁴ Wawancara kepada Kaur Umum Pemerintahan Kampung Enggros Bapak Yosias Hamadi pada tanggal 17 Mei 2017

¹¹⁵ Pius A. Partanto., M. Dahlan AL-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994 hal. 434

¹¹⁶ Melayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT. Bumi AKsara, Jakarta, 2001, hal. 3

pengelolaan sumber daya alam laut itu sendiri diantaranya yaitu tentang penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut yang meliputi : Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian ruang laut.

a. Perencanaan

Segala sesuatu akan berjalan dengan baik jika diawali dengan rencana yang baik. Perencanaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses dalam penentuan tindakan untuk masa yang akan datang.

Tindakan perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat Port Numbay khususnya Kampung Enggros meskipun secara sederhana tetapi masyarakat memikirkan untuk anak cucu mereka dengan ungkapan :

“yang penting kita menjaga dan melestarikan alam ini, maka alam pasti akan merawat anak cucu kami juga” dan “kami ini menganggap alam sebagai ibu yang membesarkan, merawat dan memberi makan kami sehingga kami ini harus menjaga karna alam lah yang membuat kami seperti ini”

Jika ditinjau lebih dalam maka perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah merupakan perencanaan yang tradisional, dengan memikirkan hal yang sederhana tetapi berdampak pada tahap jangka panjang.

Dalam perencanaan jangka pendek dan berdampak jangka panjang tersebut diantaranya dengan cara :

- Menjaga dan melestarikan lingkungan berupa sumber daya alam laut
- Menjaga dan melestarikan adat istiadat yang dianut atau dipercaya

Perencanaan dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup berupa sumber daya alam laut adalah dengan cara :

- Jika mendapatkan ikan yang masih kecil dan telur hewan laut maka akan mengembalikan ke laut
- Jika mencari ikan dilarang keras menggunakan pukat/bom ikan yang akan merusak habitat alam di bawah laut
- Jika disuatu wilayah menggunakan alat tangkap tradisional/sederhana maka masyarakat yang menggunakan alat tangkap modern tidak boleh ikut bersama-sama dalam satu wilayah pencarian.

Sedangkan dalam upaya menjaga dan melestarikan adat istiadat yaitu dengan cara :

- Selalu menerapkan hukum adat di dalam kehidupan sehari-hari
- Mematuhi aturan hukum adat
- Selalu mempercayakan kepada kepala adat sebagai pemimpin

Hal-hal positif yang dapat diambil dari masyarakat adat yaitu dengan adanya :

- Nilai kesatuan moral dengan alam

Kesatuan antara moral dengan alam terungkap dalam pernyataan mereka “terjadinya sejumlah konflik pemanfaatan lahan di Papua adalah kekuatiran terhadap pemanfaatan wilayah adatnya yang sakral yang dapat membawa berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, hama, kegagalan panen, tidak adanya hasil tangkapan laut dan sebagainya karena kesalahan sikap batin dan perilaku mereka terhadap alam.

- Nilai budaya alam dianggap sebagai ibu
- Nilai jadi diri dan pengamal adat istiadat di era modern saat ini

Dalam hal sederhana untuk pencarian atau pemanfaatan sumber daya alam laut khususnya ikan mereka mempunyai perencanaan yang sangat sederhana diantaranya :

- Pemilihan alat tangkap

Masyarakat nelayan Port Numbay dalam perencanaan pencarian ikan diantaranya yaitu dengan cara memilih dan memilah alat apa saja yang akan digunakan dalam penangkapan ikan, alat yang digunakanpun masih berupa alat tradisional. Hal tersebut dilakukan untuk memilih dan memilah dalam pencarian target seperti halnya pemilihan jaring nilon dan benang hal tersebut harus dipisahkan meskipun tidak mengetahui apa yang akan didapat di laut tetapi mereka memilih untuk tidak menggunakan jaring nilon jika ingin menangkap kepiting.

Dalam pemilihan jaring sendiri terdapat banyak macamnya seperti jaring 3 mata, 4 mata, jaring tonda, jaring biasa, jaring nilon, jaring benang, tombak, kalawau dan mereka mengetahui dimana kebiasaan ikan yang ada, jika ingin mencari kepiting berarti mencari disebelah utara/selatan, jika ingin mencari ikan maka di sebelah timur dan barat, hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh bapak Gonzales :

*“Kita ini kalo mau jaring kepiting pakei jaring yang ini (sambil menunjuk jaring yang terbuat dari benang), itu biasa kita mencari di sebelah sana (sambil menunjuk kearah selatan). Kalo kita pake jaring nilon untuk tangkap kepiting, bisa-bisa jaring putus, terus susah sekali untuk lepas kepiting yang terjerat di jaring, kalo mau jaring ikan biasanya disana (sambil menunjuk di arah flyover yang sedang dalam proses pembangunan)”.*¹¹⁷

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Gonzales Nelayan Kampung Enggros pada tanggal 20 Mei 2017

Tetapi alat tangkap yang dominan digunakan nelayan adalah pancing yang tujuan tangkapannya adalah ikan demersal atau ikan yang hidup di dekat atau sekitar dasar perairan seperti ikan kerapu, ikan kakap, ikan pari dan ikan pelagis kecil atau ikan yang hidup disekitar permukaan seperti tongkol dan gembung. Alat tangkap yang lain adalah rawai tuna untuk target spesies seperti tuna dan cakalang.

Selain itu jug a terdapat jarring insang lingk ar untuk menangkap ikan pelagis kecil, jarring insang tetap untuk pemanfaatan sumberdaya ikan demersal, bagan perahu/rakit tangkapan ikan pelagis, alat penangkap teripang untuk menangkap teripang, dan alat tangkap tradisional lainnya seperti garpu dan tombak. Untuk kawasan Kota Jayapura secara umum alat tangkap ikan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.2
Banyaknya Alat Tangkap Lengkap (Unit) di Kota Jayapura

No	Jenis Alat Tangkap	Tahun				Perkembangan Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	
1	Pukat tarik udang tunggal	0	0	0	0	
2	Jarring insang lingk ar	51	96	117	117	36.70
3	Jarring insang tetap	81	83	91	131	18.69
4	Bagan perahu/rakit	29	31	15	15	-14.91
5	Pancing rawai tuna	7	7	8	8	4.76
6	Pancing rawai hanyut selain rawa tuna	21	21	21	21	0.00
7	Pancing tonda	293	293	374	384	10.10
8	Pancing ulur	103	103	210	210	34.63
9	Pancingn tegak	201	203	259	259	9.53
10	Pancing lainnya	151	154	174	174	4.99
11	Alat penangkap teripang	27	27	27	27	0.00
12	Garbu & tombak dan lain-lain	114	114	215	215	29.53

Sumber : *Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2012*

Jenis alat tangkap dominan yang ada di kota Jayapura, Seperti yang tertera pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada umumnya alat tangkap yang beroperasi di perairan Kota Jayapura berada di wilayah perairan pantai, hal ini tentunya

berdampak pada tekanan terhadap sumberdaya yang ada di wilayah pesisir, sementara pemanfaatan sumberdaya laut lepas belum optimal.

- Waktu pencarian

Kebiasaan masyarakat di Kampung Enggros lainnya melihat waktu atau cuaca yang terjadi, hal tersebut dikarenakan tidak menentukannya cuaca di Kota Jayapura terkadang di pagi hari cuaca panas kemudian siang hari terjadi hujan. Selain itu melihat keadaan angin, jika terjadi angin yang terlalu kencang para nelayan di Kampung Enggros tidak melakukan pencarian dikarenakan keadaan angin yang terlalu kencang berpengaruh terhadap keadaan ikan yang ada dilaut begitu pula dengan air yang terlalu pasang, jika air pasang maka nelayan jarang mencari ikan hal tersebut disebabkan oleh jika air terlalu pasang maka ikan tidak sebanyak waktu air mulai surut atau biasa dikenal dengan sebutan “air meti” dan para nelayan mencari ikan disekitar Pulau Debi saja kecuali masyarakat/nelayan yang mempunyai motor perahu yang besar dengan kapasitas dan alat yang mumpuni tetapi kebanyakan masyarakat nelayan yang ada di Kampung Enggros hanya mencari disekitar Pulau Debi Teluk Youtefa.

“kalo air masih begini kita belum bisa mencari ikan, ikan belum datang (pada saat itu keadaan air masih pasang dan angin belum tenang) nanti mungkin sekitar jam-jam dua begitu kah, baru kita pergi mencari. Dekat-dekat sini saja tidak usah jauh-jauh. Ikan banyak itu nanti waktu air tiba-tiba datang boleh, kita tinggal tunggu di bawah ikan datang sendiri, kalo sekarang ini belum”¹¹⁸

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Gonzales Nelayan Kampung Enggros pada tanggal 20 Mei 2017

- Distribusi Hasil Tangkapan

Masyarakat nelayan khususnya masyarakat di Kampung Enggros mendistribusikan hasil tangkapan secara individu atau dijual sendiri ke pasar entrop tanpa melalui perantara atau tengkulak, mereka beranggapan bahwa ikan yang dijual merupakan ikan segar dikarenakan ikan di tangkap pagi sampai sore kemudian langsung di jual.

Jika hasil yang diperoleh sedikit maka terkadang akan ditampung dibedeng-bedeng atau keramba-keramba kecil yang mereka miliki setelah cukup untuk dijual maka mereka akan dijual dipinggir jalan sekitar jalan entrop. Tetapi jika hasil yang di dapatkan melimpah maka mereka akan menjual secara langsung di sore harinya.

Mengenai harga, mereka melihat kondisi ikan yang ada di Jayapura jika ikan sulit didapatkan maka mereka akan menjual dengan harga yang mahal apalagi terjadi pada saat musim angin maka ikan yang dijual akan melonjak tinggi.

Ada kebiasaan unik yang dilakukan masyarakat Kampung Enggros, jika mereka mendapatkan ikan yang kecil saat melakukan penangkapan dilaut maka mereka akan melepaskan kembali ke laut agar dapat di tangkap dihari kemudian dan menjaga kestabilan ekosistem yang ada.

Dari paparan diatas dapat kita ketahui bersama bahwa perencanaan yang dilakukan berupa :

- Bagaimana untuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan

- Bagaimana mendistribusikan hasil tangkapan
- Bagaimana dapat membawa hasil dari distribusi

b. Pemanfaatan

Dari beberapa kekayaan sumber daya alam laut yang ada khususnya di Kampung Enggros belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan maksimal, hal tersebut karena dipengaruhi oleh minimnya fasilitas yang ada, serta pengetahuan terhadap masyarakat mengenai teknologi yang ada hal tersebut dapat dilihat dari cara mereka mencari dan mengelola sumber daya alam laut itu sendiri.

Dari hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan selama penelitian, masyarakat di Kampung Enggros hanya menggunakan alat seadanya seperti perahu yang digunakan untuk mencari ikan masih menggunakan perahu tradisional atau biasa dikenal dengan perahu ketinting, yang hanya berbahan baku dari kayu serta menggunakan sampan untuk menggerakkan perahu tersebut.

Alat penangkapannya pun masih sederhana berupa jaring, tombak, kalawai, molo (seni menangkap ikan dengan cara menyelam), sumpit dan itupun dilakukan hanya disekitar perairan Kampung Enggros dan tidak berarah ke laut lepas dikarenakan fasilitas yang dimiliki tidak dapat digunakan untuk mencari ikan di laut lepas.

Hal tersebut dikarenakan pendapat atau asumsi masyarakat yang mengatakan bahwa jika menggunakan mesin maka pengeluaran pun akan semakin meningkat, sedangkan hasil tangkapan tidak menentu, jadi dengan alat yang seadanya dianggap solusi keuangan dengan meminimalisir pengeluaran dalam operasional penangkapan ikan.

Masyarakat Kampung Enggros yang mempunyai mata pencaharian nelayan mereka juga kurang memanfaatkan pesisir untuk dijadikan pembudidayaan perikanan, masyarakat hanya mengandalkan alam yang mereka anggap telah menyiapkan segala sesuatu kebutuhan dan mereka berhak dan berkewajiban untuk mencari hasil laut tanpa perlu membudidayakan.

Jika ditanya tentang pembudidayaan, masyarakat tidak dapat membuat kerambah dikarenakan modal baik dari segi pembuatan kerambah maupun memberikan pakan pada ikan yang berada dikerambah, sehingga menurut mereka lebih baik mencari di alam sebagai sumber mata pencahariannya saja.

c. Pengawasan

.Dalam pengawasan ini, Tokoh masyarakat sebagai adatlah yang mempunyai wilayah kekuasaan sebagai pemimpin dan pengawas bagi masyarakat yang diayomi.

Kepala suku yang dijadikan juru kunci sebagai pemimpin suatu kelompok masyarakat merupakan tradisi budaya yang tidak bisa ditinggalkan, hal tersebutlah yang menjadikan Papua menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh Kepala Suku dari keturunan bukan atas dasar pemilihan maupun penunjukan dari pemerintah setempat. Kepala Suku yang ada dijadikan mitra oleh pemerintah untuk pendekatan kepada masyarakat.

Karena didalam tokoh adatlah yang sangat dekat dengan masyarakat yang berbaur bersama masyarakat disetiap aktifitas. Dalam hal pengawasan sendiri, kepala suku mempunyai aturan-aturan tersendiri yang biasa disebut dengan aturan

adat. Aturan adat meskipun tidak tertulis secara legal tetapi aturan tersebut mampu dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun.

Apabila ada yang melanggar aturan adat tersebut, maka sanksi yang diberikanpun beragam, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan terkhusus mengenai pelanggaran terhadap alam khususnya laut.

Dalam hal ini aturan mengenai sumber daya alam laut diantaranya : pelarangan membuang pukat/bom di laut, jika terdapat atau ada masyarakat yang melakukan pengrusakan laut dengan cara membuang pukat/bom maka sanksi yang diberikan yaitu berupa denda adat dan pemulihan kembali terumbu karang yang sudah dihancurkan, untuk efek jera maka denda adat sangatlah mahal bahkan sanksi terberat berikutnya tidak diperbolehkan mencari ikan diperairan tersebut.

Dari aturan yang dibuat oleh adat tersebut meskipun tidak tertulis secara legal tetapi masyarakat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terlebih lagi terdapat kepercayaan bahwa alam itu adalah “ibu” sehingga kewajiban untuk melestarikan alam sangat dijaga.

Hal tersebut di atas berdasarkan dari beberapa narasumber saat dilakukan wawancara diantaranya Kepala Kelurahan Enggros sebagai wakil dari pemerintahan, Tokoh masyarakat selaku tokoh adat dan masyarakat. Dari ketiga narasumber tersebut peneliti menemukan beberapa persamaan yang intinya untuk penjagaan alam ini sendiri masyarakat sangat kooperatif terhadap alam, karena cerita-cerita terdahulu yang disampaikan dari nenek moyang dirasa efektif untuk menjaga alam tersebut. Sedangkan sanksi yang akan diberikan jika ada yang melanggar aturan adat tersebut hanya bersifat mengantisipasi apabila ada yang

melanggar, tetapi sejauh ini masyarakat Kampung Enggros belum ada yang melakukan pengerusakan alam yang disebutkan di atas tadi.¹¹⁹

d. Pengendalian

Dalam pengendalian ini yang dimaksudkan yaitu untuk meninjau kembali dari hasil pelaksanaan yang sudah tersusun didalam perencanaan itu sendiri. Dalam pengendalian atau pengawasan ini dilakukan oleh dualisme kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang mewakili lembaga pemerintah dan yang kedua yaitu kepemimpinan masyarakat atau yang biasa dikenal dengan kepala suku/ondoafi.

Meskipun terdapat dualism kepemimpinan tetapi tidak menimbulkan pertikaian atau sengketa karena terdapat hubungan dan kersama yang saling berhubungan antara keduanya. Ondoafi atau biasa dikenal dengan *Nugsori* di Kampung Enggros dipimpin oleh Marthen Drunyi dan mereka mengatakan.

“Kita tetap memposisikan diri sebagai mitra pemerintahan. Kita bukan musuh atau lawan dari pemerintahan”.¹²⁰

Enggros merupakan Kampung yang sama seperti Kampung lainnya di wilayah Papua sebutan sebutannya pun bermacam-macam tergantung tempat dimana mereka berada sebutan untuk *Ondoafi* itu sebutan untuk suku Tanah Merah, kemudian sebutan *Ondofolo* untuk Suku Sentani, *Onto* untuk Kampung Nafri dan di Enggros sendiri disebut *Nigsori*.

Dalam kepemimpinan adat sama seperti kepemimpinan dari pemerintah yaitu memiliki struktur kepemimpinan ada kepala adat, sekertaris dan staf. Tetapi yang membedakan dengan struktur pemerintahan milik Negara yaitu para

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hans Y. Hanasbey, Djonny Merauje dan Bapak Simon Hamadi, pada tanggal 18 Mei 2017

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Marthen Drunyi tanggal 17 Mei 2017

pemegang adat tidak bisa digantikan semena-mana atau hanya orang-orang tertentu yang berhak untuk menjabat jabatan dalam kepemimpinan adat tersebut berdasarkan garis keturunan.

Pemimpin tertinggi dipegang oleh *Nigsori*, kemudian *Chasori* adalah sebutan kepada sekretaris adat, selanjutnya *Hancdoich* Atau biasa disebut dengan kepala suku kecil, dan *Rowes* atau sering disebut dengan staf atau pembantu *Nigsori*. Adapun jabatan-jabatannya yang disebutkan tadi memiliki wilayah kerja masing-masing hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut ini :

- Jabatan tertinggi yaitu *Nigsori* yang membawahi sekretaris adat, kepala suku, marga dan *Rowes*.
- *Hembisori* kepala/panglima perang suku Merauje
- *Ichsori* kepala/raja ikan suku Sanyi dan kepada/raja hutan suku Itaar.

Terkait sistem keputusan, ada suatu keputusan yang mutlak diambil dari kepala suku atau *Ningsori* tanpa mempertimbangkan masukan dari orang-orang sekitar baik dari sekretaris maupun staf adat. Tetapi adakalanya keputusan bersifat demokratis atau diambil berdasarkan suara terbanyak oleh anggota pimpinan adat.

Sehingga masyarakat sekitar sangat menghargai dan mengaplikasikan keputusan-keputusan adat yang dibawa dari nenek moyang. Sehingga jika ada warga atau orang dari luar yang melanggar aturan maka kepala adatlah yang memberikan hukuman atau sangsi.

Sebagai contoh jika ada yang ketahuan melempar bom atau pukut di laut maka orang tersebut akan diberi sangsi adat yang biasanya berupa denda, karena laut dianggap sebagai ibu yang telah memberikan makan, memberikan kehidupan,

membesarkan sehingga harus dijaga dan diambil manfaatnya secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan hal itulah yang menjadi kearifan lokal masyarakat asli Papua khususnya masyarakat Port Numbay Kampung Enggros.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Kelapa Kampung selaku tokoh masyarakat mengatakan :

“Laut ini yang memberi kami makan, membesarkan kami sampai sekarang ini, bisa memberikan kami hidup sehingga itu yang menjadi lantaran kita itu harus menjaga Laut ini, tetapi tidak dipungkiri bahwa faktor lainpun yang membuat laut ini rusak, masyarakat yang tinggal dikota buang sampah sembarangan sehingga laut ini tercemar ikan-ikan pun sudah mulai jarang, hal itu yang menjadi problematikan kami masyarakat nelayan yang ada disini, dahulu untuk mencari ikan sangat mudah, tinggal buang jaring dipinggir rumah saja sudah dapat ikan, kalo mau goreng ikan, tidak perlu mencari karena ikan-ikan sudah ada dibawah tinggal diambil pake serokan (sambil tersenyum dan tertawa).¹²¹

Sehingga dapat diketahui bahwa untuk mengontrol pelaksanaan yang ada yaitu dari masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan hasil yang optimal maka laut harus dijaga, dilarang merusak alam, ikan yang kecil dilepaskan kembali. Terdapat keselarasan antara hukum adat yang menimbulkan kearifan lokal masyarakat dan dapat dilihat penerapak kearifan lokal tersebut dari kebiasaan masyarakat itu sendiri

e. Kebutuhan

Kebutuhan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan ekonomi masih dalam kategori cukup, hal tersebut bisa dilihat dari segi perekonomian para masyarakat nelayan port numbay Kampung Enggros. Tetapi dalam segi pendapatan mereka mengatakan bahwa terkadang dalam satu hari bisa

¹²¹ Bapak kepala kampung enggros

mendapatkan Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara.

*“kalo pendapatan sehari-hari ya cukup lah, bisa dipake untuk kebutuhan pokok, kebutuhan anak, biasa kalo lagi sepi itu bisa dapat 200-300 ribu kalo lagi rame-remenyanya biasa dapat sampek Rp. 1.000.000,- semua ya tergantung banyak ikan, air bagus, kondisi badan juga bagus, masalahnya kita ini cuma pake ketinting (perahu dayung). Kalo buang jaring sudah 2-3 kali tidak dapat berarti belum rejeki, pulang dulu cari besok lagi”*¹²²

Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika ingin melakukan pencarian ikan dilaut maka hal yang dilakukan yaitu tidak membawa harta apapun seperti uang, perhiasan. Jika mendapatkan bintang laut, dilarang untuk membuang terbalik karena menurut kepercayaan setempat jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi hujan.

Selain itu terdapat beberapa hasil penelitian yang didapatkan diantaranya yaitu:

1. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

a. Sosial

Kota Jayapura mempunyai penduduk cukup heterogen, yaitu terdiri dari semua suku di Indonesia. Meskipun demikian, suku-suku yang mendominasi selain suku asli adalah suku Jaya dan Makassar yang merupakan transmigrasi di Provinsi Papua. Komposisi penduduk Kota Jayapura lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dengan sex ratio 4,20. Laju pertumbuhan penduduk Kota Jayapura cukup tinggi, yaitu 4,10% per tahun. Namun laju pertumbuhan menurut analisa BPS Kota Jayapura bukan disebabkan oleh naiknya angka

¹²² Wawancara dengan Bapak Gonzales Nelayan Kampung Enggros pada tanggal 20 Mei 2017

kelahiran, melainkan tingginya migrasi masuk ke wilayah ini. Banyaknya pendatang disebabkan semakin meningkatnya sarana transportasi, baik kapal laut maupun pesawat udara, serta arus urbanisasi penduduk dari desa ke Kota dengan semakin baiknya infrastruktur jalan raya.

Dari empat belas kampung yang ada di Kota Jayapura, 4 kampung belum memiliki fasilitas pendidikan setingkat sekolah dasar yakni kampung Kayu Batu, Tahima Soroma, Enggros dan Yambe. Masyarakat lokal yang tinggal di daerah pesisir pada umumnya bekerja sebagai nelayan.

Sebagian penduduk menjelaskan usaha penangkapan ikan sebagai mata pencaharian pokok, akan tetapi belum sepenuhnya menjadi penunjang kebutuhan utama sehingga masih dibutuhkan pekerjaan sampingan. Setiap penduduk memiliki peralatan yang mendukung kegiatan menangkap ikan antara lain perahu dan alat penangkap ikan, seperti jarring, pukot, tali kail dan tombak.

Mata pencaharian tambahan penduduk adalah berjualan, hasil yang dijual antara lain diperoleh dari hasil laut berupa ikan dan mengambil kerang-kerangan, usaha yang terakhir ini dilakukan oleh ibu-ibu. Namun dalam usaha berjualan ini nampak pembagian jenis kelamin menurut hasil pencahariannya tampak pula dalam usaha berjualan ini, yaitu kaum wanita umumnya menjual hasil berupa kerang-kerangan (siput laut), yang merupakan mata pencaharian khas bagi wanita kampung Tobati dan Enggros sementara kaum laki-laki hanya menjual ikan.

Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan seorang warga : *“Kalo sore begitu mama-mama yang mencari kerang, soalnya air su meti dan laki-laki tidak ada yang boleh mencari kerang karena itu sudah diatur adat, agar mama-mama juga dapat penghasilan dari penjualan kerang”*.¹²³

¹²³ Wawancara bersama bapak Gonzales, masyarakat nelayan asli Papua, 16 Mei 2017

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan jika sore mulai tiba dan air mulai surut maka ibu-ibu pergi untuk mencari kerang di laut dan laki-laki tidak boleh ikut mencari kerang karena hal tersebut sudah diatur oleh adat agar para ibu-ibu atau wanita mendapatkan penghasilan juga dengan cara mengumpulkan dan menjualnya di pasar.

Adapun mengenai tipe masyarakat Kampung Enggros, Kampung Enggros masih dapat dikatakan sebagai masyarakat tradisional karena memiliki ciri-ciri :

- Jumlah anggotanya relative kecil sehingga hubungan antara warga masyarakat sangat kuat
- Masyarakat homogeny dilihat dari keturunan, tradisi dan mungkin mata pencahariannya
- Memiliki aturan yang mengikat anggota masyarakatnya yang harus dipatuhi
- Kehidupan sosial cenderung statis (lambat untuk maju)
- Mobilitas sosialnya relative rendah karena mereka sudah puas pada suatu yang telah dimilikinya
- Hubungan emosional dengan alam tempat asal-usul (kelahirannya) sangat kuat dan alam dipandang sebagai sesuatu yang dahsyat dan tak terelakkan sehingga manusia harus tunduk kepadanya.
- Sikap religious sangat kuat yaitu kepatuhan terhadap sesuatu yang menjadi kepercayaan sangat kuat.

b. Budaya

Struktur masyarakat pesisir pantai Kota Jayapura sampai saat ini masih dominan dipengaruhi oleh adat lokal setempat. Struktur kekerabatan atau adat di

14 kampung dapat dikelompokkan atas 2 kelompok besar. Pada 12 kampung yakni Kampung Kayo Batu, Tahima Soroma, Tobati, Enggros, Waena, Yoka, Nafri, Holtekamp, Skow, Yambe, Skow Mabo, Skouw Sae, dan Moso, struktur kekerabatan/adat berdasarkan kepimimpinan ondoafi, sedangkan pada 2kampung yakni kampung Koya Koso dan Koya Tengah struktur kepemimpinan berdasarkan pencapaian kemampuan individu.¹²⁴

Hal tersebut ditegaskan oleh pejabat pemerintah selaku kepala kampung yang berpendapat bahwa : *“Memang kami di sini masih menganut adat, adat yang namanya ondoafi/kepala suku ada juga kedudukan yang paling tinggi yaitu ondoafi besar yang menjadi pimpinan dari pada ondoafi-ondoafi di wilayah kecil-kecil, tugas ondoafi besar itu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa terselesaikan dan juga memberikan intruksi langsung, tidak ada yang berani membantah ondoafi karena ondoafi itu keturunan dari nenek moyang dan tidak bisa digantikan dari orang-orang biasa”*.¹²⁵

Peran tokoh adat pada 12 kampung tersebut kepemimpinan seorang kepala suku sangat dominan dalam pengambilan keputusan terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan dikampung dan sanksi kegiatan terhadap masyarakat.

Penduduk Kampung Enggros dan Tobati terdiri dari beberapa keret yang mengikuti garis keturunan ayah. Menurut struktur adat, pimpinan masyarakat di kedua kampung tersebut yang termasuk ondoafi besar adalah dari karet Hamadi, namun dalam masing-masing karet terdapat pimpinan karet yang disebut kepala suku. Selain kepala suku besar dapat pula disebut dengan ondoafi besar dan di kedua Kampung ini terdapat karet utama.

Karet utama di Kampung Tobati adalah Hamadi dan Ireuw. Keret lain dianggap golongan bawah antara lain Haay, Dawir, Hasor, Hababuk, Injama,

¹²⁴ Bappeda Kota Jayapura, 2014

¹²⁵ Wawancara dengan Kepala Kampung Engross, bapak hans y. Hanasbey 17 Mei 2017

Afaar, Mano, dan Itar. Sedangkan di Kampung Enggros terdapat dua karet utama yakni Sanyi dan Drunyi di lapisan bawah terdapat enam keret yaitu Merauje, Semra, Hanasbei, Iwo, Haay dan Hababuk.

Terdapat pembagian peran antara keret utama maupun keret bawah menurut kedudukannya. Keret Hamadi sebagai ondoafi besar berperan mengawasi, mengatur dan memutuskan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama masyarakat kedua kampung. Keret Itar adalah Kepala Suku Babi, maksudnya dialah yang berhak mengatur perburuan babi hutan atau membeli babi eliharaan kerabatnya untuk keperluan suatu pesta adat. Drunyi adalah kepala suku Taring, yaitu yang bertugas untuk menyimpan dan mengatur alat-alat penangkapan tradisional yang dibutuhkan untuk menangkap ikan.

Meskipun stuktur kekerabatan/adat pada keempat belas Kampung berbeda, namun nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat masih relative sam yakni pada kondisi umum masih berpandangan bahwa lingkungan alam dan masyarakat saling berhubungan erat, dan alam harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pandangan ini mengakibatkan etos kerja masyarakat pada beberapa kampung cukup rendah sehingga tidak ada kemauan untuk bekerja keras. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak untuk investasi masa yang akan datang.

c. Kearifan Lokal

Ketergantungan dan tidak terpisahkan antara pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dengan sistem-sistem sosial lokal yang hidup di tengah masyarakat bisa secara gamblang dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir Kota Jayapura.

Ditengah-tengah situasi pengelolaan sumber daya hayati yang semakin memprihatinkan tersebut serta kecendrungan meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati dari perkembangan politik dan ekonomi yang berkembang di daerah, nasional, dan global semakin memperkuat keyakinan bahwa masyarakat adat/lokal adalah tumpua harapan dari banyak pihak yang peduli dengan pelestarian keanekaragaman hayati.

Ada beberapa kearifan lokal yang ada di pesisir kota Jayapura diantaranya Kampung Tobati dan Kampung Enggros membuang kembali ikan yang kecil jika tertangkap. Selain itu, jika akan diadakan pesta adat, maka seminggu sebelum acara dilaksanakan, wilayah penangkapan ikan ditutup selama seminggu agar ikan yang tertangkap nantinya banyak dan besar-besar.

Kearifan lokal seperti ini merupakan aturan adat suku Tobati dan Enggros, di wilayah adat pula berlaku aturan yang disampaikan oleh Ondoafi agar tidak menggunakan bahan-bahan yang merusak kelestarian lingkungan ketika melakukan penangkapan ikan seperti bom dan bus.

Kearifan lokal lain yang ditemui yaitu melarang masyarakat untuk menangkap ikan di waktu malam, kecuali mendapatkan ijin ondoafi dan untuk menangkap ikan pada malam hari ada suku atau marga tertentu yang diperbolehkan yaitu suku Merauje Srem. Demikian juga pada daerah bakau yang melarang pria dilarang untuk masuk karena pada daerah tersebut adalah tempat para ibu-ibu untuk mencari bia (kerang).

Dalam kepercayaan lokal ada yang dipercaya dapat memanggil ikan dengan bahasa lokal Kayu Pulau atau bahasa Tabi dan di Kampung Enggros terdapat marga yang terkenal dengan sebutan rumah ikan dan orang-orang ikan melalui kepercayaan mereka dalam menangkap ikan sehingga suku ini tidak boleh membudidayakan ikan dalam

keramba hal tersebut di khususkan bagi suku Sanyi, hal tersebut masih terbawa sampai saat ini.

Menurut orang-orang Engros marga sanyi tidak boleh membunuh ikan dalam keramba dan tidak boleh memelihara ikan. Selain itu ada suku-suku yang mempunyai symbol-simbol sebutan ikan seperti dari suku Merauje mendapat sebutan ikan Kembong, pemberian nama tersebut tidak tanpa alasan karena masyarakat setempat percaya bahwa dari sebagian suku Merauje dapat memanggil ikan tersebut, suku Sanyi disebut ikan campuran, suku Semra disebut ikan bubara, suku Feb disebut ikan tenggiri, dari suku-suku ini mereka mempunyai orang Harrohonn yang berarti orang yang berkuasa untuk memanggil ikan.

Dalam pencarian ikan masyarakat sekitar Kampung Enggros menggunakan alat tradisional berupa perahu kecil yang memiliki penyeimbang di sebelah sisi perahu (ketinting) serta alat-alat penangkapan sederhana berupa jarring, tombak, jubi/panah, sumpit, dll. Masyarakat Kampung Enggros dalam pencarian ikan tidak berdasarkan waktu (jam) melainkan melihat keadaan alam diantaranya : air surut, air tenang, air keruh/jernih, air tiba-tiba.

Jika ada kedukaan di dalam Kampung tersebut maka para nelayan/masyarakat dilarang untuk mencari/menangkap ikan hal tersebut merupakan aturan adat yang berlaku untuk menghormati keluarga yang sedang berduka. Nelayan Kampung Enggros dan sekitarnya memiliki keunikan tersendiri yaitu jika mempunyai suatu masalah harus diselesaikan sebelum matahari tenggelam. Hal tersebut sudah diwariskan dari nenek moyang agar masyarakat selalu rukun dalam kebersamaan, jika ada yang memiliki sesuatu tidak merasa mereka yang memiliki tetapi tetangga/masyarakatpun diperbolehkan menggunakan yang mereka miliki.

“kalo kami disini itu yang paling diutamakan adalah kekeluargaan, meskipun memiliki marga yang berbeda-beda tapi kami tetap sama hidup bersama, mencari

*bersama, jadi seandainya ada permasalahan itu harus diselesaikan secara kekeluargaan sebelum matahari tenggelam itu tradisi kami, jika ada persoalan yang sulit dipecahkan maka kami ini pergi ke bapak ondo untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, masalah hari itu selesai juga hari itu”.*¹²⁶

Untuk menjalin kekerabatan biasanya ada pemberian yang diberikan kepada tokoh masyarakat sebagai rasa tali persaudaraan hal tersebut dapat berupa pinang, kapur, sirih, rokok dan lain sebagainya, hal tersebut dianggap sebagai tradisi atau kebiasaan masyarakat untuk mempererat tapi persaudaraan., meskipun tokoh masyarakat/bapak ondo tidak memintak adanya pemberian tersebut.

d. Ekonomi

Tingkat pendapatan masyarakat kampung yang di dalam Kota seperti Kampung Waena, Kayu Batu, dan Yoka sangat bervariasi. Sekitar 70% telah memiliki pendapatan lebih dari Upah Minimum Kota dan 30% sisanya masih di bawah UMK. Masyarakat yang pendapatannya di bawah UMK lebih banyak disebabkan oleh keterampilan yang dimiliki belum memenuhi persyaratan kebutuhan pengguna tenaga kerja di daerah perkotaan terutama pada sektor jasa.

¹²⁷

Pendapatan Domestik Regional Broto (PDRB) perkapita merupakan salah satu indikator untuk melihat pendapatan per kapita suatu wilayah. Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan perkapita dapat dijadikan salah satu tolak ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian, khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan sekretaris kampung sekaligus merangkap sebagai tokoh masyarakat Bapak Djonny Merauje, 17 Mei 2017 di Kampung Enggros

¹²⁷ Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Perikanan dan Kelautan, Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kota Jayapura, 2012, hal 33

Tetapi jika dilihat dalam skala mikro masyarakat masih jauh dari katagori sejahtera meskipun pendapatan mereka di atas UMK, hal tersebut dikarenakan gaya hidup atau lingkungan yang mempengaruhi mereka sehingga tidak mempunyai investasi dalam jangka panjang.

Hal tersebut tergambar dari hasil wawancara bersama Kepala Staf Penangkapan Ikan dan Kepala Staf Pengolahan Produk Hasil Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan yang menyatakan bahwa : *“Mereka sudah terlanjur nyaman atau dalam bahasa sederhana mereka sudah merasa berada di zona nyaman dan kebutuhan mereka sudah di penuhi atau diperoleh dari alam, sehingga untuk berkarya yang membuat inovasi baru itu sangat kurang. Contoh : dalam penjualan ikan asar/asap mereka kurang melakukan inovasi sehingga hanya menjualnya dengan 1 ekor penuh dengan penyajian sederhana tanpa kemasan khusus yang meningkatkan harga jual, karena mereka berpendapat “begini saja sudah laku kok, ngapain lagi harus di ubah-ubah lagi”. Tetapi jika ada pendatang yang membuat inovasi baru mereka merasa iri karena dengan penghasilan yang lebih dari mereka (masyarakat asli papua)”*¹²⁸

e. Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Kota Jayapura

Laju pertumbuhan yang cukup tinggi menurut analisa BPS Kota Jayapura bukan dikarenakan oleh naikkan angka kelahiran, melainkan tingginya migrasi yang masuk kewilayah Kota Jayapura. Meningkatnya jumlah penduduk di wilayah pesisir dan erjadinya secara besar-besaran yang terjadi di masa lalu dengan pembangunan telah menyebabkan daya dukung ekologis wilayah pesisir terlampaui, sehingga dampak negative dari eksploitasi sumber daya berpengaruh langsung kepada masyarakat pesisir.

Pengembangan wilayah pesisir Kota Jayapura yang berjalan sangat cepat tanpa memberikan konsekuensi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kawasan hutan mangrove (bakau) yang tadinya mempunyai fungsi sebagai penahan arus dan perlindungan ikan semakin berkurang seiring dengan

¹²⁸ Hasil wawancara dengan kepala staf penangkapan ikan dan produksi hasil tangkapan dinas perikanan dan kelautan Kota Jayapura, 15 April 2017

meningkatnya berbagai aktifitas pembangunan seperti perumahan, gudang barang, supermarket, tempat hiburan, dll.¹²⁹

Sedangkan di Kampung Tobati dan Enggros, degradasi mangrove terjadi karena lahan konservasi mangrove untuk pembuatan jalan dan pemukiman dan menjadi ancaman abrasi pantai. Selain itu air laut di sekitar Teluk Youtefa tercemar oleh sampah dari Kota Jayapura sehingga ikan tangkapan menjadi semakin berkurang. Hal tersebutlah yang menjadi faktor eksternal dari masyarakat dengan kurangnya hasil tangkapan yang mereka peroleh.

Hasil wawancara menyebutkan bahwa :

*“Ikan sekarang tidak banyak seperti dulu, orang dulu bilang lebih susah cari beras dari pada cari ikan, karena orang dulu pasti sudah menyiapkan ikan di rumah-rumah untuk keperluan lauk-pauk dna suguhan jika ada tamu yang datang, tetapi sekrang lebih mudah cari beras dari pada cari ikan, hasil tangkapan menurut tidak banyak lagi seperti dulu”.*¹³⁰

Sedangkan Gambaran secara umum di Kota Jayapura mengenai wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya alam laut yaitu diantaranya meliputi :

1. Pola Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir

Pola penggunaan lahan di Kota Jayapura meliputi penggunaan lahan untuk areal hutan lindung/kawasan sekitar mata air, taman laut, cagar alam dan cagar budaya, pengembangan budidaya perikanan dan pertanian, pertambangan, pariwisata, pemukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan kawasan pemakaman khusus.

¹²⁹ Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Perikanan dan Kelautan, Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kota Jayapura, 2012, hal 34

¹³⁰ Hasil wawancara dengan sekretaris kampung sekaligus merangkap sebagai tokoh masyarakat Bapak Djonny Merauje, 17 Mei 2017 di Kampung Enggros

Khusus untuk penggunaan lahan di pesisir sebagian besar digunakan untuk kepentingan tambak, pemukiman, dan perkantoran. Sementara kegiatan spesifik antara lain seperti untuk wisata pantai, pelabuhan dan beberapa lokasi digunakan untuk budidaya laut dan pengembangan perdagangan dan jasa.

Pemanfaatan wilayah pesisir yang dimaksud adalah segala pemanfaatan yang ada yang berada di batas wilayah perencanaan, sedangkan dalam pembahasan yang paling dominan adalah budidaya perikanan dan penangkapan ikan.

Kegiatan perikanan budidaya air laut atau marikultur mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Kota Jayapura yaitu diperairan Teluk Youtefa. Perairan teluk Youtefa mempunyai luas perairan kurang lebih 1.600 ha yang dikelilingi oleh Kampung Enggros, Tobati dan Kelurahan Abe Pantai serta Kampung Nafri.¹³¹

Apabila dari luas lahan perairan Teluk Youtefa yang ada, kemudian sekitar 10% dimanfaatkan untuk usaha budidaya laut dan 90% sisanya sebagai penyangga untuk menjaga kondisi lingkungan dan perairan serta jarak antar usaha budi daya, maka potensi lahan untuk kegiatan budi daya laut dan perairan Teluk Youtefa adalah sekitar 160 ha. Dari potensi seluas 160 ha baru termanfaatkan sebesar 0,12 ha. Dengan demikian, masih sangat besar potensi pengembangan budi daya laut di Teluk Youtefa tersebut.

¹³¹ Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Kelautan dan Perikanan, *Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Jayapura*, Jayapura, 2012, Hal. 23

Beberapa kondisi alam Teluk Youtefa, diantaranya posisi Teluk Youtefa yang terlindung dari pengaruh gelombang Samudera Pasifik dan keberadaan hutan mangrove yang masih cukup baik di beberapa bagian Teluk Youtefa, seperti Kampung Tobati dan Enggros, menjadi potensi tersendiri bagi Teluk Youtefa untuk pengembangan marikultur.

Perikanan budi daya air tawar menunjukkan produksi yang berfluktuasi yaitu 466.599 ton di tahun 2008 kemudian mengalami penurunan di tahun 2009 dan meningkat kembali di tahun 2010 hingga mencapai 698.71 ton. Produksi perikanan air tawar kembali menurun di tahun 2011 dimana produksi hanya 214.057 ton secara umum trend produksi perikanan budidaya air laut menunjukkan peningkatan yaitu dari 10.72 ton tahun 2008 menjadi 14.64 ton di tahun 2011. Produksi perikanan budi daya air payau mengalami fluktuasi yaitu meningkat pada tahun 2009 dan mengalami penurunan pada tahun 2010 dan meningkat kembali pada tahun 2011 dimana produksi mencapai 925.45 ton.

Tabel 4.3
Produksi Perikanan Kota Jayapura 2008-2011

No	Jenis Usaha	Tahun (Ton)			
		2008	2009	2010	2011
1	Penangkapan				
	a. Laut	9,144.20	11,557.07	11,764.42	12,043.00
	b. Perairan Umum	68	0	0	0
2	Budidaya				
	a. Air Tawar	466.599	427.12	698.71	214.057
	b. Air Laut	10.72	4.02	4.02	14.64
	c. Air Payau	682.405	1,102.71	1,102.71	925.45
	Jumlah	10,371.92	13,090.92	13,083.03	15.123.66

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2012

Tabel 4.4
Produksi Jenis Tangkap Ikan Per Tahun Selama 6 Tahun Terakhir di Kota Jayapura

No	Jenis Ikan	Produksi /Tahun (Ton)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Cakalang	3,127	3,142.70	3,142.70	2,353.30	2,495.90	3,380.50
2	Tuna	354.2	357.5	348.8	3,913.60	4,222.50	1,124.80
3	Kakap	345.7	352.6	352.4	2.6	69.20	-
5	Udang	125.3	125.4	125	0	0	0
6	Ikan karang, dll	0	0	0	30.3	0	0
7	Lobster	0	0	0.30	613.6	0	0
8	Kerapu	14.1	14.4	8.6	16.3	4.07	0
9	Tenggiri/Tarusi	283.8	284.5	284.5	30.3	657.70	222.88
10	Gembung	62	62.7	62.7	613.6	539.24	526.22
11	Kuwe	102.4	103.4	99	40.4	147.08	160.07
12	Selar biru	358.5	362.1	724.2	36.1	54.70	69.00
13	Lemuru	24.5	25.5	25.5	103.7	39.80	63.20
14	Selar kuning	358.5	362.1	0	36.1	54.70	69.00
15	Barakuda	0	0	0	0.4	1.30	0
16	Tongkol	1,164.50	1,179.20	1,179.20	1,882.60	1,563.00	2,484.80
17	Pari	0.4	0.4	0.4	0	0	0
18	Teri	746.3	746.3	746.3	323.1	268.20	216.50
19	Teripang	0.6	0.6	0.6	0	0	0
20	Hiu	14	14	14	48.8	29.00	0
21	Kepiting	0.5	0.6	0.6	0	0	0
22	Lain-lain	2,156.40	2,197.30	2,122.70	1,819.91	1,118.40	3,673.89
	JUMLAH	9,250.10	9,342.60	9,246.50	11,864.71	11,264.79	11,990.86

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2012

Tabel 4.5
Jumlah Armada Penangkap Ikan di Kota Jayapura

No	Uraian	Tahun				Perkembangan (%)
		2008	2009	2010	2011	
1	Tanpa perahu	81	54	56	46	-19.94
2	Jukung	0	0	0	0	0
3	Perahu tanpa motor kecil	728	734	756	757	1.32
4	Perahu tanpa motor sedang	92	81	83	83	-3.16
5	Motor temple	615	545	570	609	5.13
6	Kapal motor	7	19	19	19	57.14
	Jumlah	1,523	1,433	1,484	1,514	0.11

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2012

Tabel 4.6
Perkembangan Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) Berdasarkan Jenis Produk Di
Kota Jayapura Tahun 2006-2011

No	Unit Pengolahan Ikan Berdasarkan Jenis Produk	Jumlah (Unit/Tahun)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Ikan Asap	30	31	32	38	57	62
2	Ikan Asin	3	5	5	5	5	5
3	Teripang	0	0	0	3	3	5
4	Produk lain (olahan bandeng, nila, abon)	0	0	0	4	4	6
	Jumlah	33	36	37	50	69	78

Sumber : *Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2012*

Tabel 4.7
Perkembangan Jumlah Produksi Hasil Unit Pengolah Ikan (UPI) Tahun 2006-
2011

No	Jenis Produk	Jumlah (Ton/Tahun)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Ikan Asap	150	150	250	270	290,3	893,76
2	Ikan Asin	5	5	7	7	7	8
3	Tenggiri	0	0	0	0,05	1,2	2,4
4	Produk lain (olahan bandeng, nila, abon)	0	0	0	4,5	7,1	11,3
	Jumlah	155	155	257	282	305,6	915,46

Sumber : *Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2012*

Perikanan tangkap dan budidaya merupakan sector hulu dan utama pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Jayapura. Hasil perikanan selain berperan penting sebagai penyumbang protein dan penunjang ekonomi masyarakat, diakui sebagai “functional food” yang mempunyai arti penting bagi kesehatan karena mengandung asam lemak tidak jenuh (terutama yang tergolong asam lemak omega-3), vitamin, serta makro dan mikromineral.

Sebagai penopang utama kebutuhan protein masyarakat Kota Jayapura, maka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi terus dilakukan melalui pemberian bantuan hibah sarana prasarana produksi, pelatihan dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi perkembangan usaha.

Selanjutnya perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya dari tahun 2012-2016, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Produksi Perikanan Kota Jayapura 2012-2016

Tahun	SUB SEKTOR PERIKANAN		
	Tangkap (Ton)	Budidaya (ton)	Jumlah (ton)
2012	14.196,00	4.325,00	18.521,00
2013	16.972,32	5.625,62	22.597,94
2014	22.912,63	7.594,84	30.507,21
2015	24.442,00	7.674,32	32.116,32
2016	45.661,50	10.950,65	56.612,15

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016¹³²

Dari tabel diatas terlihat bahwa, produksi perikanan tangkap setiap tahun rata-rata menyumbang 75,54% dari total produksi perikanan Kota Jayapura. Ini menunjukkan bahwa, pemenuhan konsumsi ikan masyarakat Kota Jayapura lebih banyak disuplai oleh perikanan tangkap.

Perkembangan produksi perikanan Kota Jayapura setiap tahunnya juga menunjukkan bahwa, perikanan budidaya belum memberikan andil besar terhadap peningkatan produksi perikanan Kota Jayapura. Hal ini dikarenakan masih rendahnya produktivitas pembudidaya ikan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Target dan Realisasi Produksi Perikanan 2012-2016

Tahun	Sub Sektor Perikanan					
	Tangkap (Ton)			Budidaya (ton)		
	Target	Realisasi	Kenaikan (%)	Target	Realisasi	Kenaikan (%)
2012	13,849,45	14.196,00	2,44	4.159	4.325,00	3,84

¹³² Pemerintah Kota Jayapura, Laporan Tahun Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016, hal. 4

2013	15.926,87	16.972,32	6,16	5.615	5.625,62	0,19
2014	18.318,90	22.916,63	20,06	7.580	7.594,85	0,20
2015	21.083,28	24.442,00	13,74	10.232	7.674,32	-33,33
2016	24.222,77	45.661,50	46,95	13.813,78	10/950,93	-20,72

Sumber : *Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2016, mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan sebesar 46,95%, serta meningkatkan 46,47% dari realisasi produksi pada tahun sebelumnya (2015). Kenaikan produksi ini lebih banyak dipengaruhi oleh bantuan hibah sarana prasarana tangkap yang diberikan baik pada tahun 2016 atau tahun-tahun sebelumnya, serta pola arus dan musim yang menyebabkan kelimpahan produksi pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September.

Pada tabel tersebut dapat juga dilihat bahwa, produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 42,70% dari tahun 2015. Presentasi dari tahun 2014 ke tahun 2015 yang hanya sebesar 1,04%. Meskipun demikian, bila diperhatikan capaian realisasi produksi perikanan budidaya dari target yang ditentukan pada tahun 2016, ternyata realisasi produksi masih belum mencapai target yang ditentukan (-20,72%). Hal ini selain disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas pembudidaya ikan sebagaimana dijelaskan pada perkembangan usaha perikanan budidaya, disebabkan juga oleh penetapan target yang terlalu tinggi.

Selanjutnya, peningkatan produksi dan sosialisasi manfaat ikan bagi manusia terutama dalam perbaikan kualitas generasi mendatang dan pengendalian kesehatan manusia, maka angka konsumsi ikan masyarakat Kota Jayapura setiap tahun mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Jayapura dalam Angka

Tahun	IKK	Satuan	Elemen Data Dalam LPP		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
2011	- Jumlah Produksi Perikanan	Ton	14.950,00	15.123,66	101,16
	- Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	33,30	33,32	100,06
2012	- Jumlah Produksi Perikanan	Ton	18.088,34	18.521,00	102,39
	- Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	33,40	33,20	99,40
2013	- Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.341,37	22.597,91	104,09
	- Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	33,40	33,27	99,6
2014	- Jumlah Produksi Perikanan	Ton	18.318,90	22.912,63	125
	- Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	33,60	33,03	98,3
2015	- Jumlah Produksi Perikanan	Ton	31.295,71	32.116,32	100,62
	- Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	33,60	33,62	100,05
2016	- Jumlah Produksi Perikanan	Ton	38.036,56	56.612,15	148,84
	- Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	34,00	50,54	148,6

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2016

2. Perkembangan Usaha Perikanan Tangkap

Hingga saat ini usaha perikanan tangkap merupakan penyuplai utama kebutuhan ikan di Kota Jayapura. Naik turunnya produksi perikanan tangkap ditentukan oleh banyak faktor diantaranya : keterbatasan armada, keterbatasan alat tangkap dan alat bantu penangkapan, pola arus dan music, posisi bulan, kondisi ekosistem pesisir dan lain sebagainya.

Perkembangan armada, alat tangkap dan produksi perikanan tangkap akan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Jenis dan Jumlah Armada Tangkap 2012-2016

Jenis Armada	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tanpa Perahu	46	63	76	78	82
Perahu Papan (dayung)					
- Kecil (5-7 m)	757	764	343	354	357
- Sedang (7-9 m)	53	60	70	74	79
- Besar (9-11 m)	113	120	103	118	118
Motor Tempel					
- Mesin 5,5 HP	99	125	158	165	168
- Mesin 6,5 HP	14	34	61	87	92

- Mesin 15 HP	213	225	238	278	293
- Mesin 25 HP	26	30	43	58	62
- Mesin 40 HP	287	292	305	306	307
Kapal Motor					
- KM 5 - <10 GT	19	19	108	112	126
- KM 10 - 20 GT	2	5	21	22	22
- KM 20 - 30 GT	3	3	6	6	5
Total	1.632	1.740	1.532	1.658	1.711

Sumber : Data Bidang Produksi Perikanan, 2016.

Tabel 4.12

Jenis dan Jumlah Alat Tangkap, 2012-2016

Jenis Alat Tangkap	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pukat Tarik	47	47	47	52	39
Pukat Cincin	53	53	53	58	43
Jarring Insang Lingkar	117	117	174	176	42
Jaring Insang Tetap	131	131	131	136	102
Jarring Angkat	35	35	35	35	28
Rawai Hanyut lain selain tuna	21	21	21	25	109
Rawai Tetap	131	131	131	136	102
Pancing Tonda	384	384	390	393	573
Pancing Ulur	210	210	234	236	177
Pancing Tegak	259	259	240	245	184
Pancing Cumi	75	75	75	80	60
Pancing Lainnya	174	174	152	154	115
Alat penangkap tripang	27	27	0	0	0
Alat penangkap kepiting	15	15	15	15	0
Garpu, tombak dll	215	215	116	117	0
Total	1.795	1.795	1.715	1.759	1.500

Sumber : Data Bidang Produksi Perikanan, 2016.

Tabel 4.13

Jumlah Nelayan Kota Jayapura Tahun 2016

No	Kelurahan/Kampung	Jumlah Nelayan (Orang)			Total (Orang)
		Port Numbay	Papua	Non Papua	
I	Distrik Jayapura Utara 1. Tanjung Ria	15	102	138	568 255

	2. Imbi	3	90	22	115
	3. Mandala	-	57	125	182
	4. Kayu Batu	16	-	-	16
II	Distrik Jayapura Selatan				437
	5. Argapura	9	44	21	74
	6. Hamadi	3	72	217	312
	7. Tobati	14	-	-	14
	8. Tahima Soroma	-	24	-	24
	9. Entrop	-	13	-	13
III	Distrik Abepura				121
	10. Abepantai	11	20	40	51
	11. Waimhork	-	8	-	8
	12. Engross	43	-	-	43
	13. Nafri	19	-	-	19
IV	Distrik Muara Tami				69
	14. Holtekamp	18	-	-	18
	15. Skouw Sae	19	-	-	19
	16. Skouw Mabo	12	1	-	13
	17. Skouw Yambo	19	-	-	19
V	Distrik Heram				
	18. Kampung Yoka	32	-	-	32
	19. Kel. Waena	12	-	-	12
	Total (Orang)	245	431	563	1.239

Sumber : *Data Bidang Produksi Perikanan, 2016.*

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa, nelayan Kota Jayapura 45,44% adalah nelayan non Papua (Buton, Bugis, Makasar), 34,79% nelayan Papua (Serui, Biak) dan 19,77% nelayan Port Numbay. Komposisi nelayannya lebih di dominasi oleh nelayan non Papua dan nelayan Papua. Komposisi ini yang menyebabkan pengaruh dalam produksi perikanan tangkap per desa/kelurahan hal itu dapat terlihat dari tabel berikut ini

Tabel 4.14
Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Ikan Tahun 2016

No	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
1.	Tuna	21.769,38
2.	Cakalang	6.230,76
3.	Tenggiri	156,34
4.	Bobara (Kuwe)	169,61
5.	Bawal	39,31
6.	kembung	3.258,04
7.	Tongkol	728,64
8.	Tude	59,62

9.	Kawalina	2.347,42
10.	Kakap Merah	7,47
11.	Salam	1.657,33
12.	Deho	1.605,06
13.	Mumar	4.999,77
14.	Lolosi	54,60
15.	Puri	1.024,13
16.	Ikan lainnya	1.554,03
Total		45.661,50

Sumber : *Data Bidang Produksi Perikanan, 2016.*

Dari tabel tersebut kontribusi terbesar bagi peningkatan produksi perikanan tangkap Kota Jayapura sebesar 45.661,50 pada tahun 2016, dipenuhi oleh produksi tuna 47,68%, produksi cakalang 13,62%, produksi momar 10,95%, produksi kembung 7,14% dan kawalina sebesar 5,14%.

Tabel 4.15
Produksi Hasil Tangkapan Per Desa Nelayan

No	Nama Kelurahan/Kampung	Jumlah PRoduksi (Ton)
1.	Tanjung Ria	9.048,28
2.	Imbi	5.141,12
3.	Hamadi	11.336,85
4.	Mandala	11.705,37
5.	Tahima Soroma	2.262,11
6.	Abepantai	5.977,88
7.	Entrop	189,89
Total		45.661,50

Sumber : *Data Bidang Produksi Perikanan, 2016*

Produksi hasil tangkap menurut desa/kelurahan nelayan pada tabel di atas menunjukkan juga bahwa, kontribusi produksi desa sampel terhadap produksi perikanan Kota Jayapura, berturut-turut adalah Kelurahan Mandala memberikan kontribusi 25,63% dari total produksi, Kelurahan Hamadi 24,83%, Kelurahan Tanjung Ria 19,82%, Kelurahan Abepantai 13,095%, dan kelurahan Imbi 11,26%,

sedangkan kontribusi terkecil disumbang oleh Tahima Soroma 4, 95% dan kelurahan Entrop 0,42%.

Bila dilihat dari tabel-tabel di atas terlihat bahwa penghasil produksi perikanan tangkap yang produksinya tinggi di dominasi oleh nelayan non Papua yang kreativitasnya dalam penggunaan alat tangkap lebih baik dari nelayan Papua maupun Port Numbay. Nelayan Non Papua umumnya tidak bergantung pada satu jenis alat tangkap yang mana sangat menguntungkan dalam produksi dan pendapatan.

3. Perkembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan

Sebagai komoditi bernilai ekonomi yang telah menjadi sumber pendapatan sebagian masyarakat Kota Jayapura (Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan pemasar hasil perikanan), serta mempertimbangkan komoditi ini yang cepat mengalami kemunduran mutu, maka harus dilakukan upaya-upaya untuk menjamin kualitas dan higienitas komoditi perikanan hingga tiba di konsumen sekaligus menaikkan nilai tambah dari komoditi ini. Disamping itu, komoditi yang bernilai gizi tinggi dan lengkap serta dapat dijangkau semua strata ekonomi, maka distribusi/pemasaran ikan pun penting diperhatikan. Terkait dengan uraian di atas, maka selain membangun sektor hulu, diikutkan juga membangun sektor hilir (pengolahan dan pemasaran). Membangun sektro hilir penting selain untuk meningkatkan nilai jual komoditi perikanan, dimaksudkan juga untuk menunjang peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi perikanan tangkap dan budidaya.

a) Perkembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Proses pengolahan yang baik menjamin mutu komoditi perikanan bertahan lama, menaikkan nilai jual dan nilai tambah, serta memungkinkan untuk didistribusikan ke semua pusat konsumsi.

Hasil perikanan Kota Jayapura tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Jayapura saja, tetapi juga mensuplai kebutuhan Kabupaten tetangga, serta daerah-daerah pegunungan Papua. Oleh sebab itu, kegiatan pemasaran tidak hanya diarahkan untuk mengurus jaringan pemasaran saja, tetapi juga memperhatikan penanganan produk perikanan yang dipasarkan agar tetap higienis dan terjamin kualitasnya ketika diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat baik di Kota Jayapura, Kabupaten tetangga maupun daerah Pegunungan.

Guna mendukung tujuan tersebut, dilakukan pemberian bantuan hibah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sederhana, pelatihan, pendampingan serta magang bagi pengolah hasil perikanan Kota Jayapura.

Tabel 4.16
Perkembangan Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI), tahun 2012-2016

No	Unit Pengolahan Ikan Berdasarkan Jenis Produksi	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Unit/Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Ikan asap	64	60	63	52	53
2.	Ikan asin	5	6	6	1	1
3.	Olahan bandeng	5	4	4	3	3
4.	Olahan baby nila	1	1	1	1	1
5.	Olahan tenggiri	4	3	2	1	1
6.	Olahan tuna	-	4	5	3	3
Total		79	78	81	61	62

Sumber : Data Bidang P2HP, 2016

Produk olahan hasil perikanan Kota Jayapura di dominasi oleh ikan asap (ikan asar). Bahan baku utama adalah ikan cakalang dan ekor kuning. Pengolahan ikan di Kota Jayapura masih bersifat usaha rumah tangga yang dikelola seraca tradisional. Karakteristik dari pengolahan tradisional adalah pengetahuan dan kemampuan menerapkan teknologi tepat guna masih rendah, dengan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun. Tingkat sanitasi dan hygiene juga masih rendah sesuai dengan keadaan di sekitarnya, permodalannya sangat lemah, peralatan sederhana serta pemasaran produk sebagian besar masih terbatas pada pasaran lokal.

Meskipun demikian, upaya-upaya buntut menjangkau pasar lebih luas terus dilakukan. Untuk menaikkan kualitas dan kuantitas produksi olahan ikan asap, dilakukan bimbingan teknis secara rutin dan berkala langsung ke sasaran binaan. Untuk menaikkan kualitas dan kuantitas produksi olahan ikan asap, dilakukan bimbingan teknis secara safari dari pengolah yang satu ke pengolah yang lain. Hasilnya, terjadi kenaikan jumlah produksi dan jangkauan pasar ke luar Kota Jayapura, meskipun jumlahnya masih sedikit. Hal tersebut dapat tercermin dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.17
Data Produksi Pengolahan Hasil Perikanan, 2012-2016

No	Jenis Produksi	Produksi (Ton/Tahun)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Ikan asap	1.858,26	1.806,66	1.848,66	1.993,48	2.122
2.	Ikan asin	8	8	8	2,4	3,07
3.	Olahan bandeng	1.374	5,04	5,46	4,08	6,12
4.	Olahan baby nila	0,756	2,4	2,4	2,4	2,70
5.	Olahan tenggiri	0,269	5,58	5,52	4,8	5,30
6.	Olahan tuna	-	54,48	54,168	168,576	1.368
Total		1.868,66	1.882,16	1.924,208	2.175,736	3.507,82

Sumber : *Data Bidang P2HP, 2016*

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa, untuk meningkatkan kualitas hasil olahan guna menaikkan nilai tambah dan nilai jual, maka dilakukan pendampingan secara aktif, berkala, dan berkelanjutan dengan bersafari dari 1 UPI yang lain. Upaya ini berhasil menaikkan produksi olahan dari 2.175,736 ton pada tahun 2015 menjadi 3.507,82 ton pada tahun 2016 atau dapat diartikan meningkat 37,97% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini lebih di dominasi oleh olahan ikan asap dan olahan tuna. Penyumbang terbesar bagi peningkatan produksi olahan tuna adalah tuna loin kualitas ekspor.

Melihat dari potensi ikan tuna dan cakalang yang dimiliki Kota Jayapura, bukan tidak mungkin usaha tuna loin dapat lebih meningkatkan produksinya. Namun hingga saat ini masih terkendala ada SDM dan kelayakan tempat dan sarana pengolahan. Keterbatasan-keterbatasan yang dihasilkan.

Selanjutnya, kebutuhan bahan baku ikan untuk produksi olahan dapat dilihat pada tabel 13 berikut :

Tabel 4.18
Data Jumlah Baku Olahan Hasil Perikanan, 2012-2016

No	Jenis Produksi	Produksi (Ton/Tahun)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Ikan asap	1.858,26	1.806,66	1.848,66	1.993,48	2.122
2.	Ikan asin	8	8	5,46	2,4	3,70
3.	Olahan bandeng	1,374	5,04	2,4	4,08	6,12
4.	Olahan baby nila	0,756	2,4	5,52	2,4	2,70
5.	Olahan tenggiri	0,269	5,58	54,168	4,8	5,30
6.	Olahan tuna	-	54,48		168,576	1.368
Total		1.868,66	1.882,16	1.924,208	2.175,736	3.507,82

Sumber : *Data Bidang P2HP, 2016*

b) Perkembangan Pemasaran hasil Perikanan

Pasar sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, memiliki juga kekuatan-kekuatan yang turut menggerakkan permintaan dan penawaran sehingga terbentuk harta barang. Kekuatan-kekuatan tersebut terdiri atas : produsen, distributor, pedagang pengecer, dan konsumen. Distributor dan pengecer komoditi perikanan adalah kekuatan yang berperan penting dalam mengatur tata niaga dan harga ikan, serta mendukung pemerataan dan peningkatan konsumsi ikan di suatu daerah termasuk Kota Jayapura.

Jumlah 4.19

Distributor dan pengecer ikan dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Jenis Produksi	Produksi (Ton/Tahun)		
		2014	2015	2016
1.	Tuna	734,1	1.387,8	1.958,5
2.	Ekor Kuning	1.238,3	2.861,2	2.512,3
3.	Cakalang	939,4	2.989,9	2.013,4
4.	Tongkol	665,8	1.191,5	719,8
5.	Marlin	10,8	3,8	1,9
6.	Kakap Merah	205,7	145,9	345,6
7.	Kakap Putih	0	78,9	172,8
8.	Tenggiri	132,2	46,3	4,5
9.	Kuwe	71,8	20,9	137,7
10.	Kerapu	23,4	4,2	27
11.	Kawalina	138,8	380,1	311,0
12.	Teri	150,2	291,9	168,8
13.	Kembung	106,9	88,9	290,2
14.	Tembang	74,0	300,3	86,4
15.	Sarisi	39,8	1,8	10,8

16.	Bawal	1,4	0,5	1,0
17.	Lajur	1,9	0,4	0,3
18.	Salam	384,1	350,9	97,9
19.	Mumar	324,6	931,4	729,0
20.	Bandeng	140,0	171,4	270,7
21.	Nila	112,6	124,2	342,2
22.	Udang	22,4	75,6	77,8
23.	Cumi-cumi	1,4	2,0	32,4
		32,9		
Total		5.519,6	11.449,8	10.380,8

Sumber : *Data Bidang P2HP, 2016*

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Masyarakat Asli Papua Dalam Kajian Maqasid Syariah

Kebutuhan hidup ini dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier atau dalam pandangan Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa ada tiga tingkatan kebutuhan yaitu kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.¹³³

Kebutuhan Primer atau kebutuhan Dlaruriyah merupakan kebutuhan yang sangat pokok, jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan mengancam kehidupan seseorang baik raga maupun jiwa, sehingga kebutuhan primer harus terpenuhi.

Dalam kajian maqasid diantaranya yaitu melakukan perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Diin*), hidup (*Hifdz An-Nafs*), akal (*Hifdz Al-Akl*), keturunan (*Hifdz An-Nasl*), harta (*Hifdz Al-Maal*). Dengan menjaga kebutuhan-kebutuhan tersebut sehingga akan menjaga dari kebutuhan *Dlaruriyah* atau primer demi kelangsungan hidup serta kemaslahatan, karena tujuan utama dari maqasid syariah adalah bertujuan untuk kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

¹³³ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 35

1. Penjagaan Terhadap Agama (Hifdz Ad-Diin)

Dalam hal ini syariat islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada didalam lingkungan agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervasi dalam ajaran agama terhadap keyakinan masing-masing (Q.S. Al-Kafirun : 1-6). Dalam syaria Islam juga melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya (Q.S. Al-Baqarah : 256). Dampaknya adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antara umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya yang tergambar di dalam (Q.S. Al-Mumtahanan : 8).

Sedangkan dalam konteks masyarakat asli Papua ini, meskipun mereka mayoritas non muslim, tetapi tidak memaksakan keyakinan tersebut terhadap orang lain dengan kepercayaan lain. Mereka menganggap bahwa semua agama adalah mengajarkan kebenaran dan melarang kebathilan. Hal tersebut tercermin dari ungkapan seorang narasumber :

“semua agama itu mengajarkan kebenaran, tidak mungkin suatu agama tidak mungkin mau mengajarkan keburukan, membenci agama lain. Dalam kehidupan ini semua harus rukun untuk keamanan bersama, contohnya di Jayapura ini mas jawa datang kesini dengan agama Islam kami di sini mayoritas Kristen tetapi tetap hidup berdampingan dengan penuh toleransi tidak saling mengganggu. Saat kami melakukan ibadah kami bisa amat begitupun sebaliknya, orang yang menyebarkan kebencian dengan isu agama itu dia yang dibilang orang primitive (sambil tersenyum)”¹³⁴

Itulah yang sebenarnya terkandung dalam makna melindungi agama, tidak saling mengganggu, memaksakan, dan toleransi antar umat beragama. Sehingga

¹³⁴ Wawancara dengan bapak gonzales

secara struktural dalam pemerintahan saat ini tidak di dominasi oleh mayoritas saja tetapi ada perwakilan dari agama Islam yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa

Dalam kehidupan ini setiap manusia pasti akan berfikir dan melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi cara yang digunakan dapat berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian manusia akan bekerja untuk mendapatkan uang sebagai komoditi penukar terhadap barang terutama barang konsumsi yang dijadikan asupan makanan pokok. Didalam ajaran agama Islam tidak hanya diajarkan dalam hal Ibadah saja tetapi dalam hal bermuamalah pun diajarkan dalam ajaran agama Islam.

Bekerja merupakan kegiatan muammalah tetapi dapat bernilai ibadah jika diniatkan dan dilakukan dengan petunjuk sesuai syariat, Islam pun telah memerintahkan untuk mencari rizqi untuk keberlangsungan hidup ini, tetapi dalam hukum ada yang namanya sebab dan akibat, sehingga dalam pencarian rizqi tersebut akan diminta segala pertanggung jawaban baik dari mana rizqi itu berasal dan kemana rizqi tersebut dikeluarkan

Hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat dengan perencanaan sederhana yaitu tentang bagaimana mencari nafkah untuk keluarga, bagaimana mendistribusikan hasil tangkap laut dan bagaimana hasil tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sehingga masyarakat melakukan pekerjaan rutinitas dengan siang bekerja, sore menjual hasil di pasar kemudian pulang membawa kebutuhan dan di malam hari mereka istirahat untuk mempersiapkan diri diesok hari.

“kami disini mencari hasil laut dan langsung menjual kepasar tanpa tengkulak kecuali ikan di kerambah ada tengkulak yang datang untuk membeli, siapa yang kuat mencari mereka yang dapat, kalo malas ya tidak dapat to”¹³⁵

Kegiatan tersebutlah yang masyarakat lakukan disetiap harinya, mereka merasakan kedamaian hidup tanpa perlu berburu untuk mendapatkan segala sesuatu demi keserakahan hidup, dan yang lebih penting mampu menjaga alam di dalam aktifitas kesehariannya.

3. Perlindungan Terhadap Akal (Hifdz Al-Akl)

Akal merupakan dimensi tertinggi untuk membedakan antara manusia dan makhluk lainnya, dengan akal manusia menjadi makhluk yang paling sempurna dari segala makhluk, alam yang dikelola dengan akal yang sehat dan baik maka akan terjadi pemanfaatan yang baik pula. Tetapi jika dilakukan dengan akal yang picik dan licik maka alam akan dieksploitasi dengan keserakahan dan kerakusan sehingga alam akan menjadi rusak karena ulah manusia itu sendiri.

Dengan akal yang baik maka manusia berhak memanfaatkan hasil sumber daya alam yang berlimpah ruah ini dengan cara pengelolaan dan pemanfaatan yang baik pula. Jika sumber daya alam yang ada dikelola dengan bijak dan arif maka tidak akan terjadi kerusakan alam tetapi tetap menjaga dengan cara melestarikan alam tersebut.

¹³⁵ Wawancara masyarakat Kampung Enggros dan Bapak Gonzales

Masyarakat asli Papua mampu menerapkan hal tersebut dengan cara menjaga dan melestarikan alam tanpa merusaknya, hal tersebut tercermin dalam kegiatan sehari-hari serta tercermin dalam hukum adat. Hal tersebutlah yang perlu di duplicate dalam penerapan dan pengaplikasian penjagaan terhadap alam. Meskipun dalam kepercayaan yang masih bersifat tabu dan mitos tetapi hal tersebut terbukti mampu menjaga khususnya dalam melestarikan alam.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian, mereka mampu untuk melakukan perencanaan dalam pengelolaan meskipun perencanaan secara sederhana serta mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Upaya yang nyata dalam *Hifdz Al-Akl* ini yaitu mampu untuk merencanakan serta membuat beberapa alat tangkap secara tradisional seperti pembuatan perahu, tombak, jaring dan lain sebagainya.

4. Penjagaan Terhadap Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Demi berlangsungnya regenerasi diperlukan sebagai pewaris kekhalifahan di dunia ini, sehingga keturunan itu sangat penting. Islam mengatur bagaimana pentingnya penjagaan terhadap keturunan ini, baik dari cara memilih pasangan sampai mendidik keturunan sampai pembagian waris kepada keturunan. Islam mengajarkan jika ingin mendapatkan keturunan yang baik maka harus diberi dengan nafkah yang baik dan pendidikan yang baik sehingga akan memiliki keturunan yang baik.

Memilih istri atau pasangan hiduppun harus baik sehingga ada kriteria yang di sabdakan nabi diantaranya : agama, keturunan, harta, kecantikan maka yang paling tinggi derajatnya adalah memilih karena agamanya, demikianlah

Islam mengatur begitu kompleks persoalan muammalah bukan hanya mengatur berkaitan dengan masalah ibadah.

Keturunan yang baik akan diperoleh melalui kegiatan pernikahan yang bernilai ibadah dan bahwa di anjurkan di dalam agama Islam untuk melakukan pernikahan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat asli Papua juga melakukan pernikahan untuk mendapatkan keturunan, wanita ataupun pria yang dinikahi merupakan pasangan yang dipilih bukan karena dipaksa karena hal tersebut sudah tidak relevan meskipun tidak semuanya seperti itu.

Dalam acara pernikahan masyarakat menggunakan tradisi adat dan dikolaborasikan dengan agama yang dianut, tujuan mereka melakukan pernikahan bukan hanya menurutkan hawa nafsu tetapi juga ingin mendapatkan keturunan dari pernikahan tersebut.

Perlindungan terhadap keturunan yang mereka lakukan adalah dengan cara mendidik, menjaga, dan membesarkan keturunan dengan baik meskipun dengan cara sederhana dan dengan kecukupan apa adanya tetapi mereka sangat menyayangi anak-anak mereka.

5. Perlindungan Terhadap Harta (*Hifdz Al-Mal*)

Harta merupakan hak kepemilikan yang harus dijaga, tujuan manusia mencari dan memiliki harta adalah untuk menampakkan eksistensi serta menambah kenikmatan di dalam kehidupan ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok harta pula mampu membuat orang berlaku licik serta tidak adil baik dalam hal mendapatkannya serta mengeluarkan harta tersebut.

Harta dapat diperoleh melalui berkerja dan mendapatkan warisan dari keluarga. Penjagaan atau perlindungan harta itu sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu dengan menjaga harta dari tindakan pencurian, perampokan, dan lain sebagainya serta cara menjaga harta selanjutnya yaitu dengan cara harta digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan tanpa ada unsur mubazir atau sia-sia.

Dalam penjagaan harta sendiri masyarakat berupaya dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan penghasilan yang halal dan baik karena dalam memperolehnya mereka dengan bekerja sebagai nelayan di Teluk Yotefa, dan melindungi harta tersebut agar tidak dicuri orang atau di rampok, masyarakat juga merasa nyaman dan aman berada dalam komunitas atau lingkungan yang sekarang mereka tempati, karena di Kampung Enggros tidak ada pencurian harta, hal tersebut dikatakan oleh masyarakat saat wawancara yang dilakukan oleh masyarakat secara acak :

“disni itu kami semua bagai sodara, jika yang satu tidak punya maka bisa pinjam ketetangga lainnya, seperti speed ini, kalo mau pake ya pake saja, paling cuma isi BBM saja, makanya dengan begitu disini sangat aman, tidak ada pencurian, kalo ada permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan”

Ternyata keamanan itu bisa terjadi bukan dikarenakan pagar rumah yang tinggi serta keamanan disetiap sudut rumah, keamanan itu terjadi dapat dengan semangkuk kuah dan sepiring nasi. Dengan kebersamaan dan tanpa ada perbedaan diantara masyarakat sekitar Kampung Enggros itu yang menyebabkan keamanan itu terjadi dengan sendirinya. Letak Kampung juga dapat mempengaruhi tingkat keamanan dalam hal pencurian, berdasarkan observasi Kampung Enggros berada pada tengah laut di Teluk Yotefa, keluar dari Kampung harus menggunakan speed

terlebih dahulu, jika ada pencurian maka hal tersebut akan sangat mudah untuk didapatkan pelakunya.

Berkaitan dengan menjaga harta dengan menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang diperbolehkan, tanpa ada unsur mubazir masyarakat juga telah menerapkan hal tersebut, secara sekilas mereka menghambur-hamburkan uang tetapi hal itu tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat, setelah mendalami di dalam kehidupan masyarakat peneliti menemukan keunikan mengapa uang yang mereka dapatkan tidak dapat disimpan yaitu dikarenakan hasil tangkapan yang dijual itu hanya cukup untuk kebutuhan saja, hal tersebut berdasarkan perkataan seorang yang tidak mau disebut namanya dengan mengatakan bahwa :

“kalo dibilang boros kami ini tidak boros, kalo boros itu pasti punya hp banyak peralatan elektronik banyak dan lain sebagainya, tetapi ini yang kita alami, akhir-akhir ini memang pendapatan kita yang tidak menentu, tangkap pagi sampek sore kita jual, hasil jualan kita belikan beras sayur sudah habis, kalo menabung sedikit-sedikit mungkin bisa itupun untuk keperluan anak sekolah, jaga-jaga kalo sakit”

Dengan demikian nampaklah bahwa Islam memang sebagai agama Rahmatallil Alamin, apapun yang dilakukan berdasarkan kebaikan itu yang dianjurkan di dalam Islam meskipun bukan pemeluk agama Islam tetapi mampu menerapkan perilaku islami itulah yang dinamakan Islamic Man dalam pandangan Monzer Khaff.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Asli Papua

G.R. Terry dalam *Hasibuan* yang mengatakan bahwa Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹³⁶

Dengan demikian hal yang paling utama adalah sumber daya manusianya, jika sumber daya manusia mampu melakukan pengelolaan dengan baik maka dapat memaksimalkan hasil dari sumber daya alam yang ada, begitu sebaliknya meskipun sumber daya alam yang sangat melimpah tetapi tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai maka sumber daya alam yang ada tidak dapat diambil manfaatnya semaksimal mungkin.

Sebelum dilakukan pengelolaan maka harus mengetahui terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalah pahaman maupun persengketaan dalam pengelolaan tersebut. laut sendiri bersifat kepemilikan umum tetapi ada aturan pemerintah yang perlu dijalankan sehingga dapat kita ketahui bahwa kepemilikan akan pengelolaan sumber daya alam laut boleh dilakukan oleh siapa saja dengan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun masyarakat

¹³⁶ Melayu S.P Hasibuan, *Manajemen sumber daya Manusia Pengertian Dasar, Pengertian, dan masalah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 3

yang bersifat kearifan lokal tersebut, peraturan pemerintah diantaranya yaitu tidak diperbolehkan melewati garis toritorial yang telah disepakati antara Negara, sedangkan arutan yang dibuat di masyarakat yaitu aturan berupa kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat.

Berkaitan dengan kondisi sumber daya pesisir dan laut yang bersifat *Common property* (milik bersama) dengan akses yang bersifat *quasi open acces*. Istilah *common property* ini lebih mengarah pada kepemilikan yang berada di bawah kontrol pemerintahan atau lebih mengarah pada sifat sumberdaya yang merupakan *Public domain*.¹³⁷

Dalam kepemilikan ini masyarakat percaya bahwa ciptaan alam ini bersifat umum yang dapat digunakan oleh siapa saja, tetapi ada hal unik yaitu dengan perkataan “*ini tanah sa pu nenek moyang*” kalimat tersebut memiliki arti bahwa “ini adalah tanah nenek moyang saya”. Kalimat tersebut memiliki arti sebagai bentuk kepemilikan yang harus di jaga bukan hanya dinikmati semata tetapi harus dijaga pelestariannya tanpa merusak karena alam merupakan peninggalan nenek moyang dan ciptaan Tuhan. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Hud ayat 61 :

وَإِلَىٰ مُّوَدَّٰ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (٦١)

“... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya”... (Q.S. Hud : 61)

¹³⁷ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan (paradigm, teori dan kebijakan)*, Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 121

Dengan kesadaran tersebut sehingga masyarakat setempat mempunyai tanggung jawab dan hak dalam pengelolaan sumber daya alam yang sangat kaya tersebut tanpa merusak dan terus melestarikannya.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dikatakan untuk mengelolan sumber daya alam khususnya laut maka dibutuhkan beberapa indikator untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam laut yaitu : Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan, dan Pengendalian.¹³⁸

1. Perencanaan

Sebuah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecendrungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tetap untuk mewujudkan target dan tujuan.

Hal tersebut dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam laut masyarakat asli Papua khususnya kawasan Port Numbay dengan upaya agar mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal maka para masyarakat asli Papua memiliki perencanaan yaitu dengan menggunakan alat tangkap ikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan, jika para nelayan ingin menangkap cumi, maka menggunakan jaring cumi begitupun seterusnya.

Perencanaan masyarakat hanya berlaku sifat perencanaan jangka pendek, karena beranggapan alam masih dapat menghidupi mereka, pihak luar (eksternal) dari masyarakat tersebutlah yang sebenarnya merusak alam dengan keserakahan tanpa kewajiban melestarikan alam itu sendiri tidak adanya prinsip memiliki dan

¹³⁸ Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

menjaga sehingga yang dilakukan hanya mengambil manfaatnya saja tanpa memperdulikan kerusakan yang terjadi terhadap alam itu sendiri.

Mengenai prinsip perencanaan jangka pendek dan alam masih menyediakan tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Hud ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٦)

“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)” (Q.S. Hud : 6)

Binatang melata saja dijamin rezekinya apalagi manusia yang memiliki akal dan mempunyai semangat untuk mencari rizky di bumi ini, seperti ungkapan masyarakat *“siapa yang mau bekerja, dia yang akan mendapat, jadi kalo malas-malas ya dia tidak akan dapat”* prinsip yang sederhana tetapi mencerminkan sisi ke islaman. Ketidak cukupan dan kepuasan adalah terdapat didalam diri manusia itu sendiri karena keserakahanlah yang menimbulkan ketidak cukupan dan kepuasan pada diri manusia.

Adapun perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat asli Papua khususnya masyarakat Port Numbay Kota Jayapura diantaranya : 1) Pemilihan alat tangkap, 2) Waktu pencarian, 3) Distribusi hasil tangkap,

1) Pemilihan alat tangkap

Dalam pemelihan alat tangkap ikan hal tersebut digunakan dalam target apa yang diinginkan, tetapi alat tangkap yang dominan digunakan nelayan adalha pancing yang tujuannya penangkapan adalah ikan yang hidup didekat atau sekitar dasar perairan ikan kerapu, ikan kakap, ikan pari dan ikan kecil lainnya.

2) Waktu pencarian

Dalam pencarian masyarakat menempatkan cuaca untuk mempermudah dalam mencari ikan, hal tersebut dikarenakan tidak menentunya cuaca. Cuaca yang terjadi yang berpengaruh diantaranya : angin kencang, air keruh dan arus air.

3) Distribusi hasil tangkapan

Hal yang direncanakan dalam pendistribusian hasil tangkapan yaitu dengan menjualnya secara langsung yang dilakukan oleh nelayan dipasar. Jika hasil yang didapatkan sedikit maka mereka akan menampung terlebih dahulu di keramba yang sudah disiapkan dirumah.

Dari pemaparan perencanaan diatas masyarakat masih menggunakan metode sederhana atau biasa yang bisa kenal dengan metode penangkapan secara tradisional. Sehingga setiap harinya dalam penangkapan ikan tidak dapat ditarget berapa yang harus dibawa pulang untuk dijual dipasar, sehingga hasil yang diperoleh dalam penjualanpun tidak maksimal.

2. Pemanfaatan

Dalam pemanfaatan sumber daya alam laut sendiri masyarakat belum memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam laut tersebut dikarenakan masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pemanfaatan sumber daya alam laut. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kurangnya budi daya ikan, kurangnya produksi hasil tangkapan padahal dalam program pemerintah Kota Jayapura terdapat beberapa program hasil tangkapan, seperti pembiatan ikan asar (ikan asap),

menjadikan ikan tangkapan menjadi ikan kaleng, menjadikan pesisir sebagai tempat wisata, sebagai transportasi laut¹³⁹

Secara tidak langsung dalam pemanfaatan harus mengoptimalkan guna atau faedah yang terdapat di alam khususnya pada sumber daya alam laut, pemanfaatan bukan berarti mengeksploitasi tanpa melestarikan dan menjaga sumber daya alam, melainkan pemanfaatan yang diimbangi dengan pelestarian sumber daya alam yang ada agar dimasa datang anak dan cucu masih dapat merasakan sumber daya alam tersebut.

Dalam undang-undang pemanfaatan sumber daya kelautan dapat dilihat dalam Bab VI tentang Pengelolaan Kelautan, Pasal 14 ayat 2 Undang-undang tentang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014 yang berbunyi : “Pemanfaatan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dapat meliputi : Perikanan, Energi dan Sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan Sumber daya non konvensional”.¹⁴⁰

Jadi dari Undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam laut tersebut kita dapat mengetahui kriteria apa saja yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya alam laut, tetapi hal tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan yang sangat banyak pasti memerlukan yang namanya sumber daya alam. Dari dalam manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup baik dari segi sandang, pangan dan papan. Dari segi

¹³⁹ Renstra Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, 2014 hal. 6

¹⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Bab VI, Pasal 14, Ayat 2, hal. 7, Tahun 2014

sandang, manusia dapat memanfaatkan binatang untuk di jadikan barang-barang olahan lain dengan contoh kulit yang dijadikan pakaian, sutra dari ulat sutra yang dapat dijadikan benang sehingga dapat dijadikan sebuah kain untuk menutupi anggota tubuh manusia. dari segi pangan, manusia dapat menjadikan bahan makanan pokok maupun laut pauk. Dari segi papan, manusia dapat memanfaatkan sebagai bangunan untuk dijadikan tempat melindungi diri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Mu'minin ayat 19 – 21 yang menjelaskan bahwa sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.

”Maka Kami timbulkan di dalamnya kebun-kebun untuk kamu, dari kurma dan anggur-anggur. Dan untuk kamu pula buah-buahan bermacam-macam banyaknya dan dari padanyalah kamu makan”. “dan pohon kayu yang keluar dari bukit Thursina, tumbuh dengan minyak dan bumbu campuran untuk orang-orang makan”. “ dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak adalah sesuatu yagn patut kamu ambil ibarat Kami beri minum kamu dari dalam perutnya da nada pula yang manfaatnya banyak sekali untuk kamu, dari padanya pula kamu semua makan”. (Q.S. Al-Mu'imun ayat 19-21)¹⁴¹

Dari ayat tersebut di atas, maka hal tersebut sebagai petunjuk kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan manusia harus berusaha untuk menjaga alam agar alam tidak rusak akibat ulah manusia itu sendiri.

3. Pengawasan

Dalam hal ini perlu diadakan baik dari pihak Permerintah selaku pejabat Negara dan Tokoh Masyarakat yang ada di wilayah atau kawasan Kampung Enggros serta masyarakat sendiri sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam laut tersebut.

¹⁴¹ Al-Qur'an Terjemah, Qur'an Surat Al-Mukminun ayat 12-21

Pemerintah yang bertugas membuat regulasi tata kelola dalam hal ini yaitu laut maka diberi kewajiban untuk mengayomi masyarakat serta memberikan dampak positif yaitu menuju masyarakat yang sejahtera dari segi perekonomian.

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat sangat berdampak pada keseharian masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi masyarakat meskipun tidak setiap kali diawasi oleh Tokoh adat tetapi dengan kesadaran diri mereka sendiri mampu menjaga alam agar tetap lestari karena pengaruh dari budaya mereka yang dianut.

Dalam upaya pengawasan ini, dalam Islam bukan berarti di awasi oleh makhluk saja tetapi memiliki prinsip pengawasan yang dilakukan Sang Khalik sehingga dalam pengimplementasiannya mampu selaras dengan tujuan syariah itu sendiri yaitu untuk mencapai kemaslahatan.

Pengawasan dilakukan oleh seorang pemimpin dalam tataran makhluk sehingga ada yang mengawasi dalam dunia ini agar mampu menjalankan rencana-rencana yang disusun dan di evaluasi agar menjadi lebih baik, dan mereka juga percaya dengan adanya hari akhir dengan berkata *“tidak ada harta yang di bawa mati, kenapa harus pelit sama orang, kalo kita punya ya sama-sama kitong pake to”* itulah ungkapan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat mereka sangat mengenal saling membantu, gotong royong, tidak mudah iri, dengki, saling menjalin ukhuah.

Hal itu lah yang menjadi faktor tujuan hakiki, dengan adanya pengawasan yang disadari bukan hanya pengawasan dari makhluk tetapi juga di sadari bahwa

ada pengawasan yang lebih haq yaitu pengawasan dari Tuhan YME. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 1 :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

“*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”(Q.S. An-Nisa' : 1).

4. Pengendalian

Pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja agar rencana yang telah dibuat dapat sesuai atau searah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam masyarakat pengendalian secara keseluruhan diatur oleh hukum adat dan hukum pemerintah tetapi dominan masyarakat menggunakan hukum adat, hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam secara keseluruhan. Jika kontrol dalam pengelolaan sumber daya alam secara individu maka kontrol yang dilakukan yaitu dengan cara menjaga dan menerapkan hukum adat tersebut seperti : mengembalikan ikan yang masih kecil agar dapat berkembang, tidak menggunakan racun/pukat dalam penangkapan ikan.

Dari paparan di atas kita dapat melihat bahwa, pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokal dengan menjaga tradisi nenek moyang yang ada tanpa merusak lingkungan dan alam sekitar.

Dalam kasus ini ternyata terdapat kekurangan-kekurangan yaitu :

- Dengan sumber daya alam yang melimpah maka manusia akan selalu bergantung terhadap sumber daya alam tersebut yang mengakibatkan kurangnya etos kerja
- Masyarakat merasa berada di zona nyaman tanpa merubah pola hidup

- Tidak ada simpanan untuk berjaga-jaga di masa yang akan datang dikarenakan masyarakat masih beranggapan alam masih dapat memberi kepada mereka.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan sumber daya manusianya yang dikarenakan faktor internal dan eksternal. Di satu sisi terdapat hal positif yaitu dengan adanya penerapan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal maka sumber daya alam tersebut dijadikan sahabat dengan cara menjaga tanpa merusak berbeda dengan adanya prinsip yang menguasai, jika masyarakat beranggapan bahwa sumber daya alam hanyalah sebatas hal yang dijadikan sebagai alat maka sumber daya alam tersebut hanya diambil manfaatnya tanpa dilakukan perlindungan dan perawatan.

Dengan adanya kasus tersebut maka kita dapat mengetahui hal positif maupun hal negatif yang terdapat dalam pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat dengan upaya pengelolaan kearifan lokal terkhusus masyarakat Papua Port Numbay.

Terjadinya ketidak seimbangan antara sumber daya alam yang melimpah dan kesejahteraan ekonomi disebabkan karena faktor kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan potensi yang ada karena sudah sudah berada pada zona nyaman dengan keadaan yang ada secara turun temurun.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menemukan beberapa hal atau aturan yang diterapkan dalam masyarakat, meskipun tidak tertulis tetapi mampu diterapkan berdasarkan kebiasaan masyarakat asli Papua khususnya masyarakat Asli Port Numbau Kapung Enggros Kota Jayapura. Hal tersebut diantaranya :

- Orang yang mencari ikan di wilayah tersebut harus meminta izin kepada tokoh masyarakat atau orang yang di tetuakan dalam masyarakat yaitu ondoafi.
- Tidak diperbolehkan mencari ikan dengan menggunakan pukot/bom untuk melindungi ekosistem dibawah laut.
- Jika mendapatkan ikan yang masih kecil maka akan mengembalikannya kembali agar dapat berkembang biak.
- Pria/laki-laki dilarang mencari bia (kerang) dikawasan bakau, hal tersebut dikarenakan sebagai penghasilan khusus bagi wanita.
- Tidak diperbolehkan mencari ikan satu minggu sebelum pesta adat, masyarakat hanya diperbolehkan mencari hanya untuk sekedarnya saja atau sebagai lauk dan tidak diperbolehkan ditangkap untuk dijual.
- Menjaga mangrove untuk melestarikan habitat yang ada di hutan mangrove tersebut.

Dalam upaya menjaga keseimbangan pelestarian lingkungan, kearifan lokal yang diharapkan mampu mengendalikan dalam hal untuk melestarikan sumber daya alam yang diharapkan mampu menyelaraskan antara pelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut terdapat dalam Jurnal dengan judul *Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Pesisir* yang ditulis oleh zulkarnain dkk, mengatakan bahwa :

“perilaku masyarakat sebagai sebuah kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan diproyeksikan dengan cara yagn sesuai dengan pola piker dan tradisi setempat, diharapkan mampu memunculkan konsep dan cara menjaga keseimbangan pelestarian lingkungan, berbagai makna tabu/mitos

*dapat mengungkap beberapa pesan yang memiliki makna sangat besar bagi pelestarian lingkungan khususnya sumber daya pesisir.*¹⁴²

Dalam tradisi adat masyarakat khususnya masyarakat Kampung Enggros terdapat beberapa mitos diantaranya jangan membalikkan bintang laut nanti akan turun hujan, mitos tersebut sebenarnya hanya sebuah mitos tetapi sudah menjadi kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat tidak membalikkan bintang laut.

Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih logis, maka disitulah terdapat sebuah makna arti “jangan membalikkan bintang laut” jika membalikkan bintang laut maka bintang laut akan mati karna tidak dapat mencari makan, sebuah konsep sederhana tapi berhasil untuk digunakan dalam penerapan untuk melestarikan keanekaragaman dibawah laut.

Seharusnya dengan adanya potensi sumber daya alam mampu mendorong perekonomian masyarakat sekitar seperti yang terjadi pada masyarakat nelayan Laskar Laut pada penelitian *Badriyah Djula*. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa sumber daya alam merupakan aspek pendorong untuk bekerja lebih giat serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari¹⁴³, bukan malah sebaliknya menjadikan melemahnya etos kerja dalam memenuhi kebutuhan dikarenakan beranggapan bahwa alam yang ada masih mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Kampung Enggros termasuk pengelolaan sumber daya alam laut secara

¹⁴² Zulkarnain dkk, *Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Pesisir*, Jurnal Agribisnis Kerakyatan, Vol.1, 2012, hal. 1

¹⁴³ Badriyyah Djula, *Penelitian Sumber Dya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo, 2009. Hal. 8

tradisional dikarenakan campur tangan pemerintah yang tergolong masih rendah, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana atau tradisioan, ekologi dan ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal.

Hal tersebut dapat dilihat pada pendapat Nikjululuw yaitu dengan dikatakan bahwa pengelolaan tradisional ini, tingkat pengetahuan dan teknologi masyarakat sendiri masih rendah, disini campur tangan pemerintah dalam pengelolaan juga masih rendah, sehingga kondisi teknologi, ekonomi dan ekologi bisa dikatakan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sumber daya perikanan. Namun kondisi untuk analisis sosial dan etikanya cukup bagus. Hal ini dikarenakan kepercayaan dan adat masyarakat dna budaya yang berlaku di masyarakat setempat masih sangat kuat.¹⁴⁴

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam laut Masyarakat Asli Papua Dalam Kajian Maqasid Syariah

Tujuan utama dari syari'at adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan. Segala sesuatu yang melindungi lima unsur tersebut, maka harus dilakukan. Sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia mengatakan bahwa syari'ah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syari'ah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidak

¹⁴⁴ Nikjululuw, V.P.H, *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, Jakarta : Kerja Sama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT Pustaka Cidesindo, 2002, hal 43

adilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syari'ah, meskipun hal itu diklaim sebagai suatu interpretasi yang benar.¹⁴⁵

Dalam hal memanfaatkan kekayaan alam ini sehingga ada batasan atau dalam arti tidak boleh semena-mena saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam, baik yang didarat maupun di laut harus dilakukan secara proposional, professional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya.

Dalam hal ini Allah telah memperingatkan didalam Qura'am Surat Al-A'raf : 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)
 “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A'raf : 56)

Menurut ali Yafie yang dikutip oleh Ahmad Mas'ari mengatakan bahwa terdapat dua landasan dasar dalam pengelolaan lingkungan yaitu :¹⁴⁶

- Pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sisi sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

¹⁴⁵ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 41

¹⁴⁶ Ahmad Mas'ari, *Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, ISSN : 2579-5406, 2017, hal. 719

- Melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan dewasa (baligh). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Tujuan utama dari syari'ah adalah untuk mendorong kesejahteraan atau masalah manusia yang terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Segala sesuatu yang melindungi lima unsur kepentingan public tersebut, maka dianjurkan dilakukan. Sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan.

Pengertian masalah sendiri yang dikatakan oleh Jalal Al-Din Abd Al-Rahman yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia berkata secara etimologi masalah adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia. Sedangkan secara terminology yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia.¹⁴⁷

Izz Abd Al-Salam menyatakan, mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan suatu kewajiban bagi manusia. namun dalam praktiknya, mewujudkan kemaslahatan mengalami keragaman, karena sebagian dari kemaslahatan atau kerusakan hanya bisa dipahami oleh ilmuan yang ahli di dalam bidangnya, dan sebagian lain bisa dipahami oleh seluruh manusia. Begitupun

¹⁴⁷ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 41

pendapat Abu Zahrah menyebutkan bahwa cara untuk mengetahui masalah sebagian telah jelas, dan sebagian lainnya belum jelas.¹⁴⁸

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fikih menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima unsur pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan dan kelima unsur tersebut merupakan bagian dari *dlaruriyat*, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membaga kerusakan bagi manusia.

Untuk mencapai kemaslahatan kepada manusia untuk menjadi hamba yang mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat sehingga ada pembagian kebutuhan yaitu kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiah* dan *tahsiniyah*. Sedangkan lima unsur yaitu tentang menjaga agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan termasuk kedalam kebutuhan *dlaruriyah*, jika tidak terpenuhi maka tidak akan terpenuhi tujuan hidup yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat karena kebutuhan *dlaruriyah* menjadi pokok dari kehidupan ini.

1. Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdz ad-Diin*)¹⁴⁹

Hifdz ad-Din dalam terminology al-ghazali dan al-syatibi, memiliki akar pada hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar. Namun akhir-akhir ini, teori yang sama untuk *maqasid hukum islam* tersebut di interpretasikan ulang

¹⁴⁸ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, hal. 51

¹⁴⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001 hlm. 44

menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu perihal kebebasan berkeyakinan (*freedom of faith*) menurut istilah Ibnu ‘Asyur.¹⁵⁰

Tujuan dari menjaga agama merupakan sebab alasan sebagai bentuk berdakwah umat muslim, bermuamalah secara islami dan melaksanakan jihad apabila ada yang merusak agama islam.¹⁵¹

Inilah yang dilakukan oleh ‘Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab kepada penduduk Eliya. Beliau memberikan jaminan keamanan untuk jiwa, harta, gereja. Biarawan dan agama mereka dan terpenting tidak ada paksaan dalam memeluk agama.¹⁵²

Islam telah menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agamanya dan madzhab yang diaturnya. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam beragama, atau meninggalkannya untuk tujuan agama yang lain, dan juga tidak boleh memberi tekanan untuk berpindah agama. Allah SWT berfirman di dalam Al-qur’an Surat Al-Baqarah : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. AL-Baqarah : 256)

¹⁵⁰ Jasser Auda, *Membumikan Maqashid Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Edisi ke-3, (Bandung: Mizan, 2008), hal. 59

¹⁵¹ Kuncoro Hadi, *Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami*, Jurnal Al-Azhar Seri Prananta Sosial, Vol. 1. No. 3 (Jakarta: Maret, 2012), hal. 145

¹⁵² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Khikmawati (Penerj), *Maqashid Syariah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: AMZAH, 2009), hal.3

Begitu pula seperti yang dipertegas didalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 99 :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩)

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. (QS Yunus : 99)

Dalam konteks masyarakat asli Papua khususnya masyarakat kampung Enggros adalah mayoritas beragama Nasrani dengan demikian maka dalam penjagaan agama mereka berkeyakinan Nasrani dengan menghormati agama-agama lainnya bahkan jika ada yang berpindah agamapun mereka tidak melarang atau menekan hal itu terjadi terhadap anak seorang sekertaris desa yang melanjutkan pendidikan di daerah Jawa dengan menjadi seorang mualaf dan mereka pun membolehkan dengan beranggapan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan melarang keburukan dan keyakinan beragama merupakan sebuah prinsip yang harus dihormati.

Dengan demikian, inilah bentuk jihat dari seorang muslim yang sesungguhnya menebarkan kebaikan tanpa memaksakan keyakinan kepada siapapun karena hidayah merupakan anugrah dari Allah SWT tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksakan.

Islam pula datang ke muka bumi d\untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya menjadi rahmat untuk Islam itu saja tetapi menjadi rahmat bagi seluruh alam yang tercermin didalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya : 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam (Q.S. Al-Anbiya :107)

Dengan demikian, dalam penjagaan agama ini dalam penerapannya yaitu agar kita mampu memberikan nasihat kebenaran kepada mereka dan tanpa adanya paksaan untuk meninggalkan keyakinan mereka, karena Islam bukanlah agama paksaan untuk mengikuti agama Islam tersebut.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs)¹⁵³

Islam tidak hanya memberikan perhatian terhadap keyakinan (agama), melainkan memberikan juga perhatian hidup, dalam hal ini jiwa setiap manusia. Hal yang paling utama diperhatikan dalam islam adalah kehidupan atau jiwa. Islam memberikan perhatian utama terhadap hak hidup (jiwa), dikarenakan hidup merupakan hak yang suci dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, sebab manusia merupakan ciptaan Allah SWT.¹⁵⁴ Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Naml (27): 88

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٨٨)

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS: An-Naml (27): 88)

Sudah sangat jelas hikmah Allah SWT dalam menciptakan manusia dengan fitrahnya sebagai manusia, lalu Allah SWT menjadikan dan menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuh yang Dia kehendaki.

¹⁵³ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001 hlm. 48

¹⁵⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hal. 21

Adapun tingkatan kebutuhan sebagai berikut :¹⁵⁵

Pada tingkatan *Dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berupa makanan, yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jika kebutuhan pokok tersebut diabaikan maka eksistensi jiwa manusia akan terancam.

Pada tingkatan *Hajiyyat*, seperti diperbolehkannya untuk berburu dan menikmati makanan yang lezat, tentunya dengan binantang dan cara yang halal. Jika ini tidak dilakukan maka eksistensi manusia tidak akan terancam, akan tetapi dapat mempersulit hidupnya.

Pada tingkatan *Tahsiniyyat*, seperti ditetapannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini berhubungan dengan etika dan kesopanan. Jika ini tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, akan tetapi dapat mempersulit hidup seseorang.

Dalam penerapannya masyarakat Kampung Enggros Kota Jayapura mampu menerapkan perlindungan jiwa ini, dengan mencermintak aktifitas pengelolaan sumber daya alam yang ada dengan mencari kebutuhan jiwa melalui pencarian ikan meskipun menggunakan alat yang sederhana atau tradisional yang hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari saja.

3. Perlindungan Terhadap Akal (HifdAl-Akl)¹⁵⁶

Allah SWT menciptakan manusia disertai dengan akal. Tujuan diciptakannya akal adalah untuk digunakan sebagai sarana berpikir manusia untuk

¹⁵⁵ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Nur Hidayah (Editor), Cetakan ke-1, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011) hal. 166

¹⁵⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001 hlm. 49

mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan *maslahat*. Akal merupakan sumber hikmah (Pengetahuan) dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.¹⁵⁷

Dengan adanya akal manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.

Dalam penerapannya masyarakat Kampung Enggros mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan dengan proses perencanaan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui konsep kearifan lokal setempat yang menjaga budaya dan tradisi setempat.

4. Perlindungan Terhadap Keturunan (Hifdz an-Nasl)¹⁵⁸

Dalam konteks perlindungan terhadap keturunan atau menjaga keturunan dari segala bentuk yang tidak diinginkan, sehingga dalam hukum Islam tidak diperbolehkan menikahi keluarga sedarah, sesusuan dan harus memilih yang baik-baik untuk menjaga keturunan keluarga tersebut.

Untuk mendapatkan keluarga yang baik-baik bukan secara dhahirnya saja diatur tetapi melalui batinpun diatur, sehingga terdapat larangan untuk berzina dan di sunnahkan untuk menjalankan pernikahan bagi yang telah mampu.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' : 32 Allah SWT telah tegas melarang perbuatan zina dengan firman-Nya :

¹⁵⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hal. 91

¹⁵⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001 hlm. 50

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al-Isra’ : 32)

Dan didalam Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 33 Allah SWT berfirman :

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S. An-Nur : 33)

Dari ayat diatas dikatakan untuk menjaga kesucian jika belum mampu untuk melaksanakan pernikahan dan kita harus meyakini bahwa Allah akan memampukan setiap hambanya.

Dari perintah untuk menjaga kesucian ini sendiri maka mengandung arti agar kita menjaga keturunan sebagai pewaris dalam keluarga bukan hanya berupa harta dna benda melainkan menjadi pewaris dengan memegang teguh perintah-perintah Allah yang telah ditetapkan dan menjauhi segala larangan sebagai bentuk pengabdian antara makhluk dan Sang Pencipta yaitu Allah SWT.

Nasab merupakan fondasi utama dalam keluarga untuk menghubungkan satu keluarga dengan keluarga lainnya. Oleh karenanya itu islam memberikan

perhatian yang lebih untuk melindungi nasab atau keturunan dari setiap manusia. dengan ini umat manusia diharapkan dapat memperbaiki kualitas keturunan, dan diharamkannya zina dan perkawinan sedarah.¹⁵⁹

Setelah mencari pasangan dan mendapatkan keturunan maka tugas selanjutnya adalah memberikan pendidikan dan risky yang halal kepada keluarga.

Hal tersebut terkandung di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. An-Nisa : 34)

Dengan demikian kita mengetahui bahwa Islam telah memberikan rambu-rambu dalam kehidupan ini jauh sebelum manusia berada dalam era modernisasi dengan tujuan utama yaitu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam hal menjaga keturunan ini masyarakat asli sama seperti umat Islam yaitu melakukan perkawinan untuk mendapatkan keturunan agar mampu melanjutkan kehidupan dan mengelola alam yang telah diberikan kepada manusia

¹⁵⁹ Kuncoro Hadi, *Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami*, Vol. 1. No. 3. Jurnal AL-AZHAR Indonesia, hal. 144

dan mereka juga mencari nafkah disiang hari untuk mencukupi kebutuhan dan mencari uang yang halal untuk diberikan kepada keluarga-keluarga mereka serta memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka agar mampu menggapai masa depan yang lebih baik dari orang tua.

Hal itu lah yang diucapkan semua orang tua agar anaknya menjadi lebih baik dari mereka sendiri, dan mengajarkan suri tauladan kepada anak-anak mereka dengan salah satu contoh yaitu menghormati tamu yang datang berkunjung dan bersikap ramah.

Meskipun mereka mayoritas bukan beragama Islam tetapi sebagian dari perilaku masyarakat mencerminkan sikap Islami yang muda menghormati yang lebih tua, bersikap gotong royong saling membantu, dan lain sebagainya.

5. Perlindungan Terhadap Harta (Hifdz Al-Maal)¹⁶⁰

Dalam kehidupannya manusia tentunya berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya. Salah satunya yaitu ingin memiliki harta yang sebanyak-banyaknya. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦)

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S. Al-Kahf : 46)

Tujuan manusia mencari harta dalam hidupnya tidak lain adalah ingin menampakkan eksistensinya dan menambah kenikmatan. Akan tetapi, semua

¹⁶⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001 hlm. 52

motivasi tersebut haruslah sejalan dengan cara mendapatkannya. Menggunakan cara yang halal, dipergunakan untuk cara yang halal, dan harta dikeluarkan sebagian untuk digunakan pada jalan Alah SWT. Dalam menikmati hartanya, manusia harus menghindari dari sifat pemborosan. Efek dari sifat berlebihan akan dapat dirasakan oleh tubuh manusia.

Islam juga telah mengatur tentang menghasilkan harta, yaitu dengan bekerja dan mewariskan hartanya. Seorang muslim tidak diperkenankan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT berfirman di dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 188).

Perlindungan terhadap harta Nampak dalam dua hal berikut:¹⁶¹

- a. Memiliki hak untuk dijaga dari para mushnya, baik dari tindakan pencurian, perampasan, perampokan, dan tindakan lain yang mengancam keberadaan harta.
- b. Harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

¹⁶¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hal. 171

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah (5) 90)

Keberlangsungan sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap ulah manusia itu sendiri, jika tidak dikendalikan maka alam akan rusak bahkan musnah yang dapat menimbulkan beberapa bencana dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap manusia itu sendiri, sehingga pembahasan mengenai *Hifdz Bi'ah* sangatlah penting demi menjaga keseimbangan alam dan sebagai kewajiban manusia yang diutus oleh Allah sebagai Khalifah di muka bumi ini. Sehingga peneliti melakukan pembahasan mengenai *Hifdz Bi'ah*.

6. Perlindungan terhadap alam (*Hifdz Bi'ah*)¹⁶²

Dalam buku Fiqh Lingkungan (fiqh bi'ah) terdapat beberapa pendapat berdasarkan al-qur'an bahwa manusia itu di jadikan khalifah dimuka bumi untuk bertugas dan bertanggung jawab merawat, memelihara, melestarikan berbagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Memang Allah telah membolehkan manusia untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini sebagai sumber rizki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya.¹⁶³

Al-Qur'an telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi, sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (QS. Al-Rahman:

¹⁶² KH. Drs. Ashari Abta, *Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan*, Fiqh Bi'ah, 2008, hal.77

¹⁶³ KH. Drs. Ashari Abta, *Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan*, Fiqh Bi'ah, 2008, hal.77

10). Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, karena hal itu adalah amanah Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dengan kata lain, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Karenanya, untuk menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan harus terus dilakukan. Dalam upaya penjagaan lingkungan ini ada beberapa yang perlu diperhatikan sebagai petunjuk atau alasan penjagaan terhadap lingkungan itu harus dilakukan yaitu :¹⁶⁴

1. Rekonstruksi makna Khalifah

Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah/2: 30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A'raf/7: 56).

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak

¹⁶⁴ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (Q.S. Al-A'raf : 56)¹⁶⁵

2. Ekologi sebagai doktrin ajaran

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*). Karena memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).¹⁶⁶

3. Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufr al-bi'ah).

Merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shad/38: 27).

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka". (Q.S. Shad : 27)

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini (QS. Ibrahim/14: 7).

¹⁶⁵ Al-Qur'an Terjemah, Qur'an Surat Al-A'raf : 56

¹⁶⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hlm. 44

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S. Ibrahim : 7)¹⁶⁷

Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku perusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*) seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadist :¹⁶⁸

“Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka mereka pun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya”.

Dalam penerapannya masyarakat Kampung Enggros mencari harta dengan jerih payah melalui bekerja mencari ikan di laut untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk mengeluarkannya masyarakat terkadang enggan berfikir lebih jauh untuk di investasikan dimasa yang akan datang sebagai simpanan melainkan pola hidup yang tidak bisa mengatur keuangan itulah yang menyebabkan dampak negatif terhadap diri mereka sendiri, meskipun tidak semua masyarakat bersikap demikian tetapi kebanyakan dari masyarakat memiliki pola hidup yang sama yaitu untuk mendapatkan sesuatu mereka harus bekerja dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di hari yang sama, meskipun terdapat faktor lain

¹⁶⁷ Al-Qur'an Terjemah, Qur'an Surat Ibrahim : 7

¹⁶⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hlm. 4

tetapi dalam kesempatan ini peneliti hanya meneliti tentang cara pengelolaan yang mereka lakukan dan dari penelitian tersebut peneliti mendapatkan hasil yaitu dikarenakan pola hidup masyarakat yang merasa berada di zona nyaman mereka, sehingga tidak ada perubahan yang mencolok dalam kesejahteraan perekonomian khususnya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat Asli Papua

Masyarakat Asli Papua Khususnya masyarakat Port Numbay Kampung Enggros sebelum melakukan pengelolaan sumber daya alam maka yang paling penting adalah mengenai tentang kepemilikan sumber daya alam laut tersebut dan mereka menganggap bahwa laut yang ada adalah titipan Tuhan yang diberikan dan semua berhak atas laut tersebut tetapi dalam kearifan lokal setempat maka orang yang ingin melakukan pencarian di harapkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada kepala suku setempat agar tidak salah paham dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan saat pencarian ikan tersebut.

Masyarakat menganggap bahwa alam adalah ibarat ibu yang mampu memberikan kasih sayang, memberi makan sampai kapanpun sehingga dalam kepercayaan mereka menjaga alam sama halnya merawat seorang ibu yang telah melahirkan.

Adapun larangan-larangan atau pantangan oleh masyarakat dalam kepercayaan mereka untuk menjaga alam adalah sebagai berikut :

- Tidak diperbolehkan mencari ikan dengan menggunakan pukot/bom.
- Mengembalikan ikan yang tertangkap apabila masih kecil
- Dalam suku tertentu dilarang membuat keramba
- Kaum lelaki dilarang untuk mencari bia (kerang) di hutan bakau/mangrove

- Jika menggunakan alat tradisional semua harus menggunakan alat tradisional, jika ada yang menggunakan alat tangkap modern maka jangan bergabung di wilayah tangkapan nelayan tradisional.
- Tidak diperbolehkan mencari ikan satu minggu sebelum dimulai pesta adat.
- Pantangan untuk merusak mangrove sebagai tempat habitat bia (kerang)

Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pengelolaan tradisional dalam hal itu dapat dilihat dari kurangnya ikut campur pemerintah, kurangnya pengetahuan dan teknologi, sehingga alat-alat yang digunakan dalam pengelolaanpun hanya sebatas alat-alat tradisional. Tetapi dengan pengelolaan tradisional ini mereka mendapatkan nilai positif dari kehidupan sosial mereka. Jadi wajar jika untuk perkembangan perekonomian sangat sulit atas alasan tersebut di atas

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Masyarakat Asli papua dalam Kajian Maqasid Syariah

Islam datang sebagai rahmat untuk seluruh alam ajaran Islam dalam hal muammalah tidak hanya digunakan oleh orang Islam saja melainkan dapat digunakan oleh non muslim sekalipun, dalam hal ini penerapan maqasid dalam pengelolaan sumber daya alam laut yang dilakukan oleh masyarakat asli papua adalah sebagai berikut :

- Penjagaan terhadap agama, dalam hal ini masyarakat yang mayoritas non muslim dalam penjagaan agama mereka menerima siapapun dengan latar belakang apapun dan dengan agama apapun untuk datang ke tempat mereka, sehingga tercipta kedamaian dalam segi sosial, ekonomi maupun politik.

- Perlindungan terhadap jiwa, masyarakat menerapkan dalam perlindungan jiwa ini berupa aktifitas untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup.
- Perlindungan terhadap akal, masyarakat juga menerapkan perlindungan akal dengan upaya memaksimalkan segala sesuatu berdasarkan akal. Hal tersebut tercermin dari sikap persiapan dalam memulai pencarian ikan untuk mencapai hasil yang di inginkan dan menjaga tradisi kearifan lokal.
- Perlindungan terhadap keturunan, masyarakat setempat juga melakukan pernikahan untuk mendapatkan keturunan sebagai pewaris yang mampu melanjutkan generasi mereka. Masyarakatpun tidak segan-segan untuk mendidik, menyekolahkan kejenjang yang lebih tinggi bahkan sampai bangku perkuliahan mereka beranggapan bahwa agar anak-anak mereka atau keturunan mereka tidak menjadi seperti mereka dan mereka berhadap agar keturunannya melebihi orang tuanya sendiri.
- Perlindungan harta, dalam hal ini terdapat dua unsur dalam perlindungan harta yaitu : memiliki hak untuk dijaga dari para mushnya, baik dari tindakan pencurian dan lain-lain serta harta tersebut dipergunakan dalam hal-hal yang tidak bersifat mubazir. Hal inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam menjaga hartanya mereka kurang memperhatikan harta tersebut digunakan untuk apa saja sehingga pengeluaran tidak dapat dikontrol dengan baik sehingga mengakibatkan besar pasak dari pada tiang atau besar pengeluaran dari pada pemasukan sehingga masyarakat terkendala dalam kesejahteraan perekonomian meskipun alam menyediakan lebih dari cukup kepada masyarakat.

- Penjagaan terhadap lingkungan, hal ini sangat diperlukan karena dengan menjaga alam dan melestarikannya secara tidak langsung maka akan berdampak pada manusia itu sendiri. Hal tersebut telah dilakukan oleh masyarakat asli Papua.

Dengan demikian maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya alam sangat cocok atau baik jika dilakukan dengan budaya atau tradisi yang menanamkan prinsip tanpa paksaan yang mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat, tetapi pengelolaan yang tradisional ini menimbulkan dampak negatif yaitu sulitnya perkembangan perekonomian di masyarakat.

B. Saran

Dalam upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama maka harus ada sinerginitas baik dari kalangan pemerintah selaku pejabat setempat, tokoh masyarakat, dan masyarakat untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam mencapai kesejahteraan bersama.

1. Pemerintah, dalam hal ini selaku pemegang kekuasaan di suatu wilayah maka pemerintah diharapkan mampu untuk memberikan program-program yang baik serta membimbing masyarakat agar mampu mensejahterakan dalam hal perekonomian dan menerima masukan-masukan yang sedang terjadi didalam kehidupan penduduk setempat.
2. Tokoh Agama, tokoh agama dalam hal ini agar terus mendakwahkan berkaitan tentang penjagaan terhadap alam agar pelestariannya tetap terjaga sebagai

bentuk khalifah dimuka bumi yang menjaga bukan merusak dan tujuan akhir yaitu untuk kemaslahatan bagi orang banyak.

3. Tokoh masyarakat, tokoh masyarakat sebagai panutan agar mampu menciptakan suasana kondusif antara pihak-pihak terkait dalam hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada sehingga masyarakat mampu memanfaatkan dan mencapai kesejahteraan.
4. Masyarakat, sebagai masyarakat seharusnya memberikan masukan terhadap pemerintah agar berusaha menjadi yang terbaik untuk keberhasilan bersama serta menerima dan menjalankan program-program yang telah dikembangkan oleh pemerintah setempat agar mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang ada tanpa merusak sumber daya alam tersebut.
5. Peneliti, untuk peneliti selanjutnya agar mampu menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab kurang sejahteranya masyarakat asli Papua dengan potensi sumber daya alam yang begitu melimpah. Dikarenakan penelitian ini hanya menggali tentang pengelolaan sumber daya alam laut yang dilakukan di Kampung Enggros tanpa menggali lebih jauh tentang faktor-faktor lain yang menyebabkan kurang sejahteranya masyarakat asli Papua.
6. Bagi para ahli atau tokoh dalam bidang keilmuan Maqasid, seyogyanya mampu mendiskusikan dan mengkaji ulang berkaitan dengan maqasid Hifdz Bi'ah (penjagaan terhadap alam). Agar alam ini mampu dijaga demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, 2011

Abidin, Munirul, *Unsur-Unsur Kerangka Berpikir (Dalam Perkuliahan Seminar Proposal)*, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), Pada 11/11/2016

Abta, Ashari, *Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan*, Fiqh Bi'ah, 2008

Al-Mursi, Ahmad Husain Jauhar, Khikmawati (Penerj), *Maqashid Syariah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: AMZAH, 2009),

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, Mesir : Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Juz II,

Al-Qardhawi, Yusuf, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001

Alwisol, *Pikologi Kepribadian*, UMM Pres, Malang, 2007

Auda, Jasser, *Membumikan Maqashid Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Edisi ke-3, Bandung: Mizan, 2008

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2009)

Creswell, John W, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, *Penelitian Qualitative & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Edisi III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015)

Erani, Ahmad Yustika, *Ekonomi Kelembagaan (paradigm, teori dan kebijakan)*, Erlangga, Jakarta, 2013,

Etty, Riani, *Pengelolaan Sumberdaya Teripang Pasir berdasarkan biologi reproduksinya dalam rangka mendukung perikanan berkelanjutan*, JPSSL. Vol. 1 tahun 2011, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor, 2011

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2015

Fauzia, Ika Yunita, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014

Ghoffar, M. Abdul Tafsir ibn Katsir penerjemah Em Vol 1, Pustaka Imam As-Syafi'I, Bogor, 2004,

Hafiudin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2003

- Hafiudin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2003,
- Haneef, Mohammed Aslam, *Pemikiran Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2010
- Hasibuan, Melayu S.P, *Manajemen sumber daya Manusia Pengertian Dasar, Pengertian, dan masalah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010
- Huda, Nurul,dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Kencana, 2015, hal. 1
- Karim, Adiwarman Azhar, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, III T Indonesia, 2002
- Mahmud bin Ibrahim Al-Khatib, *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy*, Dar Al-Muidz, 2003
- Mannan, M. Abdul, *Islamic Economics, Theory anf Practice*, India, Idarah Adabiyah, 1980
- Marhum Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahaadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah*, Surabaya, Daar an-Nasyr al-Misriyah
- Maslow, Abraham H., *Motivasi dan Kepribadian*, Penerjemah Nurul Imam, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1993
- Menase Robert Kambu, *Jayapura Kota di Ujung Timur*, Pemerintah Kota Jayapura/Indomedia, 2008
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2014
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2002
- Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2007
- Nasution, Mustafa Edwin, Dkk, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.70
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan*,(Jakarta: Reneka Cipta, 2002), hal. 107.
- Nizar, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Islam*, Kurnia Advertising, Pasuruan, Universitas Yudharta Pasuruan, 2012
- Partanto, Pius A., M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994
- Prastoworo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed Ke 3*, hal. 534

Qur'an Surat Al-Baqarah : 30

Ramdhan, Muhammad dan Taslim Arifin, *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Jakarta, 2013

Salam, HM. Misbahul, *Konsep Pengelolaan Dalam Fiqh Islam*, , Fiqh Bi'ah, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Cetakan Keenam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, prenada media group, Jakarta, 2005

Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, prenada media group, Jakarta, 2005

Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2000

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Nur Hidayah (Editor), Cetakan ke-1, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011

Jurnal

Aswani, Shankar, *Socioecological Approaches for Combining Ecosystem-Based and Customary Management in Oceania*, *Journal of Marine Biology*, Doi : 10.1155/2011/845385, *Department of Anthropology and IGP Marine Science, University of California, Santa Barbara, CA 93106-3210, USA*, 2011

Djula, Badriyyah, *Penelitian Sumber Dya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo, 2009

Etty, Riani, *Pengelolaan Sumberdaya Teripang Pasir berdasarkan biologi reproduksinya dalam rangka mendukung perikanan berkelanjutan*, JPSSL. Vol. 1 tahun 2011, Deparemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor, 2011

Hadi, Kuncoro *Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan*

- Islami*, Jurnal Al-Azhar Seri Prananta Sosial, Vol. 1. No. 3 (Jakarta: Maret, 2012)
- Hidayat, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, Vol. XV, No. 1, 2011
- KEHATI, *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*, Malang, 2009
- Lasabuda, Ridwan, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax vol. 1-2, ISSN : 23-02-3589, 2013
- Mangunjaya, Fachruddin M, *Islam and Natural Resource Management*, Durrell Institute of Conservation an Ecology (DICE), University of Kent, Canterbury, Kent CT27NZ, United Kingdom, 2013.
- Mangunjaya, Fachruddin M, *Islam and Natural Resource Management*, Durrell Institute of Conservation an Ecology (DICE), University of Kent, Canterbury, Kent CT27NZ, United Kingdom
- Mas'ari,,Ahmad *Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, ISSN : 2579-5406, 2017
- Riyadi, Sugeng, *Jurnal Reivnting Bank Sampah : Optimalisasi Nilai Ekonomis Limbah Berbasis Pengelolaan Komunal Terintegrasi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2016
- Suharto, Rahmad Budi, *Sumber Daya Aam Untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal : Analisis Dampak Pertambangan Batu Bara Di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur Indonesia*, Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 11, Universitas Mulawarman, 2015
- Zulkarnain dkk, *Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Pesisir*, Jurnal Agribisnis Kerakyatan, Vol.1, 2012

Peraturan dan Perundang-undangan

Fatwa MUI, Nomor 22 Tahun 2011 *Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan*, 2011

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.782/Menhut-II/2012, *Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I*

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 *Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Lingkungan Hidup*, 2009

Data Statistik

BPS Provinsi Papua 2016, *Tentang Pertumbuhan Ekonomi Papua Triwulan III-2016*

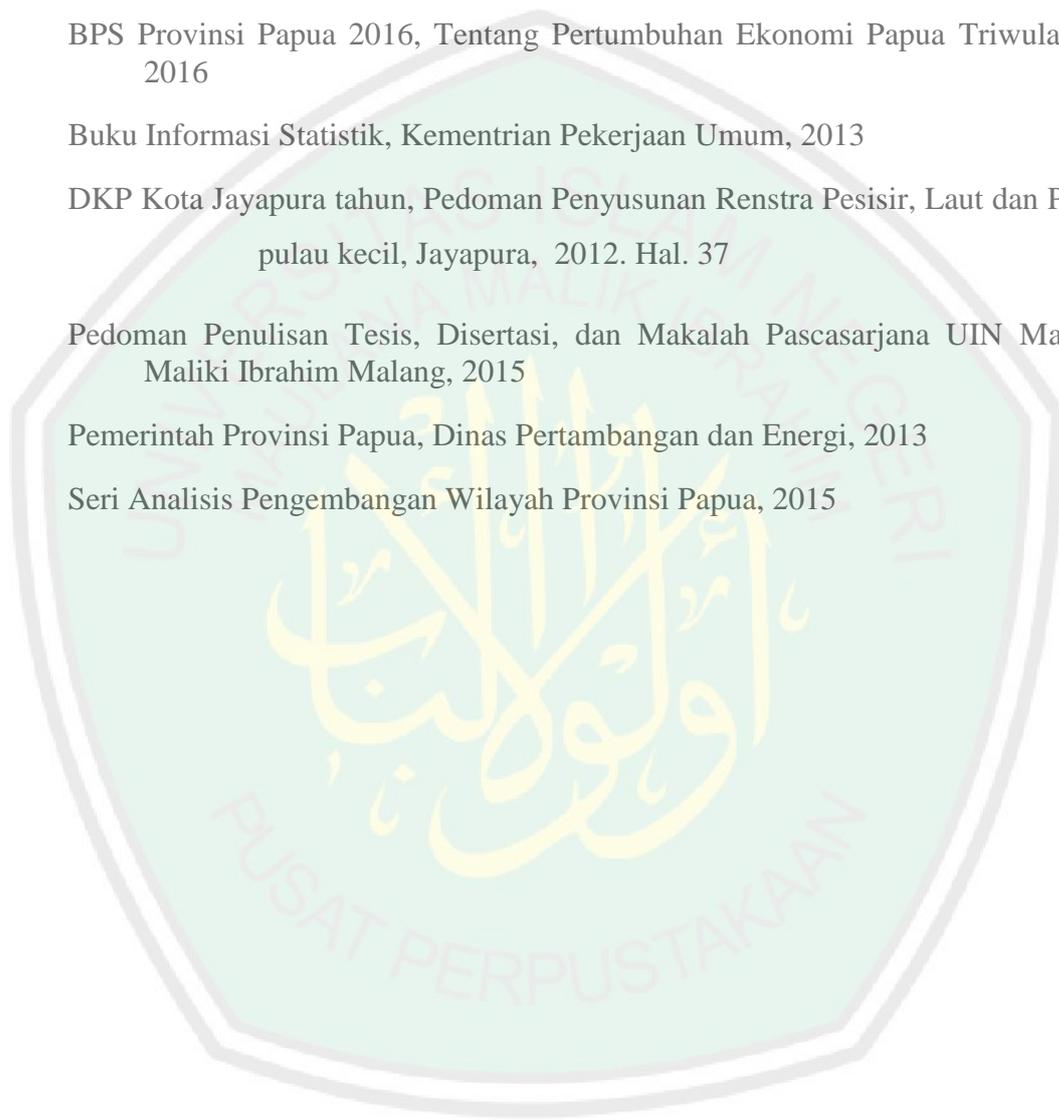
Buku Informasi Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2013

DKP Kota Jayapura tahun, *Pedoman Penyusunan Renstra Pesisir, Laut dan Pulau-pulau kecil*, Jayapura, 2012. Hal. 37

Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Pertambangan dan Energi, 2013

Seri Analisis Pengembangan Wilayah Provinsi Papua, 2015





LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp (0967) 531021

IJIN SURVEY / IJIN PENGAMBILAN DATA
Nomor : 072 /VI/ 126 /2017

Menunjuk surat Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/41/ 2017 Tanggal 21 Maret 2017 tentang Ijin Pengambilan Data, maka dengan ini memberikan Ijin Pengambilan Data kepada :

Nama : MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN
NIM : 15800003
Jenjang /Program Studi : S2 Magister Ekonomi Syri'ah
Judul : **"Pengelolaan sumber daya alam laut untuk memenuhi kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua"**

Waktu : Sampai Selesai
Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian dan Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.
2. Pengambilan data ini dilaksanakan dengan tujuan kepentingan Pendidikan Mahasiswa dan pembangunan daerah tempat pengambilan data dilaksanakan.
3. Sebelum pengambilan data dimulai, pengambil data wajib lapor kepada pejabat setempat, dimana pengambilan data dilaksanakan.
4. Setelah pengambilan data selesai, pengambil data wajib menyerahkan 1 (satu) copy hasilnya kepada Pemerintah Kota Jayapura Cq. Kepala Bappeda Kota Jayapura.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang berwenang diharap bantuannya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 10 April, 2017

A.n. KEPALA BAPPEDA KOTA JAYAPURA
Sekretaris,



KRISSON SAMOSIR, SE, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19641023 198510 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Kota Jayapura
2. Sdr. Muhammad Zainal Abidin
3. Arsip.

DOKUMENTASI



Foto : Lokasi Penelitian



Foto : Perjalanan Kewilayah Lokasi Penelitian



Foto : Mengikuti aktifitas masyarakat sebagai nelayan

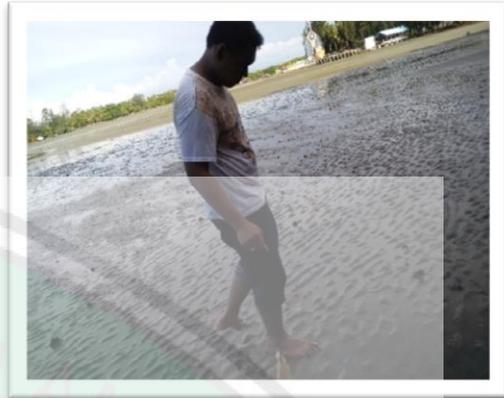


Foto : Air laut yang surut dan biasanya digunakan untuk bermain bola



Foto : Tempat ibu-ibu mencari bia (kerang)



Foto : Suasana di lokasi penelitian (Kampung Enggros)



Foto : Dermaga di Teluk Yotefa



Foto : Foto bersama pemerintah kampung



Foto : Foto Wawancara dengan Kepala Bidang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura



Foto : Visi dan Misi serta Struktur Pemerintahan Kampung Enggros

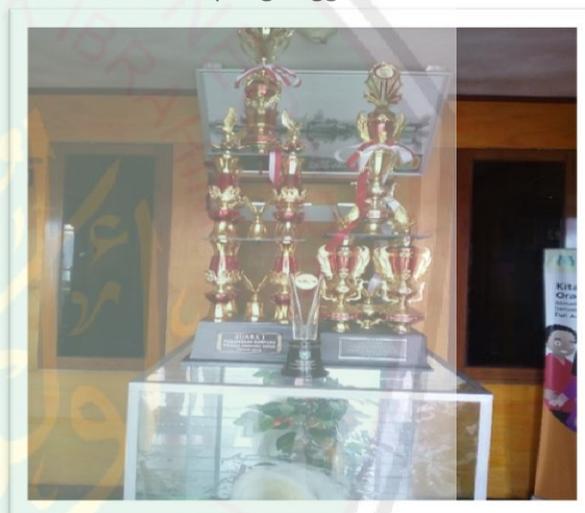


Foto : Piala dan Piagam penghargaan Kampung Enggros



Foto : Piagam penghargaan dari Tempo



Foto : Keseharian Masyarakat Kampung Enggros

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

M. Zainal Abidin, lahir di Jayapura 14 November 1992, Lulus S-I dari Jurusan Syari'ah Prodi Muammalah STAIN Al-Fatah Jayapura di Jayapura dengan predikat lulusan "baik" pada tahun 2015.. S-2 bidang Ekonomi Sy ari'ah di tempuh di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan predikat lulusan "Cumlaude". Kini sedang mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al- Fatah Jayapura. Selain itu juga aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara mengajar di Taman Pengajian Al-Qur'an di Jayapura-Papua serta memberikan pengetahuan agama kepada ibu-ibu Majelis taklim di Kota Jayapura-Papua.